

**STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN SENDANGGUWO
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG**

TESIS

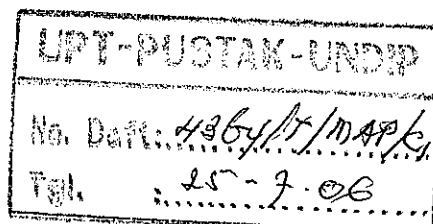
**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



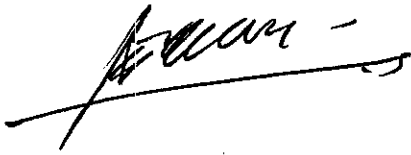
**Disusun oleh :
PAULUS MUJIRAN
D4E00415**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**



Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/Pembimbing I



(Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD)

Anggota Tim Penguji lain



(Drs. H. Yusmilarso, MA)

Sekretaris Penguji/Pembimbing II



(Dra. Diah Hariani, MM)

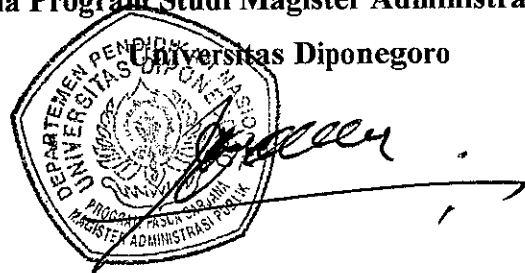


(Drs. R. Slamet Santoso, MSi)

**Tesis ini telah diterima sebagai salah satu prasyarat
Untuk memperoleh gelar Magister Sain**

Tanggal : 22 Agustus 2005

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Universitas Diponegoro


(Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 22 Agustus 2005



Paulus Mujiran

ABTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kecenderungan perilaku masyarakat penerima program penanggulangan kemiskinan guna mengatasi kemiskinan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, yang merupakan binaan dari Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata di Semarang bekerjasama dengan pemerintah u.p Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah. Adapun program yang diberikan berbentuk program gizi, pendidikan usia dini, beasiswa dan modal usaha/peningkatan pendapatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang berusaha mencari hubungan antara variable komunikasi, sikap dan sumber-sumber dengan variable implementasi program penanggulangan kemiskinan. Adapun hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa ada hubungan antara komunikasi, sikap dan sumber-sumber terhadap implementasi program. Kecenderungan variabel komunikasi terutama tampak dalam penjelasan mengenai transmisi, konsistensi, kejelasan dan umpan balik. Kecenderungan variabel sikap terutama tampak pada penjelasan mengenai kemampuan intelektual, kemampuan interaksi, kemampuan administrasi. Sedangkan kecenderungan variabel sumber-sumber adalah pengetahuan pelaksana dalam program pengentasan kemiskinan, kecakapan/ketrampilan, wawasan yang dimiliki, kedisiplinan pelaksana. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, yang kemudian dianalisa kecenderungan yang terjadi. Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang diambil dari masyarakat penerima manfaat bantuan di Kelurahan Sendangguwo. Dari 750 KK penerima bantuan akan diambil responden 10%nya atau 75 orang yang diambil dari 8 RW Kelurahan Sendangguwo. Pengujian hipotesa dengan menggunakan korelasi Rank-Kendalls dan Konkordansi Ranks Kendalls.

Dari penelitian tersebut, diketahui terdapat hubungan yang positif yang rendah diantara komunikasi dan implementasi penanggulangan kemiskinan, terdapat hubungan positif yang rendah antara sikap dan implementasi penanggulangan kemiskinan dan terdapat hubungan positif yang rendah antara sumber-sumber dengan implementasi penanggulangan kemiskinan. Secara bersama-sama ada hubungan positif antara komunikasi, sikap dan sumber-sumber terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan. Komunikasi yang baik terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan melalui ketersediaan sarana media komunikasi yang cukup memadai serta meningkatkan kualitas kegiatan pelatihan maupun keterampilan bagi anggota program penerima bantuan permodalan baik secara rutin maupun periodik sehingga, kemampuannya dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan baik secara teknis maupun administrasi dapat meningkat. Sikap konsisten dari anggota penerima bantuan permodalan perlu ditingkatkan melalui partisipasi anggota penerima bantuan permodalan baik dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif, memelihara sarana prasarana yang lingkungan yang mendukung maupun meningkatkan kelembagaan dalam upaya berlangsungnya maupun kelestarian program di lokasi ini.

Saran bagi penelitian mengenai program penanggulangan kemiskinan hendaknya juga dilihat aspek lain yang memberi kontribusi pada masalah lingkungan dan ekosistem. Pada kenyataan lingkungan memberikan kontribusi yang besar terjadinya kemiskinan. Disamping itu, etos kerja orang miskin sendiri merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Etos kerja merupakan salah satu faktor kunci orang miskin mau dientaskan atau tidak dari kemiskinannya. Juga aspek birokrasi di tingkat bawah yang tidak bergaji pemerintah seperti aparat RT/RW merupakan garda depan dalam pengentasan kemiskinan. Dari merekalah data orang miskin, dan pendampingan lebih intensif sebenarnya bisa dilakukan semaksimal mungkin.

ABSTRACT

This research explains the trend behavior of the society who are subject to poverty eradication program. The research was carried out in Sendangguwo, Tembalang, the subordinate of the Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang in collaboration with The Government c.q. The Local Office of Social Welfare of Jawa Tengah. The program involves development in nutrition, early years development, scholarships, and financial aids. This is a quantitative approach, with attempts to find out whether relationships of communication variables, attitude, and sources to the program implementation arise. Trend of communication variables is primarily found in the description of transmission, consistence, clarity and reward. Trend of attitude variable is primary found in the explanation of intellectual quotient, interaction state, and administrative ability. At last, trend of sources variables is found in the knowledge in the program of poverty eradiction, skills and intelligence, knowledge, and disciplinary state. This research uses both quantitative and qualitative methods. The quantitative method applies with questionnaire, by wich trend is taken into primary account, where as the qualitative method applies with a direct interview with the respondents who are selected from those who received aids in Sendangguwo. Of the total of 750 family heads from 8 neighbors who receive aids, only 10% or 75 individuals undergo the interview. The hypothetical test uses a Rank-Kendalls correlative and Rank-Kendalls concordance tests.

This research reports a positively low relationship of communication to the implementation of the poverty eradication, a positively low relationship of attitude to the implementation of the poverty eradication, and positively low relationship of sources to the implementation of the poverty eradication. The research also finds a collectively positive relationship of communication, attitude, and sources to the implementation of the poverty eradication. Good communication in the impementation of the poverty eradication is a signifincant aspect. It is very important to make adequate communication and to enhance the quality of training and skills available in order of giving rise to the program implementation. Such attempts may take forms of either routine or periodically. Poverty eradication also relates to good technical and administrative qualities. Consistent program objects are keys to the success of the program. Members participation in financial aids program are expected to work optimally for the development of a productive economy. When the whole supporting aspects are well-managed, the sustainability of the program survive.

Advice for the research related to the program dealing with poverty should consider other aspects, which contribute to environment and ecosystem problems. In fact, environment gives a great contribution to poverty. Besides that, poor people's work ethic is an aspect need to be considered in the research. Work ethic is one of the key factors for poor people whether they are willing to be pulled out or not from their poverty. Bureaucracy aspect in the lowest level, which is not paid by the government, such as the lowest administrative unit and next to the lowest administrative unit in village is vanguard in dealing with poverty. Poor people's data is obtained from them as well as more intensive guidance actually can be done to its maximum point.

RINGKASAN PENELITIAN

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kegiatan pengentasan kemiskinan ialah memberikan bantuan yang bersifat karitatif maupun pemberdayaan dengan tujuan mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kehidupannya. Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan purba, yang bersifat laten dan sekaligus aktual. Ia telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (*human trafficking*) juga tidak dapat dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Dalam penelitian ini memilih variabel yang diduga menyebabkan penurunan angka kemiskinan mereka, yakni aspek komunikasi. Program pengentasan kemiskinan erat kaitannya dengan interaksi sosial antara aparat kelurahan, petugas lapangan dan masyarakat miskin sendiri sebagai subyek pengentasan kemiskinan. Interaksi timbal balik ini sangat diperlukan semenjak pendataan dilakukan, penyusunan dana, sosialisasi, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Aspek terpenting adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Terbukti penjelasan awal sangat menentukan masyarakat miskin mau diajak bekerjasama. Kerjasama timbal balik sangat diperlukan. Dalam konteks program yang dilaksanakan YKKS, komunikasi mengalami kendala karena waktu yang tersedia melakukan pendataan dan sosialisasi terbatas, keinginan aparat kelurahan yang membagi rata bantuan, serta tanggapan masyarakat miskin yang apatis terhadap bantuan-bantuan semacam ini. Hal ini tidak lepas bahwa masyarakat miskin sudah terbiasa dan barangkali bosan dengan beragam jenis program penanggulangan kemiskinan. Sementara, aparat, pekerja sosial kurang mempunyai strategi yang bervariasi dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu aspek sikap. Sikap ini penting karena mendasari seseorang sebelum melakukan tindakan. Jika seseorang memperoleh informasi atau pengetahuan baru berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, reaksi yang muncul tentunya adalah tanggapan atau dorongan untuk melakukan sesuai dengan perintah atau informasi yang diterimanya. Namun karena kurang jelas dalam informasi, seringkali pengetahuan yang diterima tidak segera dipraktekkan. Kendala bisa dari dalam diri orang miskin sendiri yang enggan bertindak. Juga dari luar diri orang miskin sendiri seperti tanggapan anggota masyarakat lain. Rasa iri hati masyarakat lain yang tidak menerima bantuan juga menjadi penghambat dalam perubahan sikap. Keberhasilan atau kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh sikap penerima bantuan sendiri. Jika sikap mereka positif dan terdorong untuk bertindak sesuai dengan rencana maka diharapkan mereka mampu diajak bekerjasama.

Aspek ketiga adalah, sumber-sumber yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Disamping sarana yang tersedia dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi di lapangan sesuai hasil riset PRA pada awal program dilaksanakan sebagian besar keluarga miskin dari 750 KK, 80% diantaranya tidak lulus SMP atau 600 KK, 75% bekerja serabutan 563 KK tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan kondisi pekerjaan semacam ini mereka hampir tidak waktu diajak memikirkan keluarganya karena suami isteri habis waktunya

dalam pekerjaan. Jikapun tersedia waktu untuk konsultasi atau koordinasi dalam pertemuan RT/RW pada malam hari dengan kondisi yang sudah amat lelah. Sementara daya dukung sarana lain seperti pemasaran usaha bagi yang memperoleh pinjaman modal juga tidak mudah dilaksanakan. Produk hasil usaha orang miskin sering kurang bersaing dan kurang laku di pasaran.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) koefisien korelasi antara komunikasi dengan implementasi sebesar 4,48 dengan tingkat signifikan 1,96 (5%) dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan positif yang rendah antara komunikasi dan implementasi. 2) koefisien korelasi antara sikap dengan implementasi penanggulangan kemiskinan sebesar 4,48 pada tingkat signifikansi 1,96 (5%) dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan positif yang rendah antara sikap dengan implementasi program penanggulangan kemiskinan. 3) koefisien korelasi antara sumber-sumber dengan implementasi sebesar 8,58 dengan tingkat signifikansi sebesar 1,96 (5%) dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan positif yang rendah antara sumber-sumber dengan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Koefisien antara komunikasi, sikap dan sumber-sumber terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan sebesar 12,25% pada tingkat signifikansi 1,96% dapat diinterpretasikan bahwa ketika variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Koefisien determinan sebesar... yang mencerminkan tingkat sumbangan variabel komunikasi, sikap dan sumber-sumber terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor lain di luar ketiga variabel tersebut yang memberikan sumbangan sebesar 17,54 terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan. Faktor-faktor lain diluar ketiga faktor tersebut diatas antara lain keragaman perilaku kelompok sasaran, etos kerja, dukungan dari pejabat setempat, dukungan politik dan sumber daya publik dan sumber yang tersedia serta kondisi sosial ekonomi dan teknologi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tujuan penulisan tesis ini disamping untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar sarjana strata 2 pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang, juga untuk mengetahui implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo Kota Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PHd selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang telah berkenan mendorong penulis melaksanakan penelitian ini.
2. Ibu Dra. Diah Hariani, MM selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, pengorbanan tenaga maupun pikiran sejak permulaan hingga selesainya thesis ini.
3. Bapak Drs. Yusmilarso, MA selalu penguji yang telah memberikan koreksi dan saran-saran berharga demi penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Drs. R. Slamet Santosa, MSi selaku penguji yang telah memberikan koreksi, saran dan masukan yang amat bermanfaat semenjak penulisan proposal hingga selesainya tesis ini.

5. Bapak Dr. Jacob Oetama Pemimpin Umum Harian Kompas Jakarta yang telah memberikan beasiswa kepada penulis guna menyelesaikan studi sarjana strata 2 dengan lancar.
6. Bapak Casimir Dayat, S.Sos, Camat Kecamatan Tembalang, Bapak Dawamuri, SH Kepala Kelurahan Sendangguwo dan Bapak Didiek Sudarmadi, BBA, MBA sebagai Ketua Badan Musyawarah Masyarakat (BMM) Kelurahan Sendangguwo yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian di Kelurahan Sendangguwo.
7. Ibu Prof. Dr. Djulianti Suroyo dan Ibu C. Djoeariah, SH selaku pembina, dan para pengawas, pengurus dan staf Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesempatan penulis mengadakan penelitian ini.
8. Istriku tersayang Maria Magdalena Mien Haryanti, SE, kedua orang tuaku (alm) Bernardus Sudiharjo dan (alm) Bernarda Tumikem, kedua mertuaku Thomas Sutedjo dan C. Suwarti dan kakak adikku yang telah memberikan dorongan moril, motivasi, serta tak kenal lelah menyemangati penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka penulis akan menerima dan berterima kasih atas segala kritik dan saran yang diberikan demi perbaikan selanjutnya. Akhir kata penulis berharap penulisan tesis ini berguna di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL BUKU	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
RINGKASAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	18
BAB II : KERANGKA TEORI	20
E. Teori Yang Mendasari	20
1. Teori Yang Mendasari	22
2. Variabel Implementasi (Y)	27
3. Variabel Komunikasi (X1)	30
4. Variabel Sikap (X2)	40
5. Variabel Sumber-sumber (X3)	45
6. Pengaruh Komunikasi (X1) Terhadap Implementasi (Y) Program Penanggulangan Kemiskinan	49
7. Pengaruh Sikap (X2) Terhadap Implementasi (Y) Program Penanggulangan Kemiskinan	50
8. Pengaruh Sumber-Sumber (X3) Terhadap Implementasi (Y) Program Penanggulangan Kemiskinan	51
9. Pengaruh Komunikasi (X1), Sikap (X2), dan Sumber- sumber (X3) terhadap Terhadap Implementasi (Y) Program Penanggulangan Kemiskinan	51
F. Hipotesis	52
BAB III : METODE PENELITIAN	54
1. Rancangan Penelitian	54
2. Ruang Lingkup Penelitian	55
3. Lokasi Penelitian	55
4. Variabel Penelitian	55
5. Definisi Konseptual	55
6. Definisi Operasional	56
7. Jenis dan sumber data	59
8. Instrumen penelitian	60
9. Populasi dan teknik pengambilan sampel	60

10. Teknik pengumpulan data	61
11. Teknik Pengolahan data	63
BAB IV : DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	69
1. Lokasi Penelitian	69
2. Sosial Ekonomi	69
a. Keadaan penduduk	69
b. Pendidikan	70
c. Matapencaharian penduduk	71
d. Fasilitas umum yang dimiliki	72
BAB V : ANALISIS DATA	74
1. Identitas Responden	74
2. Implementasi Program (Y)	77
3. Komunikasi (X1)	84
4. Sikap (X2)	94
5. Sumber-sumber (X3)	101
BAB VI : PENGUJIAN HIPOTESA	113
A. Pengaruh Komunikasi (X1) Terhadap Implementasi (Y)	114
B. Pengaruh Sikap (X2) Terhadap Implementasi (Y)	115
C. Pengaruh Sumber-Sumber (X3) Terhadap Implementasi (Y)	116
D. Pengaruh Komunikasi, Sikap, Sumber-Sumber Terhadap Komunikasi	124
E. Pembahasan	126
BAB VIII : PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Hubungan Antara Variabel	23
2. Model Geometrikal Hipotesis Minor	53
3. Model Geometrikal Hipotesis Mayor	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I	
1. Data penduduk miskin Kota Semarang	8
2. Yayasan/LSM yang memberdayakan kaum miskin	10
3. Program pemerintah mengentaskan kemiskinan	11
4. Data pengentasan kemiskinan YKKS	13
BAB IV	
1. Klasifikasi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin	70
2. Klasifikasi penduduk menurut pendidikan	71
3. Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian	72
BAB V	
1. Sebaran responden menurut jenis kelamin	74
2. Sebaran responden menurut status dalam keluarga	75
3. Sebaran responden menurut usia	75
4. Sebaran responden menurut pendidikan	76
5. Sebaran responden menurut pekerjaan	76
6. Kesadaran responden dalam mengikuti pertemuan	77
7. Kesadaran responden terlibat dalam pertemuan	78
8. Kesadaran responden dalam penyusunan rencana	78
9. Kesadaran responden dalam mengikuti kegiatan	79
10. Kesadaran responden terlibat dalam pertemuan pembahasan program	80
11. Kesadaran responden terlibat dalam monitoring dan evaluasi program	81
12. Kepatuhan responden dalam menjalankan petunjuk program	82
13. Kepatuhan responden aktif menjalankan kegiatan	83
14. Kategori penilaian variabel implementasi program	84
15. Sarana yang dipergunakan dalam bidang permodalan memadai	85
16. Informasi pelaksanaan bidang permodalan lengkap	85
17. Informasi yang akurat mengenai biaya bidang permodalan	86
18. Informasi yang lengkap mengenai keakuratan mekanisme bidang permodalan	87
19. Informasi yang jelas mengenai bidang permodalan	88
20. Responden mendapat pemberitahuan mengenai permodalan secara konsisten	88
21. Pelaksana program selalu kompak dalam menyampaikan informasi permodalan	89
22. Informasi permodalan mudah dilaksanakan	91
23. Informasi permodalan diberikan lengkap	92
24. Pelaksana mampu mengelola masukan tentang permodalan	93
25. Setelah mendapat penjelasan, mampu memecahkan masalah permodalan	94
26. Kategori penilaian variabel komunikasi	95
27. Tingkat pengetahuan pelaksana memadai untuk bidang permodalan	95
28. Kemampuan pelaksana dalam menangani bidang permodalan	95
29. Kemampuan pelaksana dalam memahami tugas bidang permodalan	96
30. Pelaksana mampu bekerjasama dengan masyarakat	97
31. Pelaksana mampu menjadi pelayan masyarakat yang baik	97

32. Pelaksana mampu melaksanakan prosedur administrative	98
33. Pelaksana tertib dalam pembuatan laporan permodalan	99
34. Kategori penilaian variabel sikap	101
35. Tingkat pendidikan pelaksana memadai untuk bidang permodalan	101
36. Pelaksana mengikuti pendidikan non-formal di bidang permodalan	102
37. Pelaksana paham dengan bidang permodalan	103
38. Pelaksana menguasai materi sosialisasi bidang permodalan	103
39. Pelaksana terampil dalam memberi contoh di bidang permodalan	104
40. Pelaksana cakap dalam menjalankan bidang permodalan	105
41. Ketelitian pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang permodalan	106
42. Pelaksana memiliki wawasan yang luas dalam seleksi	106
43. Pelaksana memiliki wawasan tentang ketepatan penerima bantuan	107
44. Pelaksana memiliki wawasan tentang deviasi penggunaan bantuan	108
45. Pelaksana memiliki alternatif pemecahan masalah permodalan	108
46. Sarana yang tersedia memadai	109
47. Sarana yang tersedia dipergunakan secara optimal	110
48. Kemudahan dalam mendapat sarana pendukung	110
49. Kategori penilaian variabel sumber-sumber	112

BAB VI

1. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi program pengentasan kemiskinan	114
2. Pengaruh sikap terhadap implementasi program pengentasan kemiskinan	115
3. Pengaruh sumber-sumber terhadap implementasi program pengentasan	116

LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Nilai jawaban responden
3. Skor dan ranking X1 dan Y
4. Skor dan ranking X2 dan Y
5. Skor dan ranking X3 dan Y
6. SX1Y
7. SX2Y
8. SX3Y
9. TY
10. Tabel Konkordasi Kendall
11. Peta Lokasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kegiatan pengentasan kemiskinan ialah memberikan bantuan yang bersifat karitatif maupun pemberdayaan dengan tujuan mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kehidupannya.

Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan purba, yang bersifat laten dan sekaligus aktual. Ia telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (*human trafficking*) juga tidak dapat dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan, beragam kebijakan dan program telah disebar-terapkan, berjumlah dana telah dikeluarkan demi menanggulangi kemiskinan.. Pertanyaannya: mengapa kemiskinan masih menjadi bayangan buruk wajah kemanusiaan kita hingga saat ini? Dalam skala nasional, jumlah penduduk miskin secara persentase umumnya berada di luar Pulau Jawa, seperti Papua (41,80%), Maluku (34,78%), Gorontalo (32,12%), dan NTT (30,74%). Kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 7,3 juta (Kompas, 22 April 2005).

Pengertian orang miskin menurut LSM-LSM dunia ketiga : menempatkan orang miskin sebagai sekelompok orang yang termarginalisasi secara sosial, ekonomi dan politik. Mereka menjadi miskin karena tidak tersedia akses untuk berdaya. Sedangkan definisi orang

miskin yang diberikan BKKBN, seseorang disebut miskin dengan ciri-ciri : dalam sehari makan < 3x, penghasilan tidak tetap, tidak mempunyai sawah atau tegalan, rumah sederhana dari *gedeg* (bilik bambu) ukuran 6 x 4 meter persegi dan berlantai tanah. Juga termasuk dalam kriteria itu para jompo, manula dan para janda ditinggal mati suaminya (BKKBN, 2004 : 3).

Ada dua hal yang menyebabkan kemiskinan, yakni masalah etos yang berasal dari orang miskin sendiri, dan berikutnya sistem atau struktur sosial yang menyebabkan orang miskin tetap miskin. Masalah etos ini biasanya menempatkan orang miskin sebagai kelompok orang yang malas bekerja, boros, tidak mau bekerja keras.

Menyangkut masalah etos kerja orang miskin (Kuntjaraningrat, 2000 : 39), orang desa dengan pekerjaan sebagai petani mempunyai mentalitas khas mental petani. Mental petani ini lemah sehingga mudah dikuasai oleh mereka yang bermental lebih tinggi. Mentalitas petani tidak biasa berspekulasi tentang hakikat dari hidup, karya dan hasil karya manusia. Mentalitas petani mempunyai persepsi waktu yang terbatas. Irama waktu ditentukan oleh cara-cara adat dalam memperhitungkan lingkaran waktu.

Sebagian besar dari keputusan-keputusan penting dan arah orientasi hidup petani ditentukan oleh keadaan masa kini. Dalam mentalitas petani menilai tinggi konsep sama rata sama rata. Dalam kerangka ide, petani berpandangan bahwa mereka tidak berdiri sendiri, ia selalu bisa mendapatkan bantuan dari kaum kerabatnya terutama pada masa kesusahan. Konsep ini memberi keamanan hidup. Konsep ini juga mendorong untuk terus memelihara hubungan baik dengan sesama, keperluan orang lain, dan gotong royong.

Sedangkan menyangkut masalah struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, persoalan kemiskinan selalu berpangkal pada persoalan ketidakadilan. Amartya Zen (1998 : 56) berpendapat bahwa sepanjang sejarah dunia sebenarnya tidak pernah bumi ini mengalami

kekurangan dalam penyediaan bahan pangan, yang terjadi adalah distribusi yang tidak merata sehingga krisis demi krisis kerap terjadi. Ketidakadilan menyebabkan sekelompok orang yang diuntungkan, dan sekelompok orang ini berusaha melanggengkan keuntungan itu. Orang-orang beruntung ini membentuk organisasi atau jaringan yang sangat halus dan berlapis lapis, sehingga yang namanya jaringan "kuasa kegelapan" ini tidak dapat dibayangkan sebagai sesuatu yang terpusat pada seseorang saja.

Kemiskinan struktural menurut A. Suryawasita SJ (1992 : 302) merupakan bentuk kemiskinan yang "sengaja" diciptakan pihak lain. Kondisi ini bisa kian langgeng karena: *pertama*, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tingkat negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak; *kedua*, kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk; *ketiga*, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi; *keempat*, disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik; *kelima*, pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial; *keenam*, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya ekosistem yang secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin; dan *ketujuh*, kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat, yang memacu bertambahnya penumpukan pendapatan dan kesejahteraan.

Kemiskinan yang dialami petani Indonesia merupakan salah satu contoh konkret kemiskinan alamiah sekaligus kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah sehingga peluang produksi menjadi kecil. Bila mereka dipaksa berproduksi, hal itu dilakukan dengan

efisiensi yang rendah sehingga hasilnya tak optimal. Dalam lingkup pertanian, sumber daya yang mempengaruhi munculnya kemiskinan adalah kualitas lahan dan iklim. Di Indonesia, lahan subur mungkin hanya dijumpai di Jawa. Itu pun kini bersaing dengan konversi lahan untuk industri dan perumahan. Dengan sumber daya alam yang terbatas membuat petani harus menerima kenyataan, yakni penguasaan lahan sempit, sehingga produksi menjadi tidak efisien.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak disebabkan tatanan kelembagaan. Dalam hal ini tatanan kelembagaan dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Sebagai contoh dapat dilihat pada struktur perekonomian sektor pertanian. Pada tahun 1970-an perekonomian Indonesia mengalami transformasi struktural. Hal ini dicirikan dengan penurunan pangsa relatif sektor pertanian pada Produk Domestik Bruto (PDB). Pada akhir tahun 1960-an pangsa relatif sektor pertanian mencapai kira-kira 43 persen dari PDB.

Dewasa ini pangsa itu menjadi sekitar 17 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja nasional, tahun 1960-an ada sekitar 60 persen angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian. Adapun tahun 1988 penyerapan angkatan kerja adalah 56 persen. Ini menunjukkan penurunan pangsa relatif sektor pertanian pada PDB lebih cepat daripada penurunan penyerapan angkatan kerja. Hal ini berarti distribusi pendapatan tenaga kerja sektor pertanian relatif terhadap sektor-sektor non-pertanian kian melebar (Nasoetion, 1996 : 2).

Pemerintah Indonesia rupanya belum beranjak dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kritik yang relevan diajukan kepada pemerintah ialah, pandangan bahwa kemiskinan harus diselesaikan dengan gelontoran bantuan. Kemiskinan diatasi dengan memberi sesuatu kepada orang miskin. Padahal, bantuan kepada orang miskin hanya akan

efektif manakala berupa bantuan yang bersifat memberdayakan, penguatan, usaha-usaha mandiri sehingga mereka bisa mandiri kelak di kemudian hari. Sudah terbukti, bantuan yang sifatnya karitatif hanya membantu sesaat dan kemudian setelah bantuan habis mereka akan kembali menjadi miskin.

Kemiskinan memiliki dimensi yang luas. Konsep kemiskinan memiliki *wayuh arti*, tergantung dari perspektif yang digunakan: apakah bermatra sosio-kultural, ekonomi, psikologi, atau politik. Seringkali kemiskinan diartikan dengan merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkannya. Misalnya, pada konsep mengenai kemiskinan kebudayaan dan kemiskinan struktural. *Pertama*, melihat budaya kemiskinan seperti malas, apatis, kurang berjiwa wiraswasta sebagai penyebab seseorang miskin. *Kedua* menilai bahwa struktur sosial yang tidak adil, korup, paternalistik sebagai penyebab kemiskinan.

Sejalan dengan pendekatan ini, operasionalisasi kemiskinan biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator masukan (*input indicators*). Pendekatan lainnya, melihat kemiskinan dari indikator keluaran (*output indicators*). Di sini, kemiskinan dilihat dari gejala atau hasil (*outcome*) yang ditimbulkannya. Seseorang dikatakan miskin, misalnya, kalau memiliki pendapatan rendah, rumah tidak layak huni, atau buta huruf.

Dari hal tersebut, penanggulangan kemiskinan dapat diibaratkan dengan analogi ikan dan kail. Sering dikatakan bahwa memberi ikan kepada si miskin tidak dapat menyelesaikan masalah. Si miskin akan menjadi tergantung. Kemudian, banyak orang percaya memberi kail akan lebih baik. Si miskin akan lebih mandiri. Benarkah? Analogi ini perlu diperluas. Memberi kail saja ternyata tidak cukup. Meskipun orang punya kail, kalau ia tidak memiliki cara mengail ikan tentunya tidak akan memperoleh ikan. Pemberian keterampilan (*capacity building*) kemudian menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setelah

orang punya kail dan memiliki keterampilan mengkail, tidak dengan serta merta ia dapat mengumpulkan ikan, jikalau lautan, sungai dan kolam dikuasai kelompok "elit". Karenanya, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan makro kelembagaan. Perumusan kebijakan sosial adalah salah satu piranti penciptaan keadilan yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.

Di dalam penulisan tesis ini, penulis memfokuskan diri pada pengentasan kemiskinan dengan mengabaikan penyebab kemiskinan baik etos maupun struktural. Dalam hemat penulis, penyebab kemiskinan memang memberikan varian pada pendekatan dan upaya strategi pengentasan kemiskinan. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah cq Departemen Sosial menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan. Program ini merupakan kerangka besar pengentasan kemiskinan berskala nasional. Beragam program dijalankan antara lain Pemberdayaan Koperasi, Pemberdayaan Nelayan Pesisir, Beasiswa Pendidikan, Kesehatan, Pangan dengan Beras Miskin, Pelatihan dan Pemberian Dana Stimulasi, Program Air Bersih, Pengentasan Anak Jalanan melalui Program Rumah Singgah, Pengentasan Keluarga dan Anak Miskin, serta Pemberantasan Narkoba. Program-program ini dijalankan unit-unit terkait pemerintah maupun bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat / Yayasan yang berkecimpung dalam pengentasan kemiskinan. (Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Semarang, 2005 : 1).

Salah satu persyaratan Yayasan Sosial yang dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan antara lain berbadan hukum, terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Propinsi, anggota K3S dan BK3S, serta terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) yang

bertempat di Jl. Kedungmundu Raya 26 Semarang, merupakan salah satu dari beberapa yayasan sosial (LSM) yang bekerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan menjadi lokasi penelitian ini. YKKS mengambil bagian dalam pengentasan kemiskinan keluarga dan anak miskin.

Program yang dijalankan YKKS bekerjasama dengan pemerintah antara lain, bantuan pemeliharaan kesehatan, sanitasi lingkungan, beasiswa, permodalan (yang menjadi focus penelitian). Penulis memfokuskan diri pada penanggulangan dengan pemberian insentif permodalan karena dalam program ini pemberdayaan dan pendampingan lebih dirasakan. YKKS didirikan pada tanggal 8 Mei 1977 oleh sekelompok orang yang peduli pada masalah-masalah sosial kota Semarang. Visi dasarnya bergerak dalam penanggulangan kemiskinan terutama berfokus pada pengentasan kemiskinan berbasis pada anak dan keluarga.

Hasil observasi menunjukkan, diduga ada kendala dalam pengentasan kemiskinan diantaranya adalah komunikasi antara petugas dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat sendiri, dan sikap, dan sarana pendukung yang tersedia dalam pengentasan kemiskinan. Komunikasi, sikap dan sumber-sumber dari dalam organisasi itu sangat mendukung dalam pelaksanaan program. Dengan komunikasi yang lancar, informasi yang tersedia dengan memadai, sumber daya yang mencukupi, memungkinkan terjadinya perubahan perilaku si miskin mengentaskan diri mereka sendiri.

Dengan 20 pekerja sosial, YKKS mendampingi 750 KK warga miskin. Tidak terlepas dari sikap masyarakat setelah memperoleh informasi dari para pekerja sosialnya dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Program Penanggulangan Kemiskinan didesain untuk mendorong masyarakat membangun daya tahan menghadapi krisis ekonomi. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada program bantuan permodalan guna meningkatkan kegiatan

ekonomi rumah tangga masyarakat dampingan. Program Penanggulangan Kemiskinan seperti pemberian bantuan dipandang kurang efektif. Bahkan program-program yang bersifat pemberdayaan untuk usaha-usaha mandiri seperti bantuan permodalan cenderung kurang efektif juga.

Beberapa penyebab program Penanggulangan Kemiskinan kurang mengena dikalangan masyarakat miskin diduga karena pendata cenderung terburu-buru memenuhi target jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah, kurang siapnya tenaga pelaksana di lapangan terutama aparat dan kader-kader, pengucuran dana yang selalu terlambat, dana yang mestinya dipergunakan pada tahun 2004 akan turun pada periode 2005. Disamping monitoring dari pemerintah juga cenderung lemah. Berikut ini dipaparkan data penduduk miskin dengan kriteria mengacu pada kriteria/definisi yang diajukan oleh BKKBN.

Tabel I.1
Data Penduduk Miskin Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah KK Miskin	Prosentase (%)
1	Semarang Barat	7.014	11.89 %
2	Genuk	4.400	7.46 %
3	Candisari	3.125	5.29 %
4	Semarang Utara	4.900	8.30 %
5	Banyumanik	2.865	4.85 %
6	Gayamsari	2.980	5.05 %
7	Gajahmungkur	1.750	2.96 %
8	Pedurungan	4.900	8.30 %
9	Semarang Timur	3.931	6.66 %
10	Semarang Tengah	3.300	5.59 %
11	Ngaliyan	3.330	5.64 %
12	Mijen	3.275	5.55 %
13	Semarang Selatan	3.025	5.12 %
14	Tembalang	4.600	7.80 %
15	Gunungpati	3.925	6.65 %
16	Tugu	1.650	2.79 %
	TOTAL	58.970 KK	100 %

Sumber : Bagian Ekonomi Pemkot Semarang, 2005

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Semarang Barat menduduki ranking tertinggi dalam jumlah penduduk miskin (7,014 KK). Hal ini tidak terlepas dari kondisi kawasan yang memang berbatasan dengan pantai, dimana banyak penduduk bekerja sebagai nelayan. Dan bertebaran pabrik sehingga sebagian diantaranya bekerja di pabrik dan merupakan kaum pendatang.

Pada penulisan tesis ini, penulis mengambil lokasi di Kelurahan Sendangguwa yang merupakan bagian dari Kecamatan Tembalang dengan alasan lokasi kerjasama YKKS berada di kecamatan tersebut. Selain itu, Kelurahan Sendangguwa memiliki jumlah penduduk miskin yang mencapai 750 KK, jumlah terbesar kelurahan miskin di Kota Semarang. Pertimbangan lain adalah penunjukan Bagian Sosial Pemkot Semarang berdasar surat nomor 653/BagSos/Pemkot/X/2003 tanggal 14 November 2003 mengenai kawasan Sendangguwa sebagai lokasi kegiatan YKKS dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dikuatkan dengan pelaksanaan riset *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang dilakukan yayasan pada akhir tahun 2003 dan awal tahun 2004 menemukan data bahwa kawasan tersebut layak mendapat bantuan pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan di Kota Semarang juga dilakukan oleh yayasan/LSM yang mempunyai kepedulian pada masalah pengentasan kemiskinan. Berikut ini disajikan data mengenai yayasan/LSM yang menaruh kepedulian pada pengentasan kemiskinan.

Tabel I.2
Yayasan/LSM Yang Memberdayakan Kaum Miskin

No	Nama Yayasan	Jenis Kegiatan
1	Yayasan Aisiah	Panti Asuhan
2	Yayasan Al Hikmah	Panti Asuhan
3	Yayasan Al Fitroh	Panti Asuhan
4	Yayasan Al Burhan	Panti Asuhan
5	Yayasan Al Bisri	Panti Asuhan
6	Yayasan Ar Rahman	Panti Asuhan
7	Yayasan Al Huda	Panti Asuhan
8	Yayasan Al Mabruur	Panti Asuhan
9	Yayasan At Taqwa	Panti Asuhan
10	Yayasan Al Mustafirin	Panti Asuhan
11	Yayasan Al Hidayah	Panti Asuhan
12	Yayasan Al Huda	Panti Asuhan
13	Yayasan Bala Keselamatan	Panti Asuhan, Panti Karva, Panti Wredha
14	Yayasan Christopherus	Panti Asuhan
15	Yayasan Darut Taqwa	Panti Asuhan
16	Yayasan Daru Salam	Panti Asuhan
17	Yayasan Darul Iman	Panti Asuhan
18	Yayasan Darul Najah	Panti Asuhan
19	Yayasan Eunike	Panti Asuhan
20	Yayasan El Rai	Panti Asuhan
21	Yayasan Fastabuiqul Qoirot	Panti Asuhan
22	Yayasan Gedung Wanita	Panti Asuhan
23	Yayasan Gatot Subroto	Panti Asuhan
24	Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata	Pengentasan Kemiskinan Anak & Keluarga
25	Yayasan Ikhlasul Amal	Panti Asuhan
26	Yayasan Jati Sejahtera	Panti Asuhan
27	Yayasan Yatama Al Firdausi	Panti Asuhan
28	Yayasan Ittihad	Pengentasan Kemiskinan
29	Yayasan Jati Margo	Penanganan Narkoba
30	Yayasan Kesejahteraan Muslimat	Panti Asuhan
31	Yayasan Muhamadiyah	Pengentasan Kemiskinan
32	Yayasan Muawanah	Panti Asuhan
33	Yayasan Nurul Huda Azuhdi	Panti Asuhan
34	Yayasan Rodlotun Nikmah	Panti Asuhan
35	Yayasan Rahmatin Lil Alamin	Panti Asuhan
36	Yayasan Sutan Fatah	Panti Asuhan
37	Yayasan Sos Desa Taruna	Panti Asuhan
38	Yayasan Tanah Putih	Panti Asuhan
39	Yayasan Wikrama Putra	Panti Asuhan
40	Yayasan Nurul Janah	Panti Asuhan
41	Yayasan Baiturohim	Penyantunan Anak Yatim Non Panti
42	Yayasan BKS Arimbi	Penyantunan Anak Yatim Non Panti
43	Yayasan Chusnul Hatimah	Penyantunan Anak Yatim Non Panti
44	Yayasan Al Hikmah	Penyantunan Anak Yatim Non Pantii
45	Yayasan Tabitha	Pengentasan Kemiskinan
44	Yayasan Karta Jaya	Pengentasan Kemiskinan
45	Yayasan Syahidin	Pengentasan Kemiskinan
46	Yayasan Harapan Ibu	Panti Wredha
47	Yayasan Penyelenggaraan Ilahi	Pengentasan Kemiskinan
48	Yayasan Pelkris	Panti Wredha
49	Yayasan Hargodedali	Panti Lansia
50	Yayasan Kunti Wirambudi	Panti Lansia

Sumber : Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Semarang, 2005

Dari data tersebut nampak jika sebagai besar LSM/Yayasan lebih menaruh perhatian pada upaya membantu orang miskin di panti asuhan ketimbang langsung terjun dengan masyarakat. Hal ini disebabkan, kompleksitas permasalahan jauh lebih kompleks ketika berhadapan dengan masyarakat. Pendampingan anak miskin di panti cenderung lebih mudah diarahkan, teratur, dan dana yang dipergunakan relatif pasti dari bantuan-bantuan pemerintah dan masyarakat. YKKS merupakan salah satu yayasan sosial yang mendapat kesempatan bekerjasama dengan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan.

Tabel I.3
Program Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan

No	Tahun	Jenis Kegiatan
1	1990 - 2000	Program Pengentasan Kemiskinan dengan Inpres Desa Tertinggal
2	2000 - 2001	Program PDM DKE
3	2001 - sekarang	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
4	2001 - sekarang	Program Pengentasan Kemiskinan dengan Melibatkan LSM-PSM

Sumber : Bagian Sosial Kota Semarang, 2005

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan beberapa jenis kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Program IDT, dilanjutkan dengan PDM DKE, kemudian P2KP dan Pengentasan Kemiskinan dengan melibatkan LSM atau yayasan-yayasan sosial. Tampak bahwa dinamika penanggulangan kemiskinan ditempuh dengan berbagai cara dan sedapat mungkin melibatkan berbagai kalangan dalam masyarakat.

Program Penanggulangan Kemiskinan cenderung gagal karena hanya mampu menyelesaikan sebagian persoalan yang dihadapi masyarakat, program cenderung *top down* paket seragam secara nasional dan berorientasi pada target. Padahal, kita membutuhkan program yang terpusat pada manusia, ditekankan pada perbaikan kondisi manusia, juga dibarengi dengan pelestarian yakni mempertahankan keanekaragaman.

Program Penanggulangan Kemiskinan gagal oleh sebab memicu ketergantungan baru di kalangan rakyat miskin yang semestinya sudah mampu beradaptasi karena krisis berkepanjangan. Sebagai contoh : anak-anak dari keluarga-keluarga miskin yang tidak mampu sekolah menemukan jalan buntu kehidupan mereka. Mereka turun ke jalanan dengan bekerja sebagai pengamen, pemulung, pengasong, pengemis, dan penjaja seks. Meski pendapatan mereka kecil, mereka cenderung bertahan di jalanan sebab mereka tahu cara mendapatkan uang.

Permasalahan itu sangat memprihatinkan bagi pemerintah kota Semarang maupun masyarakat yang peduli. Kepedulian pemerintah sudah nampak dengan memberikan paket-paket program penanggulangan kemiskinan yang sebagian diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin. Namun demikian, mesti ditegaskan, pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak hanya menyediakan dana saja, perlu menciptakan peraturan daerah (Perda) yang membela kepentingan dan hak-hak mereka.

YKKS diberi kepercayaan dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan bersama dengan Departemen Sosial Pusat dan Pemerintah Kota Semarang. Program ini mulai diselenggarakan sejak tahun 2003 di Kelurahan Sendangguwo. Beberapa program diterapkan oleh KKS dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yaitu : 1) penyelenggaraan pendidikan melalui beasiswa; 2) modal usaha untuk menunjang ekonomi rumah tangga; 3) gizi; 4) sanitasi lingkungan dan pendidikan anak usia dini.

Tabel I.4
Dana Pengentasan Kemiskinan YKKS
Tahun 2004

No	Jenis Kegiatan	Dana Yang Dipergunakan (Rp.)
1	Pendidikan/beasiswa	345.309.505
2	Permodalan	500.234.250
3	Gizi	352.327.235
4	Sanitasi lingkungan	645.323.232
5	Pendidikan Usia Dini	534.232.250

Sumber : Data Yayasan KKS, Januari 2005

Dari table 1.4 dapat disimpulkan beberapa bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin. Disamping diberikan bantuan permodalan (focus utama penelitian ini) yang mencapai Rp. 500.234.250 setiap tahun yang program ini bersifat memberdayakan, juga diberikan program yang bersifat karitatif dengan asumsi bahwa pada masa-masa permulaan bantuan diberikan mereka masih memerlukan bantuan semacam ini sebagai stimulan. Dengan demikian, selama gizi, kesehatan, lingkungan dan pendidikan dibantu mereka mampu merencanakan masa depan dengan membangun kemandirian.

Meski dana yang dikucurkan cukup besar, belum efektif dan efisiennya program ini mendorong penulis untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya program tidak mencapai sasaran. Beberapa hal yang bisa dijadikan alasan, yaitu :

1. Program diberikan tidak tepat sasaran. Yang dimaksud disini adalah ditemukan kesenjangan antara data yang dihimpun sebelum program dilaksanakan dengan pelaksanaan program. Pada waktu pendataan dengan PRA melibatkan aparat RT/RW dan kelurahan terbukti banyak keluarga titipan aparat mencapai 30% atau sekitar 225 KK.
2. Program diberikan secara *top down*, seragam dari pusat ke seluruh daerah di Indonesia dengan juklak (petunjuk pelaksanaan). Metode penanggulangan kemiskinan disamakan di berbagai tempat. Dan juknis (petunjuk teknis) secara kaku di seluruh Indonesia. Akibat

keunikan daerah menjadi kurang berkembang. Pedoman yang diberikan bersifat nasional, artinya jenis program dan jenis kegiatan diseragamkan untuk keseluruhan di Indonesia. Misalnya program dan kegiatan di Lampung pedesaan juga sama dengan Semarang yang sifatnya perkotaan.

3. Sosialisasi yang cenderung terburu-buru dan tidak mendalam karena target waktu yang telah ditentukan oleh pusat. Para pekerja sosial mempunyai waktu antara proposal kegiatan disetujui dengan sosialisasi hanya 1 bulan. Padahal dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar miskin dengan SDM kurang memadai hal ini sukar dilakukan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan YKKS di daerah menjadi tidak efektif dan efisien. Komunikasi antara pemberi bantuan/pemerintah, pelaksana di lapangan dengan masyarakat miskin sebagai sasaran kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan.
4. Mental masyarakat miskin yang sulit untuk diubah, karena mereka telah terbiasa hidup dalam keterbatasannya. Situasi ini juga menyebabkan mereka lebih mudah menyerah pada kesulitan.
5. Mentalitas aparat di tingkat bawah yang berorientasi pada target, sementara proses pemberdayaan kaum miskin sendiri cenderung diabaikan. Hal ini dibuktikan dengan keinginan aparat kepada yayasan bahwa bantuan yang diberikan dibagi rata saja untuk semua masyarakat miskin dengan pertimbangan mengurangi kecemburuan sosial serta konflik dengan aparat kelurahan.

Untuk membatasi masalah, penulis akan meneliti tiga faktor yang diduga menyebabkan penurunan angka kemiskinan mereka, yakni aspek komunikasi. Program pengentasan kemiskinan erat kaitannya dengan interaksi sosial antara aparat kelurahan, petugas lapangan dan masyarakat miskin sendiri sebagai subyek pengentasan kemiskinan.

Interaksi timbal balik ini sangat diperlukan semenjak pendataan dilakukan, penyusunan dana, sosialisasi, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Aspek terpenting adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Terbukti penjelasan awal sangat menentukan masyarakat miskin mau diajak bekerjasama. Kerjasama timbal balik sangat diperlukan. Dalam konteks program yang dilaksanakan YKKS, komunikasi mengalami kendala karena waktu yang tersedia melakukan pendataan dan sosialisasi terbatas, keinginan aparat kelurahan yang membagi rata bantuan, serta tanggapan masyarakat miskin yang apatis terhadap bantuan-bantuan semacam ini. Hal ini tidak lepas bahwa masyarakat miskin sudah terbiasa dan barangkali bosan dengan beragam jenis program penanggulangan kemiskinan. Sementara, aparat, pekerja sosial kurang mempunyai strategi yang bervariasi dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu aspek sikap. Sikap ini penting karena mendasari seseorang sebelum melakukan tindakan. Jika seseorang memperoleh informasi atau pengetahuan baru berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, reaksi yang muncul tentunya adalah tanggapan atau dorongan untuk melakukan sesuai dengan perintah atau informasi yang diterimanya. Namun karena kurang jelas dalam informasi, seringkali pengetahuan yang diterima tidak segera dipraktikkan. Kendala bisa dari dalam diri orang miskin sendiri yang enggan bertindak. Juga dari luar diri orang miskin sendiri seperti tanggapan anggota masyarakat lain. Rasa iri hati masyarakat lain yang tidak menerima bantuan juga menjadi penghambat dalam perubahan sikap. Keberhasilan atau kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh sikap penerima bantuan sendiri. Jika sikap mereka positif dan terdorong untuk bertindak sesuai dengan rencana maka diharapkan mereka mampu diajak bekerjasama.

Aspek ketiga adalah, sumber-sumber yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Disamping

sarana yang tersedia dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi di lapangan sesuai hasil riset PRA pada awal program dilaksanakan sebagian besar keluarga miskin dari 750 KK, 80% diantaranya tidak lulus SMP atau 600 KK, 75% bekerja serabutan 563 KK tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan kondisi pekerjaan semacam ini mereka hampir tidak waktu diajak memikirkan keluarganya karena suami isteri habis waktunya dalam pekerjaan. Jikapun tersedia waktu untuk konsultasi atau koordinasi dalam pertemuan RT/RW pada malam hari dengan kondisi yang sudah amat lelah. Sementara daya dukung sarana lain seperti pemasaran usaha bagi yang memperoleh pinjaman modal juga tidak mudah dilaksanakan. Produk hasil usaha orang miskin sering kurang bersaing dan kurang laku di pasaran.

Dari masalah yang ada teridentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, khususnya dana yang bersifat permodalan. Dari 500.234.250 dana yang digulirkan hanya 50% yang angsurannya lancar, selebihnya adalah kredit macet. Hal ini menyebabkan dana bergulir yang mestinya mampu dipergunakan oleh masyarakat lain terhambat. Mereka beranggapan bahwa bantuan tidak perlu dikembalikan.
2. Jika masyarakat diberi bantuan untuk berusaha sering terjadi bahwa tidak terbuka saluran-saluran pasar yang memberi kesempatan kepada orang miskin memasarkan produk-produknya. Hasil usaha orang miskin sering tidak bisa bersaing dan kurang dihargai masyarakat.
3. Masih lemahnya kemampuan organisasi sebagai pengelola pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari rendahnya kegiatan pembinaan, kurang keaktifan dan partisipasi. Satu pola pembinaan yang belum jelas dan tidak memiliki program yang jelas. Lemahnya organisasi tampak dari pendidikan pekerja sosial dan panitia program. Dari 20 pekerja sosial dan

panitia program hanya 3 orang atau 0,15 persen yang mengenyam pendidikan tinggi. Sisanya bervariasi antara lulusan SR, SD, SLTP dan SLTA. Mereka juga kurang strategi dalam mendorong masyarakat mengembangkan modal yang diberikan.

4. Koordinasi kurang berjalan dengan baik sehingga bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan maupun penggunaan dana tidak cepat bisa ditangani. Bahkan jika timbul penyelewengan belum mempunyai alur mekanisme yang pasti dalam penanganan. Masyarakat selalu berupaya mencari mudahnya sendiri jika timbul permasalahan di lapangan. Tindakan yang bersifat tegas dan sanksi dihindari. Mereka menyukai penyelesaian jika terjadi penyimpangan dengan cara-cara kekeluargaan. Selama YKKS mendampingi, 75% persen masalah diselesaikan dengan cara-cara seperti ini.
5. Belum optimalnya system informasi manajemen yang mendukung pengambilan keputusan. Program ini tidak didukung dengan sarana teknologi informasi yang memadai. Disamping keterbatasan tenaga operator di lapangan, juga relevansi bagi masyarakat belum dirasakan.

B. Perumusan Masalah

Mengingat beberapa faktor tersebut penulis mengambil komunikasi, sikap dan sumber-sumber masyarakat miskin dalam menerima program Penanggulangan Kemiskinan. Komunikasi, sikap dan sumber-sumber sangat penting karena dapat menghambat atau mendukung keberhasilannya. Perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh variabel komunikasi terhadap variabel implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo?

2. Apakah ada pengaruh variabel sikap terhadap variabel implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo?
3. Apakah ada pengaruh variabel sumber-sumber terhadap variabel implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo?
4. Apakah ada pengaruh variabel komunikasi, variabel sikap dan variabel sumber-sumber terhadap variabel implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi terhadap variabel implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel sikap terhadap variabel implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel sumber-sumber terhadap variabel implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi, variabel sikap dan variabel sumber-sumber terhadap variabel implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo.

D. Kegunaan Penelitian

Secara praktis :

1. Membantu masyarakat dan pemerintah, LSM, perguruan tinggi dalam upaya pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan.

2. Membantu masyarakat dan pemerintah, LSM, perguruan tinggi agar diketahui penyebab kegagalan program penanggulangan kemiskinan.
3. Memperoleh masukan mengenai metode pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan yang efektif dan efisien.

Secara teoritis :

Penelitian ini dapat dipakai untuk menambah wawasan dan pengetahuan oleh pihak-pihak yang ingin mempelajari masalah program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan konsep-konsep yang berhubungan kearah penelitian yang dapat diperoleh melalui literatur atau studi pustaka. Konsep-konsep inilah yang akan mendasari suatu penelitian. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo teori dapat diartikan sebagai : ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala atau diantara perubahan (*variable*) dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan sebagai rangka berpikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut. (Bintoro Tjokromidjojo, 1982 : 12)

Sedangkan menurut Prof Dr Mukayat D Brotowidjojo, teori mengarahkan perhatian, membantu menentukan maksud dan tujuan penelitian, cara penelitian, dan batasan data yang harus dikumpulkan. Teori merangkum pengetahuan, membentuk generalisasi dan prinsip-prinsip sehingga mudah dipahami. Teori membentuk sistem pemikiran dan penulisan ilmiah. (Mukayat D Brotowidjojo, 1991 : 6). Menurut Masri Singarimbun (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2001 : 37) teori adalah : serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk perumusan sementara suatu dalil, dimana ada hipotesa yang akan dibuktikan.
2. Untuk menerangkan hubungan mengenai fenomena sosial.

3. Untuk menerangkan atau menjelaskan mengenai hubungan kausal yang logis mengenai gejala sosial yang dapat dipakai sebagai kerangka pikir dalam memahami masalah-masalah yang timbul dalam penelitian.

Menurut G.R. Terry dikemukakan bahwa (Winardi, 1979 : 212) suatu program dapat diidentifikasi sebagai : suatu rencana komprehensi yang meliputi macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk pola yang terintegrasi dan yang menetapkan suatu urutan tindakan perlu dilaksanakan serta skedul-skedul.

Implementasi kebijakan publik (Grindle 1980 : 6) menyebutkan bahwa "*public policies broad statements of goals, objectives, and means are translated into action programs that aim to achieve the end stated in the policy*". Lebih lanjut Grindle (1980 : 7) menyatakan bahwa "*Implementation a... general process of administrative action that can be investigated at the specific program level*".

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan publik adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Hal ini menyangkut penciptaan pada system pelaksana kebijakan yang merupakan alat yang disusun untuk mencapai tujuan kebijakan atau program. Grindle (1980 : 9) keseluruhan proses penerapan kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran-sasaran semula bersifat umum telah dirinci, program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan program. Ketiga hal tersebut merupakan kondisi dasar bagi pelaksana kebijakan publik apapun.

Sedangkan Van Mater dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi sebagai "*those actions by public or private individuals for groups that are directed at achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun kejadian-kejadian untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat (dalam Solichin A Wahab, 2001 : 65).

Dari berbagai pengertian diatas maka implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan setelah sebuah kebijakan itu diputuskan yaitu langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk menunjukkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

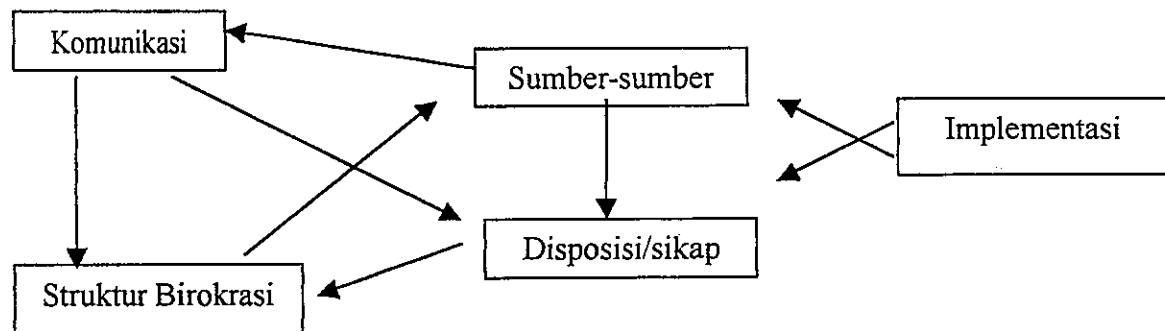
Suatu program yang berhasil jika mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan biaya rendah, sehingga tujuan fungsional proyek tercapai yaitu jika dapat menimbulkan motivasi bagi penduduk/institusi yang dijadikan sasaran, pegawai dan badan pelaksana program.

George C. Edwards III dalam buku *Implementing Public Policy* ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain :

1. Komunikasi
2. Sumber-sumber
3. Disposisi/sikap
4. Struktur birokrasi (George Edward III, 1980 : 148)

Keempat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan public ini semuanya merupakan variabel yang sangat berhubungan satu sama lain. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar A.1
Hubungan antar Variabel



Sumber : Buku George Edward III, 1980 ; 149

Gambar diatas menunjukkan pengaruh komunikasi yang dapat dirasakan oleh variabel-variabel lainnya melalui hubungan antara sumber-sumber dan struktur birokrasi, sumber-sumber juga secara tidak langsung implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut berinteraksi dalam komunikasi dalam beberapa cara, kurangnya informasi bagi karyawan atau pekerja sosial, sering menyebabkan kedwigtanian dalam perintah-perintah pelaksanaan kebijakan. Sumber-sumber dapat mempengaruhi peranan sikap dalam pelaksanaan kebijakan yang baik. Sikap para pelaksana mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan kebijakan komunikasi yang mereka terima, apa dan bagaimana mereka menguraikan dan mengirimkannya. Disposisi atau sikap juga mempengaruhi keinginan para pegawai kantor untuk melatih otoritas mereka pada kepentingan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang difragmentasikan oleh pemerintah sering mengalami kegagalan yang dimungkinkan karena miskomunikasi. Banyak orang harus menerima hasil pelaksanaan instruksi- instruksi

dan kesempatan-kesempatan besar dari penyimpangan pemerintah.

Dalam penelitian ini yang dipakai sebagai kerangka pemikiran utama ialah teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam buku *Implementing Public Policy* (1980 : 10) dengan uraian sebagai berikut :

1. Komunikasi

Kegiatan komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses mengubah/menterjemahkan kebijakan umum menjadi kebijakan khusus dan dapat dilaksanakan dengan tepat. Komunikasi yang samar-samar atau tidak konsisten akan menjadi suatu masalah dalam implementasi kebijakan publik. Dalam kelompok sasaran masyarakat Sendangguwo, pengertian komunikasi adalah saluran untuk menerima informasi yang berguna, hubungan dengan pemerintah, pengetahuan, wadah untuk mendorong dan mempertinggi motivasi serta merupakan alat, sarana yang memungkinkan kelompok mencapai tujuan yang baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi program Penanggulangan Kemiskinan adalah :

- a. Pemberi pesan atau berita (komunikan) adalah pemerintah yang menginformasikan program Penanggulangan Kemiskinan sebagai suatu cara menanggulangi masalah.
- b. Pesan atau berita adalah informasi-informasi tentang program Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Penerima pesan (komunikan) adalah kelompok masyarakat (pokmas).
- d. Saluran adalah media yang digunakan yaitu televisi, radio, surat kabar untuk menginformasikan pesan tersebut
- e. Hasil (efek) adalah program yang diterima dan dilakukan oleh kelompok masyarakat (pokmas).

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber yang dimaksud dalam implementasi kebijakan publik meliputi staf dengan keahliannya, informasi, fasilitas seperti gedung, peralatan, tanah, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, terdapat peran dari berbagai dinas dengan menurunkan para staf yang dianggap tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat membantu khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, staf yang dimaksud adalah untuk staf kantor, PMD, Kesehatan, Pendidikan.

3. Disposisi/sikap

Disposisi/sikap merupakan faktor kritis ketiga dari pendekatan studi implementasi kebijakan publik. Supaya implementasi berlangsung secara efektif, maka mereka yang melaksanakan program tersebut baik aktor pemerintah maupun masyarakat tidak hanya harus mengetahui apa yang melakukannya dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya tetapi juga harus mempunyai sikap atau keinginan yang ikhlas untuk melakukannya.

4. Struktur birokrasi

Dalam implementasi kebijakan publik birokrasi terutama di negara-negara berkembang memegang peran penting. Birokrasi selalu dihubungkan dengan personil sebagai kebijakan politik dan berperanan dengan pemerintahan yang besar atau kesejahteraan rakyat. Birokrasi merupakan fenomena yang dihubungkan dengan skala organisasi yang besar. Identitas birokrasi sebagai bentuk organisasi sosial yang mempunyai ciri struktur hirarkhi kekuasaan, spesialisasi dan pembagian kerja. Ciri perilaku birokrasi atau struktur merupakan hasil dari pola perilaku atau birokrasinya. Birokrasi mempunyai pencapaian tujuan.

Disposisi atau perilaku implementasi adalah faktor kritis ketiga dalam pendekatan kita pada studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi mengarah pada proses yang efektif, bukan hanya harus implementor ketahui tentang apa yang akan dilakukan dan kapasitas melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki hasrat untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Banyak implementor dapat sungguh-sungguh bijaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Salah satu dari berbagai alasan ini adalah independensi mereka dari nominal terunggul mereka yang memformulasikan kebijakan-kebijakan. Alasan lainnya adalah kompleksitas dari kebijakan mereka sendiri. Dalam arahan mana implementor melatih kebijakan mereka, bagaimanapun, terletak pada seberapa besar bagian disposisi mereka terhadap kebijakan-kebijakan perilaku mereka, termasuk didalamnya akan dipengaruhi dengan pandangan mereka terhadap kebijakan setiap orang dan dengan bagaimana mereka melihat keberpihakan-mengefektifkan organisasi mereka dan perhatian-perhatian setiap orang.

Implementor tidak selalu didisposisikan ke kebijakan-kebijakan implementasi sebagaimana hal tersebut dengan siapa keaslian membuat mereka akan menyukainya. Akibatnya, pengambilan keputusan selalu diperlihatkan pada pekerjaan mencoba memanipulasi atau bekerja sekitar disposisi implementor atau untuk mereduksi kebijakan mereka. (Tjahya Supriatna, 1997 : 100). Ciri birokrasi pemerintahan tingkat lokal dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ialah bersifat pemberdayaan, kreatif, inovatif, adaptif dan kondusif terhadap tumbuhnya aspirasi masyarakat miskin untuk mengartikulasikan kepentingan serta memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dan program lainnya.

Keempat variabel George C. Edwards III yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan betapa pentingnya komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik terutama dalam pelaksanaan program pembangunan. Dari keempat variabel di atas variabel komunikasi dan sikap merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sikap yang dimaksudkan disini adalah sikap masyarakat dalam menerima dan ikut melaksanakan atau berpartisipasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara pekerja sosial dengan masyarakat binaan. Sumber-sumber adalah pekerja dan fasilitas pendukungnya.

1. Variabel Implementasi (Y)

Setelah suatu kebijakan diformulasikan atau dirumuskan dalam bentuk program, tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan program tersebut. Dalam hal ini kamus Webster mengartikan *implementation* dari kata *to implement* yang artinya *to provide the means for carree out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Dalam hubungan dengan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan tidak terlepas dari implementasi kebijakan publik kepada masyarakat. Efektif atau tidaknya kebijakan sangat tergantung bagaimana implementasi di lapangan, yakni masyarakat yang menjadi sasaran program. Setelah suatu kebijakan (atau kebijakan pemerintah) diformulasikan, tahap selanjutnya adalah implementasi program tersebut. Dapat juga berarti "*give practical effect to*" (memberikan dampak akibat terhadap sesuatu). (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 64).

Proses implementasi ini sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat/kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan. Makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku/dirumuskan merupakan faktor implementasi kebijaksanaan. Syarat bagi implementasi yang efektif terletak pada spesifikasi tujuan yang mempunyai nilai, tujuan, peraturan perundangan yang tepat dan jelas sama penting dengan tujuan yang terdapat pada program (dalam Solichin A. Wahab, 1997 : 149). Pengertian implementasi yaitu kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata bagi masyarakat. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Solichin A. Wahab, 1997 : 150) implementasi berarti interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut. Dari serangkaian pengertian implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan sesudah kebijaksanaan diputuskan dengan sarana-sarana berusaha mengadminstrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat untuk mencapai tujuan. Salah satu sebab yang menimbulkan program tidak efektif dari kalangan pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah yang disebut *implementation gap*. Dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan dimana suatu proses kebijakan akan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang senyatanya. Oleh karena itu dapat diklasifikasikan kegagalan kebijakan yaitu :

1. Tidak terimplementasi

Kondisi seperti ini dapat terjadi karena pihak yang terlibat tidak bekerjasama, tidak efisien dan bekerja setengah-setengah. Dapat juga pihak-pihak tidak sepenuhnya menguasai permasalahan karena di luar jangkauan kekuasaan.

2. Tidak berhasil

Kondisi ini karena kebijaksanaan sudah dilaksanakan sesuai rencana, mengingat kondisi eksternal tidak menguntungkan kebijaksanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada hasil akhir yang dikehendaki.

Implementasi pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras mempengaruhi perilaku birokrat, pejabat lapangan dalam rangka memberi pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu orang atau lebih kelompok sasaran. Karenanya, implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang :

1. Pemrakarsa kebijakan

Perhatian utamanya meliputi masalah sejauh mana tujuan/sasaran resmi kebijaksanaan telah tercapai dan apakah alasan menyebabkan tujuan atau sasaran tercapai.

2. Pejabat di lapangan

Fokus utamanya pada tindakan/perilaku para pejabat/instansi di lapangan dan upaya untuk menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan.

3. Aktor-aktor perorangan di luar badan pemerintahan

Kepada siapa program itu ditujukan yaitu kelompok sasaran. Fokus utama adalah pelayanan, jasa yang telah diberikan pemerintah tersebut benar-benar telah mengubah pola hidupnya. Benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan, pemahaman mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran.

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik terutama dalam penanggulangan kemiskinan tampak dalam beberapa gejala berikut :

2.1. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat sejauh mana masyarakat yang dibantu mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan program yang diberikan. Karena itu, masyarakat mesti dilibatkan dalam proses program dilaksanakan. Tahap sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, perencanaan, transparansi anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan komponen-komponen yang ada dalam masyarakat. Jika masyarakat diajak partisipasi di dalamnya, maka keterlibatan akan dibangun.

2.2. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan program sangat berpengaruh dan berdampak keberhasilan program tersebut di masa yang akan datang. Urutan atau tahapan yang harus dilalui masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan sangat bergantung bagaimana masyarakat penerima bantuan mampu diajak kerjasama. Dengan kerjasama yang baik, patuh dalam menjalankan semua instruksi yang diberikan serta kemauan untuk aktif berpartisipasi sangat menunjang keberhasilan kebijakan dimaksud. Oleh karena itu, segala upaya yang berguna untuk itu mesti dimaksimalkan.

2. Variabel Komunikasi (X1)

Menurut George C Edwards (1980 : 10) agar implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif para pembuat kebijakan harus tahu bagaimana merumuskan sebuah kebijakan yang mudah dipahami. Implementasi kebijakan publik harus ditransfer kepada banyak personel dan mereka harus menerima informasi dengan jelas, akurat dan berkelanjutan.

Jika para pihak tidak menerima informasi dengan akurat mereka akan mengalami miskomunikasi dan akibatnya kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Agar implementasi menjadi efektif, tentang siapa yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan keputusan, mereka harus tahu apa yang mereka akan lakukan. Keinginan bahwa kebijakan-kebijakan implementasi harus diarahkan ke orang yang tepat dan mereka harus bersih, akurat dan konsisten. Jika pembuat keputusan kebijakan melihat implementasi tersebut tidak benar-benar spesifik, mereka mungkin tidak mengerti pada siapa mereka dipimpin.

Pada kenyataannya, kebingungan dari implementor mengenai apa yang perlu ditambahkan pada perubahan yang membuat kebijakan tidak terlaksana, seperti siapa yang terlewat atau diminta secara khusus. Komunikasi-komunikasi yang tidak cukup selalu menemukan implementor dengan penurunan sebagai usaha mereka untuk mengembalikan keputusan-keputusan umum ke dalam aksi yang spesifik. Penurunan tersebut tidak tepat untuk diterapkan ke arah lebih lanjut yaitu tujuan dari pembuat keputusan yang asli. Jadi, instruksi implementasi yang tidak disalurkan terserap dalam transmisi atau hal itu tidak jelas atau ketidakkonsistenan pelaku terhadap rintangan-rintangan serius yang mengarah pada implementasi kebijakan. Sebaliknya, kelangsungan tersebut justru mungkin mengganggu implementasi dengan adaptasi dan kreativitas yang mencekik.

Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan perilaku organisasional, melainkan meliputi seluruh segi kehidupan manusia. Sebagian besar waktu dalam kehidupan seseorang dipakai untuk komunikasi, sehingga apa yang menjadi sumber permasalahan di muka bumi ini adalah tidak terjadinya komunikasi yang efektif. Begitu pentingnya komunikasi yang efektif sama pentingnya dengan dua segi lain dalam kehidupan organisasional yaitu tujuan bersama untuk mencapainya dan keikhlasan anggota organisasi memberikan waktu, tenaga, pikiran, keahlian,

dan keterampilannya demi tujuan yang telah ditetapkan. (Udai Pareek, 1991 : 60).

Komunikasi adalah proses penyampaian keterangan dan pengertian dari seseorang kepada yang lain. (Keith Davis, 1962 : 344). Dalam ensiklopedi administrasi tertulis bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian berita atau ide dari sumber berita ke tempat tujuan. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan atau message (dalam bentuk lambang-lambang yang mempunyai arti) dari seseorang kepada yang lain dengan tujuan agar komunikasi itu berjalan dengan lancar, efektif dan serasi. (Zuhri, 1987 : 175). Komunikasi adalah suatu tingkah laku, perbuatan atau kegiatan menyampaikan atau pengoperan lambang-lambang yang mengandung makna. Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian ide, keterangan dan pengertian dapat berupa tingkah laku atau perbuatan atau kegiatan lain, serta cara-cara dan teknik penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Dalam melaksanakan pembangunan pelaksana dituntut menerapkan komunikasi yang efektif terhadap kelompok sasaran agar tercapai kesamaan persepsi dan pandangan juga istilah yang berlaku pada tujuan dan hakekat program yang dilaksanakan. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan :

1. Semua orang dalam organisasi harus mengetahui semua saluran komunikasi yang ada dalam organisasi.
2. Semua orang harus mengetahui saluran komunikasi yang ada serta tata cara penggunaannya yang biasanya berkaitan dengan nilai organisasi bersangkutan.
3. Garis komunikasi seyogyanya langsung dan sesingkat mungkin, guna mencegah distorsi dalam proses komunikasi.
4. Harus tersedia semua jalur komunikasi formal dengan mengindahkan hierarkhi yang ada dalam organisasi.

5. Garis komunikasi diusahakan agar tidak terganggu, meski kegiatan yang berlangsung dalam organisasi bersangkutan.
6. Keaslian komunikasi hendaknya terjaga.
7. Orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi hendaknya orang yang memang terlatih dan terampil melakukan komunikasi. (Udai Pareek, 1991 : 69-70).

Dalam pembangunan masyarakat, komunikasi diperlukan agar perilaku masyarakat dapat diubah sesuai kemampuannya guna berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu caranya adalah mengadakan komunikasi yang efektif. Rogers (1955 : 102) mendefinisikan komunikasi hampir sama dengan tujuan untuk merubah perilaku penerima. Komunikasi sebagai proses yang didalamnya suatu gagasan dipindahkan dari sumber ke penerima dengan tujuan merubah perilakunya. (Rogers, 1955 : 115). Komunikasi dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi sosial/antar manusia yang di dalamnya terdapat 5 unsur :

1. Seorang komunikator
2. Menyampaikan
3. Warta
4. Penerima warta
5. Tanggapannya (jawaban, reaksi)

Karena itu, komunikasi sebagai : suatu proses yang didalamnya suatu gagasan dipindahkan dari sumber kepada penerima dengan maksud merubah perilaku penerima.

Begitu pentingnya pelaksanaan komunikasi, selain dapat merubah perilaku penerima juga dapat membantu terlaksananya pekerjaan, kerjasama antar pihak satu dengan yang lain, usaha agar kebijaksanaan diterima, ide, instruksi agar jelas dipahami dan mengusahakan agar perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan pekerjaan tercapai. Komunikasi yang efektif

merupakan hasil dari pemahaman bersama antara komunikator dan penerima. Syarat dalam komunikasi efektif (Widjaja, 1987 : 46-47) meliputi :

1. Usahakan memperoleh keterangan lengkap.
2. Usahakan terdapat kepercayaan kepada kedua belah pihak.
3. Usahakan mencapai dasar pengalaman yang sama.
4. Gunakan kata-kata yang dikenal masing-masing pihak.
5. Perhatikan hubungan-hubungan.
6. Gunakan contoh-contoh dan alat-alat visual.
7. Mempraktekkan penanguhan reaksi.
8. Usahakan agar memperhatikan pihak yang menerima instruksi tetap ada.

Selain faktor tersebut pihak komunikator dan komunikan perlu mengetahui unsur-unsur pendukung komunikasi sehingga tujuan komunikator tercapai. Beberapa ahli mengemukakan persamaan unsur komunikasi yaitu, *source* (sumber), *message* (pesan), *channel* (saluran), *reciver* (penerima), *effect* (hasil), dan *feed back* (umpan balik). Hal tersebut dikemukakan oleh A.W. Widjaja (1987 : 201). Unsur- unsur komunikasi dalam pembangunan sebagai berikut:

1. *Source*/ sumber

Yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam dasar rangka memperkuat pesan itu, dapat berupa orang, lembaga ataupun buku.

2. Komunikator

Yang memberi *communicate*/pesan dapat berupa pemerintah, para ahli, kader pembangunan, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Seorang komunikator harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat tentang penampilan, penguasaan masalah dan penguasaan bahasa.

3. *Communicate/message/pesan*

Keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator yang mempunyai inti usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan, melalui dua jalan:

- a. *Lisan/face to face/ langsung/tatap muka/ temu wicara*
- b. *Menggunakan media/channel/tidak langsung*

Bentuk pesan dapat berupa:

- a. *Informatif* : memberikan keterangan, fakta dan data komunikan mengambil keputusan sendiri.
- b. *Persuasif* : bujukan yaitu membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia agar dengan sadar melakukan perubahan.
- c. *Coersif* : memaksa dengan sanksi-sanksi.

Syarat-syarat pesan agar tepat sasaran :

1. Hal-hal bersifat umum
2. Jelas
3. Bahasa jelas hindari istilah yang tidak dipahami audience; sesuai kondisi daerah
4. Bersifat positif agar mendapat simpati
5. Bersifat seimbang dan wajar
6. Sesuai dengan keinginan komunikasi.

4 *Channel/ saluran/media*

- a. *Media umum*
- b. *Media massa*

5. *Komunikan*

Penerima informasi dapat sasaran tunggal (orang per orang), kelompok atau massa.

6. *Effect*

Hasil akhir suatu komunikasi yang sikap dan tingkah laku orang sesuai tidak dengan pesan yang dapat dilihat dari :

- a. *Personal opinion* (pendapat dan sikap pribadi)
- b. *Public opinion*
- c. *Majority opinion*

Dalam menyampaikan program Penanggulangan Kemiskinan yang diperlukan komunikasi yang efektif dalam pencapaian tujuannya. Variabel komunikasi dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

1. *Sumber/source*

kejelasan program Penanggulangan Kemiskinan tentang anjuran/ajakan/ bujukan kader terhadap masyarakat.

2. *Komunikator*

- a. Kepercayaan penerima program Penanggulangan Kemiskinan terhadap pekerja sosial.
- b. Penyesuaian diri komunikator terhadap lingkungan sekitarnya.
- c. Penguasaan masalah-masalah tentang program Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Kejelasan penyampaian masalah menggunakan bahasa setempat.

3. *Pesan/message*

Kejelasan penerima terhadap pesan yang disampaikan

- a. Bentuk-bentuk penyampaian pesan
- b. Jalan yang ditempuh dalam menyampaikan program Penanggulangan Kemiskinan

4. *Saluran*

Kepemilikan media yang digunakan dalam menyampaikan program kepada masyarakat.

5. Efek/effect

- a. Pendapat penerima program tentang program Penanggulangan Kemiskinan
- b. Sikap penerima tentang program Penanggulangan Kemiskinan
- c. Pemanfaatan program program Penanggulangan Kemiskinan

6. Komunikan

Pemahaman penerima program program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan komunikasi formal, dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi lisan dan tulisan dengan mempergunakan lambang-lambang bahasa sebagai sarana dalam berhubungan dengan orang lain. Sedangkan komunikasi informal ialah komunikasi dengan mempergunakan alat bantu misalnya mimik wajah, gerakan tangan, kerdipan mata (Onong Uchjana Effendy, 1984 : 14). Dalam penelitian ini dipergunakan komunikasi formal dan informal untuk memperjelas penyampaian program kepada masyarakat. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat penerima program, komunikasi dilaksanakan dengan bahasa lisan dan bantuan alat-alat peraga yang diperlukan. Kedua jenis informasi ini sangat menunjang dalam memperjelas isi dan manfaat program.

Kebutuhan pertama untuk efektifitas implementasi kebijakan adalah siapapun dia yang mengimpelmetnasikan suatu keputusan, harus tahu apa yang mereka ingin lakukan. Keputusan kebijakan dan permintaan implementasi harus disalurkan ke orang yang tepat sebelum mereka mengikutinya. Umumnya komunitas ini butuh ketepatan dan mereka harus dirasa tepat oleh implementor. Banyak penghalang berbohong dalam jarak saluran dari komunikasi implementasi bagaimanapun dan rintangan tersebut mungkin menghalangi implementasi kebijakan seperti yang dapat kita lihat dibawah ini.

Jika kebijakan akan diimplementasikan dengan tepat, perintah implementasi tidak hanya diterima, tetapi harus jelas juga. Jika tidak, pelaku implementasi akan kebingungan tentang apa yang harus implementasikan dari kebijakan-kebijakan sudut pandang yang mungkin berbeda dari atasan mereka.

Aspek lain dari komunikasi dari perintah implementasi adalah kekonsistennannya. Bingung atas perutusan yang kontradiktif dan staf administrasi yang frustrasi dan kemampuannya yang dipaksakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Berikut ini, kita mendiskusikan kondisi terbawah dari komunikasi yang tidak konstan seperti bangunan dan efek dari beberapa komunikasi pada implementasi kebijakan.

2.1. Transmisi

Sebelum orang mengimplementasikan sebuah keputusan, mereka harus berhati-hati bahwa keputusan yang telah dibuat dan dipesan untuk diimplementasikan memiliki persoalan. Hal ini tidak selalu sama dalam proses penerapannya. Penyebabnya adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas terjadinya beberapa keputusan. Salah satu rintangan dalam mentransmisikan instruksi implementasi adalah perbedaan pendapat antara implementor dengan pemimpinnya.

Ketidaksetujuan dapat mengarahkan ke distorsi komunikasi. Penyebab distorsi adalah terlewatnya informasi karena melalui lapisan-lapisan ganda dari hirarki birokratis. Pada akhirnya, penerima komunikasi mungkin terhalangi oleh persepsi selektif implementor. Kadangkala implementor mengabaikan kenyataan dan mencoba menebak arti "sebenarnya" dari komunikasi itu sendiri.

2.2. Kejelasan

Jika sebuah kebijakan akan diimplementasikan, siapa pun pembuatnya, perintah implementasi tidak hanya diterima saja melainkan juga harus jelas. Kadangkala, instruksi yang disalurkan ke implementor tidak jelas dan tidak spesifik dimana atau bagaimana suatu program akan dikeluarkan. Jarak dari kejelasan implementor penyedia dengan peluang memberi arti baru pada kebijakan oleh si penerima, kadang menyebabkan kontra dalam pengertian aslinya (pengertian hukumnya).

Ada beberapa alasan mengenai mengenai terjadinya jarak kejelasan dalam kepemimpinan implementasi. Sejumlah faktor adalah kompleksitas dari kebijakan publik, harapan yang tidak mengganggu bagian-bagian dari publik, jarak antara consensus tujuan dari sebuah kebijakan, masalah yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan baru, akuntabilitas kebijakan, dan pengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum.

2.3. Konsistensi

Penyaluran implementasi harus benar-benar konsisten jika implementasi kebijakan ingin efektif. Kejelasan saluran tetapi instruksi yang bertentangan akan menyulitkan bagi pelaksana, sehingga implementasi tidak terpakai. Namun, kadangkala implementor juga terbebani dengan perintah yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan dalam penyaluran implementasi memungkinkan tersedianya bagian khusus operasional dengan kebijakan substansial dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan, dimana kebijakan tersebut tidak menyimpang dari tujuan kebijakan (*policy*).

2.4. Umpan Balik

Secara umum apa yang kita peroleh dalam hubungan antara komunikasi dan implementasi? Banyak keputusan kebijakan yang akurat dan permintaan implementasi yang disalurkan, makin tinggi probabilitas implementasinya. Perputaran saluran merupakan penyebab utama dari kegagalan implementasi. Bagaimana kita dapat menjelaskan halangan komunikasi dan penyerapannya? Jika hal tersebut dimasukkan dalam tingkat yang bermacam-macam dari persetujuan proses implementasi dengan sebuah kebijakan, mereka lebih seperti ke transmit komunikasi mengenai ketepatannya. Pembuat kebijakan tingkat tinggi harus mempercayakan sepenuhnya pada yang lain untuk menyalurkan dan mengeluarkan keputusan dan pesan mereka. Jika sebuah kebijakan dirasa aneh, jika pelaksanaan implementasi mungkin menggabaikan atau menghilangkan kebijakan tersebut.

Instruksi implementasi akan tersalurkan dengan tepat apabila hubungan yang kecil dan kelompok kohesi dari orang-orang dimungkinkan untuk implementasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan pada bagian yang terlalu luas rentan dengan masalah seperti : banyak orang yang harus diajak berkomunikasi, terjadi perubahan besar dengan mengurangi pelaksana ; dan banyaknya lapisan birokrasi dimana komunikasi harus dikirim, tingginya kemungkinan penyimpangan.

3. Variabel Sikap (X2)

Menurut George C Edward III menyatakan (1980 : 89) disposisi atau perilaku implementasi adalah factor kritis ketiga dalam pendekatan kita pada studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi mengarah pada proses yang efektif, implementor tidak hanya tahu tentang apa yang akan dilakukan dan kemampuan untuk melakukannya, tetapi

mereka juga harus memiliki keinginan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Banyak implementor yang sungguh bijaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

Salah satu dari berbagai alasan ini adalah independensi mereka dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan. Alasan lainnya adalah kompleksitas dari sikap mereka sendiri. Bagaimanapun implementor melatih kebijakan mereka, semua terletak pada sikap mereka terhadap kebijakan-kebijakan perilaku mereka, termasuk didalamnya tentang pandangan mereka terhadap setiap kebijakan dan bagaimana mereka melihat kebijakan tersebut mampu mengefektifkan organisasi dan memfokuskan perhatian setiap orang.

Dalam usaha merubah perilaku masyarakat, sebagai langkah awal yang perlu mendapat perhatian adalah mengetahui sikap masyarakat tersebut terhadap kebijakan atau program yang akan disampaikan oleh pemerintah. Karena berdasarkan penelitian para ahli diantaranya, sikap dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku seseorang. Sikap dalam istilah lain attitude merupakan : pandangan perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Sikap itu berhubungan dengan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. (Gerungan, 1998 : 149)

Dalam gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan/obyek tercermin sikap orang itu.(Yusuf Suit, 1990 : 19).

Sikap atau attitude sebagai : suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang timbul dari seseorang atau dan suatu situasi. (Indrawajaya, 1987 : 40)

Dalam kehidupan sehari-hari sikap ini disertai dengan opini. Dari opini tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan pandangan, perasaan, tanggapan, pikiran terhadap suatu obyek/situasi tertentu yang disertai dengan kecenderungan cara bereaksi baik melalui gerakan fisik atau pendapat. Ciri khas sikap seseorang :

1. Sikap tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungannya dengan obyek.
2. Sikap dapat berubah-ubah/dapat dipelajari karena jika terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu dapat mempermudah berubahnya sikap pada seseorang.
3. Tidak berdiri sendiri tetapi mengandung relasi tertentu terhadap suatu obyek.
4. Obyek tertentu dapat berupa hal tertentu/satu obyek tetapi dapat pula merupakan kumpulan dari hal/sederetan obyek tertentu. Mempunyai segi-segi motivasi dan perasaan sehingga dapat dibedakan kecakapan yang dimiliki seseorang. (Gerungan, 1998 : 151).

Sikap seseorang merupakan perpaduan antara masa lampau dengan keadaan lingkungan masa kini. Sehingga dapat dikatakan pengamatan masa lampau selalu mempunyai pengaruh terhadap sikap seseorang. Perhatian utama ada tiga komponen yaitu kognisi, afeksi dan perilaku. Dalam afeksi, seseorang mencari alasan mengapa seseorang itu menganggap sesuatu itu baik, buruk, senang atau tidak senang. Aspek kognisi merupakan proses pengamatan terhadap sesuatu sehingga kita dapat mengenalnya. Sehingga pembentukan sikap berlangsung dalam interaksi sosial dalam kelompok/intern melalui selektivitasnya sendiri, daya pilihnya dan minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh yang datang dari luar dirinya. Sedangkan interaksi sosial luar dapat berupa buah kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui alat komunikasi seperti surat kabar, radio, tv, buku, dan lain-lain.

Salah satu kelemahan atau sikap yang kurang baik yang dimiliki oleh sumber daya manusia Indonesia adalah kurang tegas dalam sikap, sulit membedakan antara yang setuju dengan yang tidak setuju dan antara yang mengerti dengan yang tidak mengerti. Dalam satu sisi sikap dapat mengalami perubahan atau dapat pula dibentuk melalui interaksi kelompok

dimana terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia dan terjadinya komunikasi, dimana terdapat pengaruh/hubungan langsung dari satu pihak saja.

Faktor lain yang dapat mengubah sikap seseorang adalah sifat dan isi dari informasi, siapa yang mengemukakannya, siapa yang menyokongnya, apakah informasi itu berupa pandangan baru, bagaimana cara pandangan baru itu dikemukakan dan dalam situasi bagaimana sikap dibicarakan.

Sedang bentuk perubahan sikap dapat sebangun atau *congruent change* dimana seseorang dahulu bersikap setuju menjadi sangat setuju atau sebaliknya, dan secara tidak sebangun (*incongruent change*), dahulu seseorang bersikap sangat setuju menjadi sangat tidak setuju. Membahas sikap seseorang tidak lepas dari kepribadian orang tersebut, sehingga sikap mental seseorang dapat dibagi:

- a. Sikap terkendali terpuji, dimana seseorang cepat tanggap dan bersungguh-sungguh bertingkah laku menyenangkan orang lain, berbuat sesuai hasil pemikirannya secara murni dan apa yang diketahui dengan pertimbangan pertimbangan obyektif perbuatan itu mengikuti hati nurani.
- b. Sikap terkendali tidak terpuji, perbuatan seseorang tidak sesuai dengan pengetahuan dan keyakinannya/mengingkari hati nuraninya.
- c. Sikap terkendali sebagian : jika seseorang tidak dapat mengendalikannya dalam hal-hal tertentu.
- d. Sikap tidak terkendali seluruhnya : jika seseorang sama sekali tidak dapat mengendalikan dirinya dalam segala hal.

Faktor ketiga dengan konsekuensi penting bagi implementasi : wewenang implementor. Jika implementor dengan aturan yang baik mengarah ke suatu kebijakan

particular, mereka lebih seperti membawa itu keluar seperti pengambil keputusan asli yang dimaksud. Tetapi, ketika perilaku implementor atau perbedaan sudut pandang dari pengambil keputusan, proses implementasi suatu kebijakan itu menjadi makin kompleks. Oleh karena itu, siapapun penerap kebijakan ada di banyak jalan independen dari superior nominal mereka yang terlibat memimpin dalam keputusan kebijakan yang asli. Sebagai hasil dari dana yang bermacam-macam dan program kerjasama revenue dan alami sistem hukum kita, banyak kebijakan daerah dan nasional adalah diimplementasikan secara terbatas oleh pekerja atau hakim dari hukum yang lain. Karena implementor secara umum memiliki ketentuan, perilaku mereka terhadap kebijakan mungkin merintang efektivitas implementasi kebijakan.

Efek dari disposisi

Banyak kebijakan jatuh dalam sebuah “zona pembeda”. Kebijakan ini mungkin saja dipercayakan untuk diimplementasikan karena implementor ditantang memiliki kepekaan kuat mengenainya. Kebijakan yang lain, bagaimanapun akan dalam konflik langsung dengan sudut pandang kebijakan atau pelaku atau ketertarikan organisasi pada implementor. Ketika orang-orang mempertanyakan permintaan akhir yang mereka tidak setuju, terjadi penyimpangan yang tak terelakkan antara keputusan kebijakan dan bnetuk. Di beberapa kasus implementor akan melatih rintangan mereka, kadangkala dalam cara tertentu untuk menghalangi implementasi.

Dari uraian diatas sikap masyarakat terhadap suatu program dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Aspek intelektual

- a. Tingkat persepsi masyarakat terhadap program Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Tingkat pengenalan masyarakat terhadap program Penanggulangan Kemiskinan.
 - c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap program Penanggulangan Kemiskinan.
 - d. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap program Penanggulangan Kemiskinan.
2. Aspek interaksi
- a. Tingkat tanggapan masyarakat terhadap program Penanggulangan Kemiskinan.
 - b. Tingkat kemanfaatan masyarakat penerima program Penanggulangan Kemiskinan.
3. Aspek administrasi
- a. Tingkat kecenderungan bertindak setelah memperoleh informasi informasi program Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Tingkat interaksi masyarakat penerima program Penanggulangan Kemiskinan dengan bukan penerima.
 - c. Tingkat keeratan interaksi antar masyarakat penerima program Penanggulangan Kemiskinan.
4. Perubahan perilaku
- a. Tingkat kemampuan penerima dalam menjelaskan program Penanggulangan Kemiskinan.

4. Variabel Sumber – Sumber (X3)

George C Edward (1980 : 53) sumber-sumber yang dimaksud disini adalah staf ahli, informasi dan fasilitas seperti gedung, peralatan, tanah dan sebagainya. Ada pengakuan yang besar bahwa keberhasilan organisasi diperoleh melalui keterampilan karyawan yang selalu berkembang, kultur yang positif dan sistem organisasi yang jelas. Tidak menjadi masalah bagaimana bersih dan konsistennya pemesanan implementasi tersebut dan tidak masalah bagaimana mereka tepat disalurkan, jika pelaku menanggapinya dengan mengeluarkan

keputusan yang kurang tepat, dan sumber-sumber harus melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif.

Sumber-sumber penting, termasuk staf, dari pola yang tepat dan dengan keahlian khusus, informasi yang relevan dan adaptif tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam suatu pemenuhan dari yang lain dipengaruhi dalam implementasi. Otoritas yang menjamin bahwa keputusa-keputusan dikeluarkan sebagaimana yang mereka maksud dan fasilitas-fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan perlengkapan) yang mana atau dengan mana ke pelayanan penyedia. Sumber-sumber yang tak cukup mengartikan bahwa hukum-hukum tidak menekan pelayanan sehingga tidak akan cukup tersedia dan regulasi-regulasi yang layak tidak dapat berkembang.

Karyawan menjadi mitra strategis bagi keberhasilan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Sebab itu, saat ini berkembang sebuah wacana mengenai pencapaian manajemen sumber daya manusia yang strategic. Definisi dari MSDM strategis adalah : pola dari penyebaran sumber daya manusia terencana dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya (Gary Dessler, 1997).

Menurut Gary Dessler (1998 : 19), sumber daya manusia dikatakan penting dalam proses keberhasilan dari sebuah organisasi, karena :

- a. SDM mendorong produktivitas
- b. Organisasi menjadi cepat tanggap dalam melihat perubahan lingkungan
- c. Adanya komitmen bersama antara SDM dengan organisasi yang memungkinkan organisasi makin cepat mencapai tujuan
- d. Pembauran SDM dengan strategi organisasi mempercepat efektivitas dan efisiensi organisasi.

Selain karyawan sebagai salah satu sumber, hal lain yang mempengaruhi adalah informasi, yang merupakan segala sesuatu yang dikomunikasikan di antara orang-orang. Melakukan komunikasi pada pokoknya berarti memberitahukan pengertian kepada pihak lain. Jadi, pada hakekatnya informasi adalah bahan bagi komunikasi. Perkataan "information" sendiri mempunyai akar kata *inform* yang berarti menyampaikan pengetahuan. Sedangkan kata asalnya dari bahasa Latin "*informare*" berarti mengusahakan agar berbentuk. Pengiriman implementasi memungkinkan disalurkan secara akurat, jelas dan konsisten, tetapi jika beberapa implementor membocorkan sumber-sumber penting untuk mengeluarkan kebijakan, sumber-sumber dapat menjadi factor kritis dalam implementasi kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting termasuk staff dari ukuran yang cukup dan dengan kemampuan yang tepat untuk mengeluarkan (memecahkan) tugas-tugas dan informasi, kekuasaan, dan kebutuhan penting untuk mengartikan proposal diatas kertas ke memfungsikan pelayanan publik.

Mungkin, sumber-sumber yang paling esensial dalam penerapan kebijakan adalah staff. Akan mengejutkan bahwa sebuah sumber utama dari kegagalan penerapan adalah ketidakcukupan staff. Meskipun pegawai negeri berjumlah jutaan, implementasi kebijakan tetap membutuhkan beberapa orang yang kemampuannya tepat untuk melakukan suatu pekerjaan efektif melaksanakan banyak kebijakan. Kita harus mengevaluasi birokrasi, tidak hanya pada dataran umum, tetapi juga di beberapa bagian keahlian untuk menunjukkan kemampuan menyelesaikan tugas.

4.1. Informasi

Informasi memiliki dua bentuk. *Pertama* adalah berkenaan dengan informasi itu sendiri, bagaimana mengeluarkan sebuah kebijakan. Implementor butuh pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka memberi perintah untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk yang *kedua* dari informasi yang esensial adalah data keluhan yang lain dengan kebijakan pemerintah dan regulasinya. Implementor harus tahu sisi lain dari orang-orang yang terlibat dalam keputusan implementasi kebijakan adalah keluhan mengenai aturan /hukum yang berlaku.

4.2. Fasilitas

Fasilitas fisik dapat menjadi sumber-sumber kritis dalam implementasi. Seorang implementor harus memiliki cukup staf, dimungkinkan untuk dapat memahami apa yang dia inginkan untuk dilaksanakan, mungkin memiliki otoritas untuk mempelajari tugasnya, tetapi tanpa bangunan yang dibutuhkan, peralatan, perlengkapan, dan implementasi ruang gerak tidak akan sukses. Sumber-sumber adalah hal penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpanya, kebijakan yang sudah diatas kertas tidak akan sama dengan yang diterapkan. Kemungkinan pertama dari penemuan yang mengejutkan ini adalah bahwa staff selalu menjadi kecil dalam implementasi yang efektif atas kebijakan yang telah ditugaskan untuk direspon. Fasilitas merupakan penunjang kelancaran sebuah organisasi. Setiap organisasi selalu memiliki lingkungan fisik, seperti tanah gedung, peralatan kantor, perlengkapan kantor yang memungkinkan organisasi mampu menyelesaikan tugasnya.

5. Pengaruh Komunikasi (X1) terhadap Implementasi (Y) program Penanggulangan Kemiskinan

Mengatasi masalah-masalah sosial diperlukan penanganan serius dari semua pihak. Banyak program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan secara tumpang tindih (*overlapping*), sehingga masyarakat sering rancu memahami begitu banyaknya program yang dijalankan. Untuk memberikan informasi yang tepat mengenai program yang sedang berjalan /diimplementasikan diperlukan komunikasi yang tepat. Dengan komunikasi yang efektif, kemungkinan salah sasaran dapat diperbaiki. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program yang sedang berlangsung dapat juga karena kurangnya sosialisasi pelaksana program. Suatu keberhasilan program bukan terletak pada cepatnya suatu proses pelaksanaan akan tetapi tepatnya model, strategi, identifikasi masalah dan cara pelaksanaan. Sehingga dalam melaksanakan program terjadi hubungan timbal balik antara pelaksana dan pihak penerima yang kesemua itu hanya dapat diketahui melalui komunikasi bukan membaca pikiran dan perasaan masing-masing orang. Apabila program Penanggulangan Kemiskinan mengandung hal-hal yang bersifat baru, maka sebaiknya pelaksana mengambil keputusan terbaik untuk penerapan oleh karena itu diperlukan komunikasi yang mampu menerapkan hal-hal yang baru tersebut. Sumber penerangan harus terpercaya, dilakukan komunikasi dua pihak, disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat jika memungkinkan. Demikian pentingnya peran komunikasi dalam keberhasilan program sehingga menghindarkan dan salah sasaran.

6. Pengaruh Sikap (X2) terhadap Implementasi (Y) program Penanggulangan Kemiskinan

Merubah perilaku seseorang lebih-lebih suatu masyarakat kompleks diperlukan suatu strategi tepat yang dapat diterima masyarakat. Pertama yang harus dilakukan adalah mengubah sikap dan pandangan masyarakat tersebut tentang suatu nilai atau perilaku yang selama ini berlaku di lingkungan masyarakatnya. Jika masyarakat sudah bersikap negatif terhadap suatu kebijakan pemerintah, sudah pasti kebijakan tersebut hanya akan tinggal lembaran kertas keputusan tak berguna. Sebaliknya jika masyarakat menyambut baik suatu program pemerintah, mereka akan berusaha mengenal, memahami lebih jauh dan menerima bahkan menerapkan dalam kehidupan mereka. Memahami sikap masyarakat bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sehingga masyarakat dapat terlibat dan tidak terlalu asing bagi kelangsungan hidup mereka yang berakibat mengganggu atau merusaknya. Keberhasilan merubah sikap masyarakat itu berada amat diperlukan. Hal-hal yang bersifat baru sama sekali dapat menimbulkan bumerang-effect (pembentukan jauh dari harapan). Program yang berhasil manakala mampu membangkitkan motivasi masyarakat dengan ikut berpartisipasi aktif di dalamnya minimal menerimanya. Karena perubahan sikap dapat menjadikan seseorang penurut atau pembangkang. Akan tetapi harus diakui bahwa perubahan sikap harus didasari dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab menuju hal-hal yang lebih baik. Tak dapat dipungkiri bahwa peranan sikap masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sangat besar.

7. Pengaruh Sumber-sumber (X3) terhadap Implementasi (Y) Program Penanggulangan Kemiskinan

Sumber-sumber juga berperan penting bagi keberhasilan program Penanggulangan Kemiskinan. Pekerja sosial yang telah ahli dalam melakukan pendampingan masyarakat miskin mampu melakukan pendekatan untuk melakukan perubahan-perubahan perilaku tanpa muncul kesalahan persepsi. Dengan dukungan peralatan yang lengkap seperti kendaraan, tempat bekerja yang memadai dan informasi yang selalu jelas dan berkesinambungan membuat proses pendampingan mereka pada masyarakat menjadi lebih terarah.

8. Pengaruh Komunikasi (X1), Sikap (X2) dan Sumber-sumber (X3) terhadap Implementasi (Y) program Penanggulangan Kemiskinan

Mengatasi masalah sosial dibutuhkan kajian multi aspek dan menuntut keterlibatan banyak pihak. Dalam menyelesaikan masalah itu dua aspek penting yang tidak bisa dilepaskan yakni aspek komunikasi dan sikap. Banyak program gagal diimplementasikan secara tepat disebabkan oleh kegagalan dalam berkomunikasi. Kegagalan menyampaikan program dengan tepat oleh pemberi, dan pelaksana program kepada resipien penerima menyebabkan masyarakat sasaran tidak mempunyai pengetahuan memadai untuk merubah perilakunya. Sikap pemberi informasi sangat menentukan sebab akan membangun keteladanan bagi yang menerima program. Ditambah lagi dengan sumber-sumber yang sangat minim. Jika komunikasi, sikap dan sumber-sumber gagal dibangun oleh pemberi program, maka dapat dipastikan peluang gagal lebih besar. Sebaliknya, jika komunikasi, sikap dan sumber-sumber berhasil dibangun dengan mudah masyarakat menerima program yang diberikan. Penerimaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan program.

C. Hipotesis

C.1. Pengertian Hipotesis

Menurut Prof. Dr. Mukayat D. Brotowidjojo hipotesis adalah : pernyataan tentang suatu dalil, tetapi yang kebenarannya belum diuji secara empiris. Hipotesis juga dapat diartikan : teori penyamarataan coba-coba yang dibuat setelah menimbang fakta-fakta yang relevan yang dilaporkan oleh peneliti lain atau yang diobservasi sendiri. (Mukayat D. Brotowidjojo, 1991 : 28).

Sedangkan menurut Masri Singarimbun hipotesis adalah sasaran penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena ia merupakan instrumen kerja dan teori. Sebagai hasil deduksi dari teori atau proposisi, hipotesis lebih spesifik sifatnya sehingga lebih siap diuji secara empiris (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2001 : 43).

Menurut Dr. Sugiono hipotesis merupakan : jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiono, 1999 : 39).

Dari rumusan ketiga hipotesis tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini :

a. Hipotesis Minor

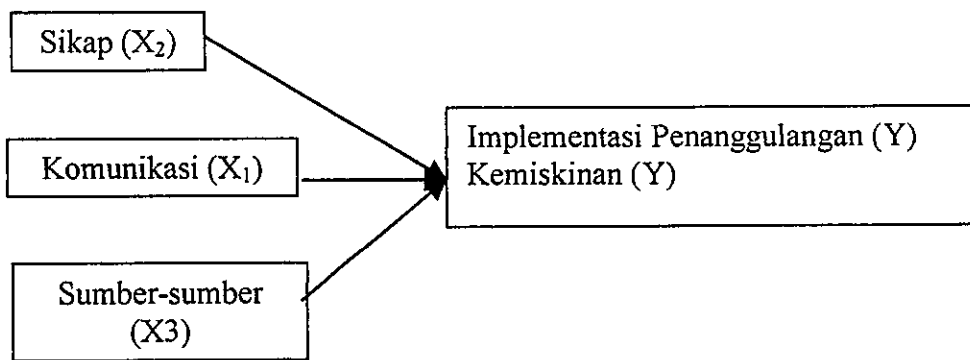
1. Ada hubungan antara variabel Komunikasi (X1) dengan variabel Implementasi (Y) program Penanggulangan Kemiskinan.
2. Ada hubungan antara variabel Sikap (X2) dengan variabel Implementasi (Y) program Penanggulangan Kemiskinan.
3. Ada hubungan antara variabel Sumber-sumber (X3) dengan variabel Implementasi (Y) program Penanggulangan Kemiskinan

b. Hipotesis Mayor

Ada hubungan antara variabel Komunikasi (X_1), variabel Sikap (X_2) dan variable sumber-sumber (X_3) dengan variabel Implementasi (Y) pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan.

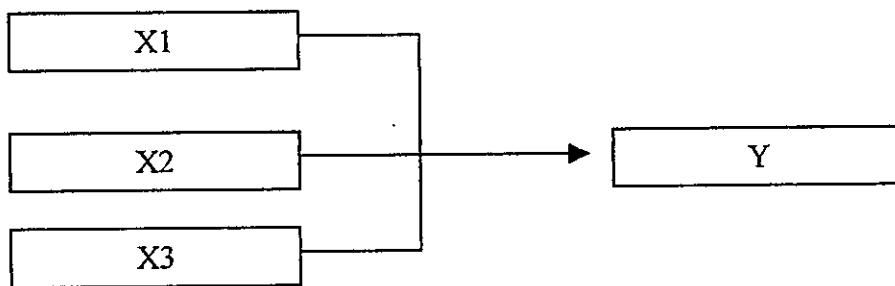
c. Model Geometrikal

Gambar C.1
Model Geometrikal Hipotesis Minor



Sumber : (Sugiono, 1999 : 40)

Gambar C.2
Model Geometrikal Hipotesis Mayor



Sumber : (Sugiono, 1999 : 40)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan penelitian

Menurut Sutrisno Hadi (1989 : 21), ada tiga tipe penelitian :

1. Tipe deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh tentang sifat dari suatu keadaan atau fenomena dalam masyarakat.
2. Tipe eksploratif yaitu penelitian yang berusaha memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu dengan maksud merumuskan masalah lebih terperinci.
3. Tipe eksplanatori yaitu penelitian yang menguji hipotesis tentang hubungan, sebab akibat variabel yang diteliti dari hipotesis yang ditentukan.

Sedangkan Mardalis (2002 : 25) menyatakan pada umumnya penelitian dapat digolongkan menjadi empat tipe yaitu : 1) penelitian histories, 2) penelitian penjajagan (*eksplorative*), 3) penelitian diskriptif dan 4) penelitian penjelasan (*eksplanatory* atau *conformation research*). Penelitian eksplanatory bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesa yang mempunyai hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori yaitu untuk menguji hipotesis tentang pengaruh antara komunikasi, sikap dan sumber-sumber terhadap implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo.

B. Ruang lingkup penelitian

Data yang diambil adalah data mengenai : pendapat masyarakat Kelurahan Sendangguwo yang mengikuti program Penanggulangan Kemiskinan yakni mereka yang menerima bantuan permodalan periode 2004 – 2005. Bagaimana mereka bersikap, berkomunikasi dan mendapat sumber-sumber yang berkaitan dengan program yang mereka terima.

C. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di masyarakat Sendangguwo yang mendapat program Penanggulangan Kemiskinan periode 2004 - 2005

D. Variabel penelitian

1. Klasifikasi

Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian kuantitatif yang dipadukan dengan metode penelitian kualitatif agar diketahui pendapat masyarakat yang memperoleh bantuan permodalan.

2. Definisi Konseptual

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi mengemukakan konsep merupakan generalisasi dari kelompok tertentu sehingga dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini definisi konseptual yang dikemukakan meliputi:

1. Implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesudah suatu kebijakan diputuskan dengan sarana-sarana dan berusaha mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat untuk mencapai tujuan.
2. Komunikasi merupakan proses penyampaian ide, keterangan, pengertian dapat berupa tingkah laku atau perbuatan atau kegiatan lain, serta cara-cara dan teknik penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain.
3. Sikap merupakan pandangan, perasaan, tanggapan pikiran terhadap suatu obyek / situasi tertentu yang disertai dengan kecenderungan cara bereaksi melalui pendapat ataupun gerakan fisik.
4. Sumber-sumber merupakan faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia dan sarana-prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran dari suatu variabel penelitian ke dalam indikator-indikator atau gejala-gejala terperinci, sehingga variabel tersebut diketahui ukurannya dengan jelas. M. Nasri (M.Nasri, 1997 : 54)mengemukakan definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel / konstruk dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun operasional yang diperlukan untuk memberi konstruk tersebut.

Maka definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Implementasi Program (Y)

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

Kesadaran masyarakat binaan untuk menjalankan program yang dilaksanakan di Kelurahan

Sendangguwo

1. Tingkat kesadaran masyarakat binaan mengikuti kegiatan-kegiatan di Kelurahan

Sendangguwo

- Tingkat sosialisasi pelaksanaan program
- Tingkat perencanaan kegiatan program.
- Tingkat pengorganisasi program
- Tingkat pendanaan program
- Tingkat pelaksanaan program
- Tingkat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

2. Kepatuhan masyarakat binaan menjalani program

- Tingkat kepatuhan menjalankan program
- Tingkat keaktifan berpartisipasi dalam kegiatan program

2. *Komunikasi (XI)*

1. Transmisi.

- Tingkat intensitas penyampaian informasi pelaksana kegiatan kepada klien
- Tingkat penyebaran informasi pelaksana kepada masyarakat
- Tingkat keakuratan informasi mengenai biaya program.
- Tingkat keakuratan informasi mengenai mekanisme kerja program.
- Tingkat penerimaan masyarakat dalam menerima informasi program.

2. Konsistensi.

- Tingkat konsistensi informasi yang disampaikan
- Tingkat konsistensi informasi antar pelaksana

3. Kejelasan.

- Tingkat kejelasan pesan/informasi yang disampaikan
- Tingkat kelengkapan pesan/informasi yang disampaikan

4. Umpan balik

- Tingkat pengetahuan pekerja sosial dalam mengelola masukan dari masyarakat.
- Tingkat kemampuan membantu memecahkan masalah-masalah yang ditemukan.

3. Sikap (X2)

1. Kemampuan intelektual

- Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap program pengentasan kemiskinan
- Tingkat kemampuan pelaksana dalam menangani masalah

2. Kemampuan interaksi.

- Tingkat pemahaman tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.
- Tingkat kemampuan kerjasama pelaksana dengan klien
- Tingkat kemampuan pelayanan dengan masyarakat

3. Kemampuan administrasi .

- Tingkat kemampuan pelaksana dalam melaksanakan prosedur pengentasan kemiskinan
- Tingkat ketertiban dalam pembuatan laporan.

4. Sumber – sumber (X3)

1. Informasi penerima bantuan penanggulangan kemiskinan

- Tingkat pendidikan formal yang dimiliki
- Tingkat pendidikan non formal yang pernah diikuti
- Tingkat pemahaman mengenai program penanggulangan kemiskinan

- Tingkat pemahaman dalam sosialisasi program
2. Kecakapan/keterampilan
- Tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan
 - Tingkat kecakapan dalam menjalankan tugas
 - Tingkat ketelitian dan keseriusan dalam melaksanakan kegiatan
3. Wawasan yang dimiliki
- Tingkat wawasan yang dimiliki tentang seleksi penerimaan dan kelompok sasaran
 - Tingkat wawasan yang dimiliki tentang ketepatan penerima bantuan pada kelompok sasaran
 - Tingkat wawasan yang dimiliki tentang deviasi penggunaan bantuan dana oleh kelompok sasaran
 - Tingkat wawasan yang dimiliki tentang pemecahan masalah dalam pelaksanaan program
4. Fasilitas
- Tingkat ketersediaan sarana dalam penanggulangan kemiskinan
 - Tingkat kualitas penggunaan sarana yang tersedia
 - Tingkat kemudahan memperoleh sarana pendukung

E. Jenis dan sumber data

Menurut Sutrisno Hadi (2001 : 66) jenis data dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu :

1. Data Kualitatif yaitu data yang dapat diselidiki secara tidak langsung. Contoh : ketangkasan, kemahiran, kecerdasan dan aktivitas

2. Data kuantitatif yaitu data yang dapat diselidiki secara langsung (dapat diukur), seperti :
jumlah guru, penghasilan, lamanya pendidikan dan jumlah anak.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer

Adalah responden yang secara langsung menjadi sumber pertama dari penelitian ini.

Responden penelitian yang menjadi data primer adalah masyarakat Kelurahan

Sendangguwo yang menerima program Pengentasan Kemiskinan

2. Data sekunder

Adalah data yang didapat dari buku-buku yang mendukung penelitian ini

F. Instrument penelitian

Setiap data yang diperoleh dari jawaban responden akan diberi nilai dengan skala yang telah

ditentukan berdasarkan tingkat atau bobot jawaban (skala Linkert), yaitu :

- a. Jawaban dengan kategori tinggi diberi skor 4
- b. Jawaban dengan kategori cukup tinggi diberi skor 3
- c. Jawaban dengan kategori kurang tinggi diberi skor 2
- d. Jawaban dengan kategori rendah diberi skor 1

G. Populasi dan tehnik pengambilan sampel

- a. Populasi

Populasi merupakan semua obyek, semua gejala dan semua kejadian atau peristiwa yang akan diselidiki (Sutrisno Hadi, 1989 : 70). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi

adalah semua masyarakat binaan yang ditangani oleh Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata terutama yang memperoleh bantuan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi, yang dianggap mewakili secara keseluruhan (Sutrisno Hadi, 1989 : 70). Dengan demikian sample dalam penelitian ini masyarakat binaan YKKS yang menerima program. Unit analisis penelitian merupakan sebagian dari satuan sample yang ada dalam populasi yaitu satuan terkecil yang diamati karakternya. Elemen penelitian dalam hal ini adalah masyarakat binaan penerima bantuan permodalan Penanggulangan Kemiskinan.

Di dalam teknik pengambilan sampel ini berdasar ketentuan Sutrisno Hadi (Sutrisno Hadi, 1989 : 71) bahwa sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, untuk *sample size* dari keseluruhan populasi yang berjumlah 750 orang itu diambil 10% yakni 75 orang . Dalam penelitian ini responden yang diambil 75 orang dengan alasan karena 10% dari KK miskin yang menerima bantuan modal usaha sudah mewakili keseluruhan KK miskin di Kelurahan Sendangguwa. Disamping, 75 orang ini tersebar di keseluruhan RW yang ada di Sendangguwa.

H. Teknik pengumpulan data

Rangkaian penelitian dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut.

1. Interview

Menurut Masri Singarimbun (1989 : 192) wawancara merupakan interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Pewawancara diharapkan merangsang lawan bicara untuk menjawab, menggali jawaban lebih jauh dan mencatatnya. Syarat menjadi pewawancara yang baik ialah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman artinya tidak takut dan ragu menyampaikan pertanyaan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan antara peneliti dengan warga penerima bantuan permodalan masyarakat binaan.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (2001 : 136) observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan baik yang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung. Menurut Jehoda dalam Sutrisno Hadi (2001 : 136) observasi menjadi alat penyelidikan ilmiah yang mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, direncanakan secara sistematis, bukan terjadi secara tidak teratur, dicatat dan dihubungkan dengan sistematis, dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya. Dalam penelitian ini observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Peneliti melakukan kunjungan ke Kelurahan Sendangguwo untuk menemukan tingkah laku dan sikap masyarakat binaan terhadap kegiatan tersebut.

3. Kuesioner

Menurut Sutrisno Hadi (2001 : 156) kuesioner merupakan metode penggalan data dengan mengungkap perbuatan-perbuatan atau perasaan-perasaan, keinginan-keinginan dan

prasangka-prasangka dan perbuatan masa lampau yang tidak terungkap dengan pengamatan biasa. Metode kuesioner mendasarkan laporan tentang diri sendiri atau self reports atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan alasan bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang dikatakan subyek adalah benar dan dapat dipercaya. Serta intepretasi tentang subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan daftar pertanyaan kepada masyarakat binaan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini (kuesioner terlampir).

I. Tehnik Pengolahan Data

1. Teknik pengolahan data

Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hal ini berarti setiap data yang diperoleh dari jawaban responden akan diberi nilai dengan skala yang telah ditentukan. Sebelum tahap analisis yang sebenarnya dilakukan, data diambil melalui proses berikut:

- a. *Editing* yaitu melakukan penelitian kembali kebenaran data yang telah diperoleh dari isi kuesioner dan wawancara.
- b. *Coding* yaitu mengklasifikasikan jawaban responden menurut jenisnya dan memberi kode pada masing-masing jawaban sesuai kriteria yang dipakai.
- c. *Tabulating* yaitu melakukan proses penyesuaian ke dalam bentuk tabel tertentu dengan jalan mengelompokkan jawaban yang diperoleh menurut jawaban yang sama secara teliti dan teratur. Selanjutnya dihitung dan dijumlahkan gejala yang termasuk dengan kategori tertentu.

Setelah data diolah dengan cara tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan langkah sebagai berikut :

- a. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan apabila data yang tidak diperoleh tidak dapat diterjemahkan dengan angka atau dengan kata lain analisis data yang berwujud kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi. Analisis ini dilakukan dengan jalan menguraikan informasi yang masuk.
- b. Analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang diperuntukkan bagi data yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori dan berwujud angka.

Skala Pengukuran menurut Sutrisno Hadi (Sutrisno Hadi, 2001:94)

a. Skala Ratio

adalah menetapkan proporsi atau mengatur menurut perimbangan dimana ia memiliki titik nol yang absolut yang berarti pencatatan dengan bilangan nol menunjukkan gejala sama skala tidak ada.

b. Skala Interval

adalah menetapkan proporsi atau mengatur menurut perimbangan dimana terdapat angka skala yang mempunyai jarak yang sama antara titik-titik yang berdekatan.

c. Ordinal

adalah menetapkan proporsi atau mengatur menurut perimbangan dimana terdapat angka yang menunjukkan posisi dalam suatu urutan, dalam suatu seri

d. Nominal

Adalah menetapkan gejala yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit, secara kategorik.

2. Teknik Pengujian Hipotesa

Pengujian hipotesa ini pada dasarnya untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, maka di dalam pengujian digunakan skala ordinal. Adapun rumus-rumus yang digunakan adalah :

a. Koefisien Korelasi Rank Kendall

Koefisien ini digunakan untuk menguji hipotesis minor, yaitu tingkat asosiasi atau hubungan antara variabel X_1 dengan Y ; atau X_2 dengan Y ; atau X_3 dengan Y adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2}N(N-1)}$$

dimana :

τ = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Skor

N = Jumlah responden

Apabila terdapat rangking yang sama atau kembar pada observasi skor variabel X atau Y , akan berakibat mengubah pembagi pada rumus di atas sehingga rumus korelasi Rank Kendall menjadi : (Siegel Sidney, hal. 228, 1985)

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_x} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_y}}$$

Dimana :

τ = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Skor

N = Banyak obyek atau individu yang diurutkan pada X dan Y

$T_x = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$, t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel Y.

$T_y = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$, t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel Y.

Karena nilai N lebih besar dari 10 angka, dapat dianggap berdistribusi normal oleh sebab itu dalam pengujian signifikansinya harga koefisien korelasi rank kendall di atas terlebih dahulu didistribusikan ke dalam rumus berdistribusi berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara dua tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila $Z > Z_t$ pada taraf signifikansi 1 % berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $Z > Z_t$ pada taraf signifikansi 5 % berarti signifikan, hipotesis diterima.
3. Apabila $Z < Z_t$ pada taraf signifikansi 5 % berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

b. Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi antara variabel X_1 , X_2 dan Y secara bersama-sama melalui pengukuran terhadap himpunan-himpunan rangking masing-masing variabel yang diasosiasikan secara bersama-sama.

Untuk menghitung harga W adalah dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2}k^2(N^3 - N) - k\sum T}$$

Dimana :

$$T = \frac{\sum(t^3 - t)}{12}$$

Keterangan :

W = Koefisien Konkordansi Rank Kendall

S = Hasil Observasi ranking tiap variabel

k = Banyaknya himpunan ranking perjenjangan

N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking

T = Jumlah harga-harga T untuk semua ranking

t = Banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu.

Untuk uji signifikansinya dipergunakan rumus :

$$X^2 = k (N-1) W$$

Dimana :

X^2 = test chi square

k = Banyaknya himpunan ranking perjenjangan

N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking

W = Koefisien Konkordansi Rank Kendall

Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan harga kritis chi kuadrat dengan rumus $db = N-1$ adapun ketentuannya sebagai berikut :

1. Apabila $X_0^2 > X_t^2$ pada taraf signifikansi 1 % berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $X_0^2 > X_t^2$ pada taraf signifikansi 5 % berarti signifikan, hipotesis diterima.

3. Apabil $X_0^2 < X_1^2$ pada taraf signifikansi 5 % berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.

c. Koefisiensi Determinan

Dari perhitungan tersebut di atas maka untuk mencari seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan rumus koefisien determinan sebagai berikut :

$$K_{DXY} = (\tau_{XY})^2 100 \%$$

$$K_{DX_1X_2X_3Y} = (\tau_{X_1X_2X_3Y})^2 100 \%$$

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

1. LOKASI PENELITIAN

Kelurahan Sendangguwo merupakan salah satu kelurahan di kotamadya Semarang, terletak di kecamatan Tembalang, Semarang Selatan. Daerah ini dulunya merupakan kuburan cina (bong) yang sudah lama tidak diurus keluarganya. Menurut cerita para tetua, nama Sendang Gua diambil dari adanya Sendang dan Guwo. Gua tersebut merupakan tempat pesanggrahan salah satu Sunan yang sampai sekarang belum diketahui sunan siapa dan salah satu sendang yaitu Sendang Jeruk Uik merupakan sumber air yang pernah menghidupi masyarakat dari kebutuhan akan air. Kelurahan Sendang Guwo terdiri dari 8 RW dengan 77 RT.

Sarana penghubung dari pusat kota Semarang dengan Kelurahan Sendang Guwo dihubungkan dengan sarana jalan yang sudah beraspal dan terjangkau kendaraan angkutan umum.

2. SOSIAL EKONOMI

a. Keadaan penduduk

Penduduk Sendang Guwo sebagian besar adalah penduduk pendatang, mereka datang dari desa untuk mencari pekerjaan. Dari data monografi kelurahan pada bulan Pebruari 2003, jumlah penduduk tercatat 15.623 orang, yang terdiri dari 7.984 orang laki-laki dan 7.600 perempuan. Lebih lanjut keadaan penduduk Sendangguwo dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel IV.1
Klasifikasi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Kel. Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	1.547	1.610	3.157
5 – 9	1.167	1.109	2.276
10 – 14	693	605	1.298
15 – 19	847	773	1.620
20 – 24	644	667	1.311
25 – 29	1.014	975	1.989
30 – 34	428	338	766
35 – 39	692	614	1.306
40 – 44	240	227	467
45 – 49	235	210	445
50 – 54	220	222	442
55 – 59	90	101	191
60 – 64	89	98	187
65 keatas	90	78	168
Jumlah	7.984	7.600	15.623

Sumber : Kelurahan Sendang Guwo Semarang, Febuari 2004

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Sendang Guwo lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

b. Pendidikan

Berdasarkan klasifikasi menurut pendidikan, penduduk Kelurahan Sendang Guwo Kecamatan Tembalang, Semarang Selatan dapat didistribusikan meurut kelompok umur penduduk yang berumur 5 tahun keatas dapat dilihat bahwa 1,65% penduduk adalah tamatan perguruan tinggi strata I, dan 1,04% adalah tamatan perguruan tinggi diploma III; 14,87 % adalah tamatan SLTA; 11,83% adalah tamatan SLTP; 21,60 % adalah tamatan SD; 14% tidak tamat SD dan yang belum tamat SD 14,77%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun sarana pendidikan yang ada cukup terbatas, namun usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan terus diupayakan. Ini terlihat dari tidak adanya penduduk usia 5 tahun

keatas yang tidak sekolah. Namun demikian, masih cukup memprihatinkan kondisi penduduk dengan drop-out SD yang cukup tinggi.

Tabel IV.2
Klasifikasi penduduk menurut pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jml. Orang
1	Perguruan Tinggi	259
2	Tamat Akademi	163
3	Tamat SLTA	2.324
4	Tamat SLTP	1.849
5	Tamat SD	3.375
6	Tidak tamat SD	2.188
7	Belum tamat SD	2.308
8	Tidak sekolah	0
	Jumlah	12.466

Sumber : Kelurahan Sendang Guwo Semarang, Febuari 2004

c. Mata pencarian penduduk

Dari data sekunder yang diperoleh dari Kelurahan Sendang Guwo, nampak bahwa sebagian besar penduduk adalah bermata pencaharian buruh, buruh pabrik maupun buruh industri. Lebih jauh dari table tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk adalah berkehidupan kelas ekonomi menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat dari 15.623 penduduk bermata pencaharian buruh sebanyak 5.639 (36,09%); sedang penjual jasa 3.428 (21,94%) yang terbagi dalam : jasa penjahit, calo, tukang gedong dipasar, tukang cuci pakaian, pembantu rumah, tangga, tukang pijat. Bermata pencaharian pedagang sebanyak 258 (1,65%) penduduk, pengangkutan sebanyak 164 (1,04%), pegawai negeri/ABRI sebanyak 493 (3,15%), pensiunan sebanyak 197 (1,26%) penduduk.

Tabel IV.3
Mata pencaharian penduduk

No	Mata Pencaharian	Jml. Orang
1	Petani sendiri	-
2	Buruh tani	-
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	17
5	Buruh industri	2.821
6	Buruh bangunan	2.818
7	Pedagang	258
8	Pengangkutan	164
9	Pegawai negeri (sipil/ABRI)	493
10	Pensiunan	137
11	Lain-lain (jasa)	3.482
	Jumlah	10.190

Sumber : Kelurahan Sendang Guwo Semarang, Febuari 2004

Dari tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian tersebut di atas, nampak bahwa sebagian besar penduduk adalah bermata pencaharian buruh, baik buruh pabrik maupun buruh industri. Lebih jauh lagi tabel diatas menunjukkan sebagian besar penduduk adalah berkehidupan kelas ekonomi menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 15.623 penduduk bermata pencaharian buruh sebanyak 5.639, sedang yang bermata pencaharian penjual jasa 3.482 sebagai penjahit, calo, tukang gendong di pasar, tukang cuci pakaian, pembantu rumah tangga tukang pijat.

d. Fasilitas umum yang dimiliki

- ✓ Sarana pendidikan
 - SD. Sawi
 - SD. Sendang Guo
 - SD. Al Hikmah
 - TK. Adi Siwi

- TK. Nuriyah
- TK. Ra Al. Hikmah
- ✓ Sarana kesehatan
 - Puskesmas
 - Bidan
- ✓ Sarana tempat pertemuan
 - Balai RW VII
 - Balai RW IV
- ✓ Sarana keamanan
 - Hansip
 - Pos kamling
- ✓ Sarana ibadah
 - Masjid
 - Gereja
- ✓ Sarana jalan dan jembatan
 - Jalan/gang paving, beton, tanah dan aspal
 - Jembatan ada 2, menghubungkan dengan gayamsari ke sendang guo baru
- ✓ Sarana air bersih
 - Air bersih diperoleh dari PDAM dan ada pula yang memanfaatkan sumur. Bahkan di RW I terdapat bak penampungan air
- ✓ Sarana pasar
 - Terdapat sebuah pasar yang cukup besar, yaitu pasar Kedungmundu terletak di RW V.

Bab V

ANALISIS DATA

Bab ini akan disajikan laporan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan berdasarkan jawaban responden. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada 75 responden penerima Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang.

1. Identitas Responden

- a. Jenis kelamin responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.1
Sebaran Responden menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	56	74,6
2	Perempuan	19	25,4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian I, no. 1

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penerima program pengentasan kemiskinan bidang permodalan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 74,6% dibandingkan dengan perempuan yang hanya berkisar 25,4%. Hal ini dilakukan mengingat laki-laki adalah tulang punggung keluarga sehingga prioritas penerima bantuan permodalan adalah laki-laki. Hal ini disebabkan karena sebagian besar warga binaan di Kelurahan Sendangguwo, laki-laki merupakan penopang utama kehidupan rumah tangga.

- b. Pertanyaan kedua dipakai untuk mengukur status dalam keluarga responden :

Tabel V.2
Sebaran Responden menurut Status dlm Keluarga

No	Status dlm keluarga	Frekuensi	Prosentase
1	Kepala keluarga	55	73,3
2	Ibu rumah tangga	19	25,4
3	Anak	0	0
4	Lainnya	1	1,3
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian I, no.2

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan yang terbanyak diberikan kepada kepala keluarga dengan persentase 73,3% diikuti oleh ibu rumah tangga sebesar 25,4%, anak-anak sebesar 0% sedangkan 1 orang lainnya adalah pemuda yang belum memiliki keluarga. Banyaknya kepala keluarga yang menerima bantuan dilakukan

- c. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil kuesioner bagian pertama nomor 3.

Tabel V.3
Sebaran Responden menurut Usia

No	Usia	Frekuensi	Prosentase
1	Dibawah 10 th	0	0
2	11-20 th	0	0
3	21-30 th	19	25,3
4	31-40 th	50	66,7
5	diatas 40 th	6	8
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian I, no.3

Tabel diatas menunjukkan gambaran mengenai usia responden yang menerima program pengentasan kemiskinan, yaitu : sebanyak 0% berusia dibawah 10th; 0% berusia 11 – 20th; 21,3% berusia 21-30th; 66,7% berusia 31-40th dan 8% berusia diatas 40th. Ada hasil sebesar 0 orang, dikarenakan bidang yang diteliti adalah bidang permodalan, sehingga diberikan kepada orang dewasa.

- d. Pada pertanyaan tentang jenjang pendidikan tertinggi diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel V.4
Sebaran Responden menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak sekolah	0	0
2	SD	3	4
3	SMP	22	29,3
4	SMA	45	60
5	Akademi	3	4
6	Universitas	2	2,7
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian I, no.4

Dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir dari penerima program pengentasan kemiskinan berkisar pada bagian 3, yaitu : SMA sebesar 60%; disusul dengan SMP sebesar 29,3%; dilanjutkan dengan SD dan Akademi yang memiliki besaran sama, yaitu : 4%; dan terakhir adalah universitas sebesar 2,7%.

- e. Pekerjaan responden juga mendapat porsi pada pertanyaan ini, dan menghasilkan jawaban:

Tabel V.5
Sebaran Responden menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	1	1,3
2	Swasta	4	5,4
3	Wiraswasta	7	9,4
4	Buruh	25	33,3
5	Tidak tetap/ Pengangguran	38	50,6
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian I, no.5

Hasil dari sebaran responden menurut pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima program pengentasan kemiskinan bekerja secara tidak menetap 50,6%; diikuti dengan pekerjaan responden sebagai buruh sebesar 33,3%; sebagai wiraswasta 9,4%; swasta 5,4%; dan yang terakhir adalah PNS sebesar 1,3%. Sesuai dengan tujuan dari program pengentasan kemiskinan ini, bahwa yang berhak menerima program adalah orang yang kurang mampu dalam perekonomian. Dan hal ini ditunjukkan bahwa yang paling

banyak menerima bantuan adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap/pengangguran.

2. Implementasi Program (Y)

Kesadaran

- a. Tabel V.6 menilai tentang kesadaran responden dalam mengikuti pertemuan.

Tabel V.6
Kesadaran responden dalam mengikuti pertemuan

No	Kesadaran	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat rajin (lebih dari 15 kali)	6	8
2	Rajin (10 – 15 kali)	41	54,7
3	Tidak rajin (5 – 9 kali)	24	32
4	Sangat tidak rajin (kurang dari 5 kali)	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.1

Hasil jawaban responden mengenai kesadaran masyarakat dalam mengikuti pertemuan program pengentasan kemiskinan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden sadar bahwa program tersebut baik untuk mereka. Kerajinan responden dalam mengikuti pertemuan disebabkan program-program yang ditawarkan dirasakan membantu pertumbuhan sosial ekonomi mereka. Sebanyak 54,7% rajin mengikuti pertemuan; 8% sangat rajin; 32% tidak rajin dan 5,3% sangat tidak rajin. Responden mengatakan dengan rajin mengikuti pertemuan membantu memahami arah dan tujuan program. Dalam pertemuan juga diberikan materi yang bersifat pelatihan sehingga terbantu dalam menjalankan usaha. Dalam pertemuan membuat warga penerima bantuan dapat berinteraksi dengan warga penerima bantuan lain, sehingga saling mengetahui perkembangan masing-masing yang memacu usahanya.

- b. Kesadaran responden dalam keterlibatannya pada setiap pertemuan juga mendapat penilaian sebagai berikut :

Tabel V.7
Kesadaran responden terlibat dalam pertemuan

No	Kesadaran	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu terlibat (lebih dari 15 kali)	5	6,7
2	Terlibat (10 – 15 kali)	52	69,3
3	Tidak terlibat (5 – 9 kali)	16	21,3
4	Sama sekali tidak terlibat (kurang dari 5 kali)	2	2,7
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.2

Selain rajin dalam mengikuti pertemuan, masyarakat juga ikut terlibat dalam pertemuan program pengentasan kemiskinan. Dari jawaban responden terlihat bahwa sebanyak 69,3% terlibat dalam pertemuan; 6,7% selalu terlibat; 21,3% tidak terlibat dan hanya sebagian kecil yaitu 2,7% sama sekali tidak terlibat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi terhadap program tersebut. Antusiasme yang tinggi disebabkan kesadaran bahwa warga penerima bantuan merupakan warga yang paling beruntung boleh berpartisipasi dalam kegiatan bantuan. Kesadaran yang tinggi terlibat dalam pertemuan dikarenakan hanya dengan cara itu warga penerima mengucapkan terima kasih pada pemberi bantuan.

- c. Tabel V.8 menunjukkan kesadaran responden dalam penyusunan rencana.

Tabel V.8
Kesadaran responden dalam penyusunan rencana

No	Kesadaran	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu terlibat (lebih dari 15 kali)	7	9,3
2	Terlibat (10 – 15 kali)	41	54,7
3	Tidak terlibat (5 – 9 kali)	23	30,7
4	Sama sekali tidak terlibat (kurang dari 5 kali)	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.3

Dalam menyusun rencana, masyarakat memiliki keterlibatan yang cukup tinggi. Tampak pada hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebanyak 54,7% menyatakan terlibat; 9,3% menyatakan selalu terlibat; 30,7% menyatakan tidak terlibat dan sisanya yaitu sebanyak 5,3% menyatakan sama sekali tidak terlibat. Dengan terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan, mereka memiliki gambaran mengenai pola kerja dalam penerimaan modal kerja tersebut. Dengan terlibat perencanaan, warga penerima bantuan merasa bertanggung jawab terhadap masa depannya sendiri. Warga penerima bantuan adalah pihak yang paling tahu kondisinya sendiri serta masalah yang dihadapinya. Dengan terlibat dalam proses perencanaan, warga penerima bantuan bisa mengusulkan kegiatan yang paling tepat dengan rencana sendiri dan menentukan jenis-jenis kegiatan yang paling bermanfaat.

- d. Pada bagian kedua soal nomor 4, dipertanyakan mengenai kesadaran responden dalam mengikuti kegiatan.

Tabel V.9
Kesadaran responden dalam mengikuti kegiatan

No	Kesadaran	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu mengikuti (lebih dari 15 kali)	6	8
2	Mengikuti (10 – 15 kali)	47	62,7
3	Tidak mengikuti (5 – 9 kali)	19	25,3
4	Sama sekali tidak mengikuti(kurang dari 5 kali)	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.4

Hasil jawaban responden mengenai kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan program pengentasan kemiskinan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden sadar bahwa program tersebut baik untuk mereka. Sebanyak 62,7% rajin mengikuti kegiatan; 8% sangat rajin; 25,3% tidak rajin dan 4%

sangat tidak rajin mengikuti kegiatan. Kesadaran ini didasari oleh pentingnya modal yang mereka butuhkan dalam menciptakan atau meningkatkan usaha mereka. Menurut warga penerima bantuan, bantuan modal saja tidak akan berguna jika tidak disertai dengan pendampingan dan kesadaran terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu kelemahan program pengentasan kemiskinan selama ini menurut warga penerima bantuan adalah lemahnya koordinasi dari pendamping terhadap penerima bantuan. Bantuan dilepaskan begitu saja tanpa ada kelanjutan dalam pendampingan padahal warga penerima bantuan tidak mempunyai strategi dalam usahanya. Ketika bantuan dilepas begitu saja tanpa adanya pendampingan, yang terjadi adalah kecenderungan bantuan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pendidikan dan pengobatan bukannya untuk usaha seperti ketika warga penerima bantuan mengajukan pinjaman.

- e. Tabel IV.10 menunjukkan hasil dari pertanyaan mengenai kesadaran responden terlibat dalam pertemuan pembahasan program.

Tabel V.10
Kesadaran responden terlibat dalam pertemuan pembahasan program

No	Kesadaran	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu terlibat (lebih dari 15 kali)	4	5,3
2	Terlibat (10 – 15 kali)	51	68
3	Tidak terlibat (5 – 9 kali)	15	20
4	Sama sekali tidak terlibat (kurang dari 5 kali)	5	6,7
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.5

Tampak pada hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebanyak 68% menyatakan terlibat; 9,3% menyatakan selalu terlibat; 20% menyatakan tidak terlibat dan sisanya yaitu sebanyak 6,7% menyatakan sama sekali tidak terlibat. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami program pengentasan kemiskinan

sehingga mereka berusaha untuk mencari tahu dan terlibat langsung dalam kegiatan pembahasan program. Keinginan warga penerima bantuan mengikuti pembahasan-pembahasan program dimaksudkan agar memahami maksud dan arah kebijakan program. Sering terjadi perubahan kebijakan perihal teknis penggunaan bantuan, sehingga warga penerima bantuan harus terus-menerus mengikutinya.

- f. Penelitian juga ingin mencari tahu besarnya kesadaran responden dalam monitoring dan evaluasi program.

Tabel V.11
Kesadaran responden terlibat dalam monitoring dan evaluasi program

No	Kesadaran	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu terlibat (lebih dari 15 kali)	9	12
2	Terlibat (10 – 15 kali)	53	70,7
3	Tidak terlibat (5 – 9 kali)	8	10,7
4	Sama sekali tidak terlibat (kurang dari 5 kali)	5	6,7
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.6

Monitoring dan evaluasi program sangat diperlukan agar program tidak menyimpang dari tujuannya. Hal ini sangat disadari oleh masyarakat dengan memberi jawaban : sebanyak 70,7% menyatakan terlibat; 12% menyatakan selalu terlibat; 10,7% menyatakan tidak terlibat dan sisanya yaitu sebanyak 6,7% menyatakan sama sekali tidak terlibat. Masyarakat menyadari bahwa tujuan dari monitoring dan evaluasi yang rutin akan memperbaiki kinerja mereka dalam menggunakan modal yang diberikan dalam program pengentasan kemiskinan. Jika tidak ada monitoring bantuan yang mestinya bagi masyarakat bersifat pemberdayaan berubah menjadi bantuan yang bersifat karitatif sehingga masyarakat beranggapan bantuan yang diberikan boleh dipergunakan untuk apa saja termasuk hal-hal yang konsumtif.

Kepatuhan

- g. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari penilaian responden dalam menilai kepatuhan mereka dalam menjalankan petunjuk program yang didapat.

Tabel V.12
Kepatuhan responden dalam menjalankan petunjuk program

No	Kepatuhan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat patuh	8	10,7
2	Patuh	43	57,3
3	Tidak patuh	20	26,7
4	Sangat tidak patuh	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.7

Hasil jawaban responden mengenai kepatuhan masyarakat dalam menjalankan petunjuk program pengentasan kemiskinan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden sadar bahwa program tersebut dapat memberi manfaat yang maksimal ketika mereka patuh pada aturan yang berlaku. Sebanyak 57,3% patuh pada peraturan program; 10,7% sangat patuh; 26,7% tidak patuh dan 5,3% sangat tidak patuh. Ada hubungan tegas sebagaimana diungkapkan para penerima bantuan, keberhasilan pelaksanaan bantuan berkaitan erat dengan kesediaan untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dari jawaban penerima bantuan yang rajin mengikuti arahan serta kesediaan bekerjasama dengan pemberi bantuan usahanya justru cepat berkembang. Peraturan penting dalam kegiatan bantuan permodalan. Namun yang lebih penting lagi adalah kesediaan mematuhi dan membicarakan bersama berbagai kemungkinan strategi usaha yang berhasil.

h. Tabel dibawah ini merupakan hasil dari pertanyaan no.8 pada bagian kedua

Tabel V.13
Kepatuhan responden aktif menjalankan kegiatan

No	Kepatuhan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat aktif (lebih dari 15 kali)	4	5,3
2	Aktif (10 – 15 kali)	46	61,3
3	Tidak Aktif(5 – 9 kali)	22	29,3
4	Sangat tidak aktif (kurang dari 5 kali)	3	4
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.8

Hasil jawaban responden mengenai kepatuhan mereka dalam menjalankan kegiatan : 61,3% menyatakan aktif menjalankan kegiatan; 5,3% sangat aktif; 29,3% tidak aktif dan sebanyak 4% menyatakan sangat tidak aktif. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka adalah keterbatasan pengetahuan mereka dalam mengelola program yang dijalankan membuat mereka berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi aturan main dalam kegiatan tersebut. Yang dikeluhkan warga penerima bantuan adalah keterbatasan pengetahuan sering tidak diimbangi dengan metode sosialisasi yang menarik dari pendamping. Warga penerima bantuan mengharapkan pembinaan yang intensif tetapi juga dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya. Penjelasan yang “muluk-muluk” seringkali oleh warga penerima bantuan dipandang sebagai kesombongan dari pendamping. Warga penerima bantuan membutuhkan informasi yang jelas, bahasa sederhana dan petunjuk praktis.

Demikian telah disajikan tabel-tabel yang menggambarkan item-item yang mewakili indicator variabel implementasi program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya untuk mengklasifikasikan nilai-nilai dari variabel tersebut maka digunakan rumus :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

I : Interval kelas

R : Skor tertinggi – skor terendah

K : jumlah kelas

Maka diperoleh :

$$I = \frac{30 - 11}{4} = 4,75$$

Dengan demikian diperoleh klasifikasi skor variabel implementasi program pengentasan kemiskinan sebagai berikut :

30 – 25,25 : tinggi
25,24 – 20,50 : cukup tinggi
20,49 – 15,75 : kurang tinggi
15,74 – 11 : tidak tinggi

Selanjutnya, klasifikasi nilai-nilai diatas menjadi dasar penggolongan dari jawaban responden yang menghasilkan jawaban sebagai berikut :

Tabel V.14
Kategori penilaian variabel implementasi program

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Tinggi	3	4
2	Cukup tinggi	58	77,4
3	Kurang tinggi	13	17,3
4	Tidak tinggi	1	1,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.1-8

3. Komunikasi (X1)

Transmisi

- Sarana sangat mendukung berjalannya sebuah program, termasuk program pengentasan kemiskinan. Untuk itu dalam transmisi ini dibicarakan pula bagaimana sarana yang dipergunakan dalam bidang permodalan telah memadai.

Tabel V.15
Sarana yang dipergunakan dalam bidang permodalan memadai

No	Transmisi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat memadai	7	9,3
2	Memadai	37	49,3
3	Tidak memadai	27	36
4	Sangat tidak memadai	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.9

Jawaban responden mengenai sarana yang dipergunakan dalam bidang permodalan dirasa memadai. Sebanyak 49,3% responden menyatakan memadai; 9,3% menyatakan sangat memadai; 36% menyatakan tidak memadai dan 5,3% menyatakan sangat tidak memadai. Responden memberi alasan bahwa sarana menjadi salah satu unsur keberhasilan dalam setiap kegiatan dan mereka melihat sarana yang dimiliki yayasan membantu mereka dalam pekerjaan. Seperti adanya tempat pertemuan untuk evaluasi bersama. Warga binaan memandang penting manfaat sarana-sarana penunjang kegiatan karena dengan sarana yang ada kegiatan yang dilaksanakan bisa optimal.

- b. Tabel dibawah ini menunjukkan respon dari responden mengenai informasi pelaksanaan bidang permodalan.

Tabel V.16
Informasi pelaksanaan bidang permodalan lengkap

No	Transmisi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat lengkap	6	8
2	Lengkap	45	60
3	Tidak lengkap	21	28
4	Sangat tidak lengkap	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.10

Dengan adanya pertemuan setiap minggu membuat informasi yang diberikan dirasa oleh responden lengkap. Sebagian besar responden menghasilkan jawaban 60%; sebanyak 8%

menyatakan sangat lengkap; 28% menyatakan tidak lengkap dan 4% menyatakan sangat tidak lengkap. Ketidakkengkapan informasi sering disebabkan oleh bahasa yang dipergunakan terlalu sulit dipahami, juga kondisi pertemuan yang menyebabkan warga penerima bantuan tidak bisa berkonsentrasi mengikuti proses pertemuan.

c. Mengenai keakuratan informasi juga diukur dalam penelitian ini

Tabel V.17
Informasi yang akurat mengenai biaya bidang permodalan

No	Transmisi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat akurat	3	4
2	Akurat	48	64
3	Tidak akurat	21	28
4	Sangat tidak akurat	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.11

Hasil jawaban responden mengenai keakuratan informasi mengenai biaya yang harus dikeluarkan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden melihat bagaimana informasi yang diterima akurat. Sebanyak 64% menyatakan akurat; 4% menyatakan sangat akurat; 28% tidak akurat dan 4% sangat tidak akurat. Mereka menyatakan bahwa pada awal dari pertemuan mereka sudah mendapat informasi mengenai biaya-biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan bantuan modal. Keterbukaan dalam pemakaian dan penggunaan dana sangat diperlukan masyarakat untuk menepis kecurigaan antar warga masyarakat penerima bantuan. Jika warga penerima bantuan tahu pos-pos penggunaan dana secara tertib maka kemungkinan curiga satu dengan yang lain bisa dihindari.

- d. Dibawah ini ditunjukkan pula mengenai hasil jawaban responden tentang Informasi yang lengkap mengenai keakuratan mekanisme bidang permodalan

Tabel V.18
Informasi yang lengkap mengenai keakuratan mekanisme bidang permodalan

No	Transmisi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat akurat	8	10,7
2	Akurat	47	62,7
3	Tidak akurat	16	21,3
4	Sangat tidak akurat	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.12

Keakuratan mekanisme bidang permodalan juga diteliti dan menunjukkan hasil : sebanyak 62,7% menyatakan akurat; 10,7% menyatakan sangat akurat; 21,3% menyatakan tidak akurat dan 5,3% menyatakan sangat tidak akurat. Responden menyatakan bahwa mereka telah melakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan hasil kegiatan mereka menjadi lebih berkembang setelah mengikuti aturan main yang berlaku. Yang menjadi keluhan warga penerima bantuan adalah prosedur kegiatan yang cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu. Terlalu banyaknya intervensi dari pemberi dana sangat memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam kebijakan bantuan yang diberikan. Perubahan termasuk diantaranya prosedur laporan yang selalu berubah menyebabkan pengelolaan dana oleh masyarakat kurang berkembang.

- e. Dalam komunikasi, informasi yang jelas sangat dibutuhkan, termasuk di bidang permodalan dalam program pengentasan kemiskinan.

Tabel V.19
Informasi yang jelas mengenai bidang permodalan

No	transmisi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat akurat	7	9,3
2	Akurat	39	52
3	Tidak akurat	25	33,3
4	Sangat tidak akurat	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.13

Pelaksana program menyadari bahwa kejelasan informasi atas program yang dijalankan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan program bidang permodalan. Dan masyarakatpun merespon dengan memberi jawaban yang positif. Untuk itu sebanyak 52% menyatakan akurat; 9,3% menyatakan sangat akurat; tidak akurat memperoleh nilai 33,3% dan sangat tidak akurat memperoleh nilai 5,3%. Keakuratan informasi selalu berkaitan dengan kapabilitas dan kredibilitas pemberi bantuan. Dalam hal ini pelaksana yang ada di lapangan mempunyai peranan besar yang akan menyampaikan kepada warga.

Konsistensi

- f. Konsistensi dibutuhkan terutama dalam informasi, sehingga berkesinambungan dan menghasilkan nilai yang tinggi (program berjalan dengan baik). Untuk itu penulis juga ingin mengetahui tanggapan dari para responden dalam hal konsistensi.

Tabel V.20
Responden mendapat pemberitahuan mengenai permodalan secara konsisten

No	Konsistensi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat konsisten	10	13,3
2	Konsisten	45	60
3	Tidak konsisten	18	24
4	Sangat tidak konsisten	2	2,7
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.14

Hasil jawaban responden tentang pemberitahuan mengenai permodalan secara konsisten dalam program pengentasan kemiskinan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden menjawab sebanyak 60% konsisten; 8% sangat konsisten; 32% tidak konsisten dan 5,3% sangat tidak konsisten. Konsistensi dibuktikan oleh pelaksana kegiatan dengan mengadakan pertemuan untuk membahas informasi yang berhubungan dengan modal kerja, setiap minggu sekali. Yang terjadi informasi yang diterima penerima bantuan oleh pendamping tidak konsisten. Hal ini yang sering menyebabkan kejanggalan-kejanggalan diantara warga dampingan dengan pendamping.

- g. Kekompakan mempermudah kerjasama menyukseskan program. Baik itu dilakukan oleh pelaksana program maupun dari masyarakat penerima bantuan. Tabel dibawah ini memperlihatkan penilaian masyarakat terhadap kekompakan pelaksana program.

Tabel V.21
Pelaksana program selalu kompak dalam menyampaikan informasi permodalan

No	Konsistensi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat konsisten	8	10,7
2	Konsisten	44	58,7
3	Tidak konsisten	19	25,3
4	Sangat tidak konsisten	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.15

Hasil jawaban mengenai pelaksana program selalu kompak dalam menyampaikan informasi permodalan menuju ke arah positif. Hal ini tampak pada tabel diatas dimana 58,7% responden menyatakan konsisten, 10,7% menyatakan sangat konsisten; 25,3% tidak konsisten dan 5,3% sangat tidak konsisten. Namun demikian, warga binaan tidak selalu kompak satu dengan yang lain. Alasan tinggal di perkotaan ketika interaksi

masyarakat kian terbatas dengan kesibukan pekerjaan, makin tidak mudahlah mengompakkan satu sama lain. Komunikasi dan jalinan kerjasama tetap terbangun tetapi kekompakan antar warga binaan kurang terjalin dengan baik.

Kejelasan

- h. Sebuah informasi yang sangat sederhana dan jelas akan memudahkan masyarakat untuk memahami informasi tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan yang tidak terlalu tinggi di dalam masyarakat itu sendiri.

Tabel V.22
Informasi di bidang permodalan mudah dilaksanakan

No	Kejelasan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat mudah	8	10,7
2	Mudah	41	54,7
3	Tidak mudah	23	30,7
4	Sangat tidak mudah	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.16

Tabel diatas menunjukkan jawaban atas informasi permodalan yang mudah dilaksanakan. Hasilnya menunjukkan bahwa : 54,7% menyatakan mudah; 10,7% menyatakan sangat mudah; 30,7% menyatakan tidak mudah dan 4% menyatakan sangat tidak mudah. Kondisi ini disebabkan variasi informasi. Pelatihan bantuan permodalan tidak selamanya bisa dipahami dengan mudah oleh warga binaan. Disamping pendidikan yang rendah, informasi semacam ini tergolong sangat baru baginya. Diperlukan pelatihan berulang-ulang dan kesempatan memperdalam diri secara lebih intensif sehingga pelatihan-pelatihan yang diberikan selalu nyantol di benak para warga binaan penerima program.

- i. Bidang permodalan sangat rawan dengan adanya penyimpangan. Untuk itu perlu informasi yang lengkap agar masyarakat mampu mengarahkan bantuan tersebut agar lebih bermanfaat bagi keluarganya.

Tabel V.23
Informasi bidang permodalan diberikan lengkap

No	Kejelasan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat lengkap	8	10,7
2	Lengkap	48	64
3	Tidak lengkap	16	21,3
4	Sangat tidak lengkap	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.17

Hasil jawaban responden mengenai informasi bidang permodalan diberikan lengkap didukung oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden menyatakan lengkap sebanyak 64%, 10,7% sangat lengkap; 21,3% tidak lengkap dan 4% sangat tidak lengkap. Pada kenyataan meski mereka menerima informasi seluk beluk permodalan dengan lengkap peluang untuk “ngemplang” masih amat besar. Menurut warga penerima bantuan, kecenderungan ngemplang karena disebabkan kurangnya kemauan warga untuk tidak mengalami kesulitan dalam berusaha. Etos kerja tidak tumbuh apalagi sebagian dari warga penerima bantuan berpendapat jika bantuan tidak harus dikembalikan. Kebiasaan mendapat beragam bentuk program menyebabkan warga penerima bantuan cenderung pragmatis menganggap mudah perlakuan bantuan yang diberikan.

Umpan balik

- j. Sebuah umpan balik yang diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat bisa dijadikan sebuah evaluasi sehingga kendala-kendala yang terjadi di lapangan mampu diperbaiki dengan cepat.

Tabel V.24
Pelaksana mampu mengelola masukan tentang permodalan

No	Umpan Balik	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat mampu	3	4
2	Mampu	47	62,7
3	Tidak mampu	22	29,3
4	Sangat tidak mampu	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.18

Sebagian responden menyatakan bahwa pelaksana mampu mengelola masukan tentang permodalan. Ini ditunjukkan pada hasil jawaban bahwa sebanyak 62,7% menyatakan mampu; 4% sangat mampu; 29,3% tidak mampu dan 4% sangat tidak mampu. Ketidakmampuan dalam mengelola permodalan menyebabkan bantuan yang diberikan kurang diperlakukan sebagaimana mestinya. Meski diberi pelatihan berkali-kali, namun mereka cenderung berpendapat pelatihan kurang memberi bekal keterampilan pada warga penerima bantuan. Alasannya yang dikemukakan pelatihan sukar ditangkap, bahasa yang digunakan cenderung muluk-muluk, dan waktu pelatihan kurang tepat.

- k. Dari kendala-kendala yang diterima tersebut, ada titik lanjut, dimana pelaksana memberi pemecahan masalah secara sederhana tetapi jelas sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan mereka tidak merasa kesulitan dalam melaksanakannya.

Tabel V.25
Setelah mendapat penjelasan, mampu memecahkan masalah permodalan

No	Umpan Balik	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat mampu	7	9,3
2	Mampu	37	49,3
3	Tidak mampu	27	36
4	Sangat tidak mampu	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.19

Mengenai keyakinan responden dalam memecahkan masalah permodalan ditunjukkan dengan jawaban sebagai berikut : 49,3% mampu; 9,3% sangat mampu; 36% tidak mampu dan 5,3% sangat tidak mampu. Alasan responden menyatakan mampu memecahkan masalah ialah karena masalah-masalah yang dihadapi tidaklah sulit. Masalah yang dihadapi sebenarnya bisa dipecahkan selama warga penerima bantuan mempunyai kemampuan untuk memecahkannya. Warga penerima bantuan biasanya mengadukan masalah yang dihadapi kepada tokoh masyarakat, pekerja sosial pendamping dan panitia program.

Demikian telah disajikan tabel-tabel yang menggambarkan item-item yang mewakili indicator variabel komunikasi program. Selanjutnya untuk mengklasifikasikan nilai-nilai dari variabel tersebut maka digunakan rumus :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

- I : Interval kelas
- R : Skor tertinggi – skor terendah
- K : jumlah kelas

Maka diperoleh :

$$I = \frac{43 - 14}{4} = 7,25$$

Dengan demikian diperoleh klasifikasi skor variabel komunikasi masyarakat penerima program pengentasan kemiskinan sebagai berikut :

43 – 35,75	:	tinggi
35,74 – 28,5	:	cukup tinggi
28,49 – 21,25	:	kurang tinggi
21,24 - 14	:	tidak tinggi

Selanjutnya, klasifikasi nilai-nilai diatas menjadi dasara penggolongan dari jawaban responden yang menghasilkan jawaban sebagai berikut :

Tabel V.26
Kategori penilaian variabel komunikasi

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Tinggi	3	4
2	Cukup tinggi	49	65,3
3	Kurang tinggi	21	28
4	Tidak tinggi	2	2,7
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.9-19

4. Sikap (X2)

Kemampuan intelektual

- Tingkat pengetahuan yang dimiliki pelaksana sangat berpengaruh bagi masyarakat yang didampingi. Setidaknya, pelaksana mampu menerima masalah dan mampu menindaklanjutinya dengan memberi alternatif pemecahan. Maka pendampingan dari pelaksana dirasa berhasil.

Tabel V.27
Tingkat pengetahuan pelaksana memadai untuk bidang permodalan

No	Kemampuan Intelektual	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat memadai	6	8
2	Memadai	43	57,3
3	Tidak memadai	23	30,7
4	Sangat tidak memadai	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.20

Jawaban responden mengenai tingkat pengetahuan pelaksana memadai untuk bidang permodalan diperlihatkan pada tabel diatas dengan hasil : sebanyak 57,3% responden menyatakan pengetahuan pelaksana memadai; 8% sangat memadai; 30,7% tidak memadai dan 4% sangat tidak memadai. Warga penerima bantuan mengatakan keteladanan dari pelaksana sangat diperlukan. Dalam kegiatan semacam ini, contoh dari pelaksana diperlukan karena warga mempunyai figur yang bisa dicontoh. Kalau pelaksanaanya tertib, maka warga binaan yang dilayani juga cenderung tertib.

- b. Bidang permodalan sangat membutuhkan pendampingan yang profesional, karena berkaitan dengan dana dan peningkatan hidup masyarakat yang didampingi. Untuk itu, kemampuan pelaksana juga diukur dalam penelitian ini.

Tabel V.28
Kemampuan pelaksana dalam menangani bidang permodalan

No	Kemampuan Intelektual	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat mampu	3	4
2	Mampu	46	61,3
3	Tidak mampu	22	29,3
4	Sangat tidak mampu	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.21

Hasil jawaban responden mengenai kemampuan pelaksana dalam menangani bidang permodalan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian

besar responden menyatakan sebanyak 61,3% mampu; 4% sangat mampu; 29,3% tidak mampu dan 5,3% sangat tidak mampu. Bantuan permodalan tidak akan berjalan dengan baik selama pelaksana dan pendamping tidak saling bekerjasama dan berkoordinasi satu dengan yang lain. Pendamping diperlukan untuk menunjukkan jalan, sejauh mana program diarahkan dan hendak dilaksanakan.

Kemampuan interaksi

- c. Interaksi yang cepat dan tanggap sangat diperlukan agar proses pendampingan menjadi lancar dan berkembang ke arah yang positif. Pemahaman terhadap bidang yang dikerjakan (bidang permodalan) menjadi prioritas utama yang harus dimiliki pelaksana. Bagaimana mungkin keberhasilan bisa tercapai dalam kondisi pelaksana memiliki pemahaman terhadap bidang yang dijalankan.

Tabel V.29
Kemampuan pelaksana dalam memahami tugas di bidang permodalan

No	Kemampuan Interaksi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat paham	8	10,7
2	Paham	44	58,7
3	Tidak paham	17	22,7
4	Sangat tidak paham	6	8
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.22

Tampak pada hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebanyak 58,7% menyatakan paham; 10,7% menyatakan sangat paham; 22,7% menyatakan tidak paham dan sisanya yaitu sebanyak 8% menyatakan sangat tidak paham.

- d. Banyak factor penunjang keberhasilan, salah satunya adalah adanya kerjasama antara pelaksana dengan masyarakat yang didampinginya.

Tabel V.30
Pelaksana mampu bekerjasama dengan masyarakat

No	Kemampuan Interaksi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat mampu	7	9,3
2	Mampu	34	45,3
3	Tidak mampu	30	40
4	Sangat tidak mampu	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.23

Dalam hal kemampuan pelaksana dalam bekerjasama dengan masyarakat mendapat tanggapan sebagai berikut : 45,3% menyatakan mampu; 9,3% sangat mampu; 40% tidak mampu dan 5,3 sangat tidak mampu. Menurut responden, pelaksana program memiliki sifat mudah bergaul, sehingga mereka menerima dengan baik dan mampu bekerjasama dengan mereka. Pengentasan kemiskinan erat berkaitan dengan etos kerja yang dibangun warga binaan sendiri. Jika etos kerja yang dibangun positif dan mengarah pada tujuan program yang hendak dilaksanakan sangat membantu mencapai tujuan.

- e. Sifat pelayanan harus dimiliki oleh seorang pelaksana, dan kemampuan melayani juga diukur dalam penelitian ini.

Tabel V.31
Pelaksana mampu menjadi pelayan masyarakat yang baik

No	Kemampuan Interaksi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat mampu	7	9,3
2	Mampu	41	54,7
3	Tidak mampu	24	32
4	Sangat tidak mampu	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.24

Hasil jawaban responden dalam melihat kemampuan pelaksana menjadi pelayan masyarakat yang baik menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden menyatakan, sebanyak 54,7% mampu; 9,3% sangat mampu;

32% tidak mampu dan 4% sangat tidak mampu. Sebagai alasannya adalah bahwa pelaksana selalu merespon kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, dengan memberi jalan keluar bagi kesulitan mereka. Cepat tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat merupakan salah satu cara membangun kepercayaan dari masyarakat. Penundaan terhadap penyelesaian masalah dianggap pendamping atau penanggung jawab tidak serius. Jika berlarut-larut masalah-masalah yang ada tidak diatasi, warga penerima bantuan pelan-pelan akan luntur kepercayaan.

Kemampuan administrasi

- f. Prosedur sebuah program penting untuk kelancaran jalannya program itu sendiri. Apabila pelaksana secara konsisten melaksanakan prosedur administrasi dengan baik, maka dianggap pelaksana mampu menjalankan program tersebut.

Tabel V.32
Pelaksana mampu melaksanakan prosedur administratif

No	Kemampuan administrasi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat mampu	7	9,3
2	Mampu	42	56
3	Tidak mampu	22	29,3
4	Sangat tidak mampu	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.25

Dalam memandang kemampuan pelaksana melaksanakan prosedur administrative, responden menyatakan : 56% pelaksana mampu melakukannya; 9,3% sangat mampu; 29,3% tidak mampu dan 5,3% sangat tidak mampu. Hal ini tampak pada pelayanan di bidang administrasi yang cukup cepat dan sederhana dalam prosedur. Penanggulangan kemiskinan akan dipandang berhasil jika administrasi tertib dilakukan. Dengan administrasi yang tertib akan mempermudah dalam pemeriksaan dan auditor hingga

kontrol lebih mudah bisa dilaksanakan. Warga penerima bantuan mengeluhkan terlalu banyaknya prosedur administrasi yang harus dilalui sehingga menyita waktu kerjanya. Warga penerima menyarankan prosedur penerimaan bantuan lebih disederhanakan dan mudah dilaksanakan.

- g. Ketertiban membawa kemudahan dalam menjalankan program permodalan.

Tabel V.33
Pelaksana tertib dalam pembuatan laporan permodalan

No	Kemampuan administrasi	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat tertib	6	8
2	Tertib	44	58,7
3	Tidak tertib	22	29,3
4	Sangat tidak tertib	3	4
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.26

Tampak pada hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebanyak 58,7% menyatakan tertib; 8% menyatakan sangat tertib; 29,3% menyatakan tidak tertib dan sisanya yaitu sebanyak 4% menyatakan sama sekali tidak tertib. Ini dibuktikan dengan setiap minggu ada evaluasi dan laporan rutin yang diminta oleh pelaksana untuk diolah kembali. Warga penerima bantuan tidak mau terlalu sering berkumpul karena dengan terlalu banyak berkumpul menyebabkan waktu untuk bekerja dan mengembangkan usaha berkurang. Kondisi ini bisa dimaklumi karena warga miskin penerima bantuan akan merasa boros waktu ketika terlalu banyak berkumpul, meski disadari kegiatan semacam ini juga bermanfaat untuk pengembangan dirinya.

Demikian telah disajikan tabel-tabel yang menggambarkan item-item yang mewakili indikator variabel sikap. Selanjutnya untuk mengklasifikasikan nilai-nilai dari variabel tersebut maka digunakan rumus :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

I : Interval kelas

R : Skor tertinggi – skor terendah

K : jumlah kelas

Maka diperoleh :

$$I = \frac{26 - 8}{4} = 4,5$$

Dengan demikian diperoleh klasifikasi skor variabel sikap masyarakat penerima program pengentasan kemiskinan sebagai berikut :

26 – 21,5	:	tinggi
21,49 - 17	:	cukup tinggi
16,99 – 12,5	:	kurang tinggi
12,49 - 8	:	tidak tinggi

Selanjutnya, klasifikasi nilai-nilai diatas menjadi dasar penggolongan dari jawaban responden yang menghasilkan jawaban sebagai berikut :

Tabel V.34
Ketegori penilaian variabel sikap

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Tinggi	4	5,3
2	Cukup tinggi	64	85,4
3	Kurang tinggi	6	8
4	Tidak tinggi	1	1,3
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.20-27

5. Sumber-sumber (X3)

Informasi dalam program pengentasan kemiskinan

- a. Sumber-sumber dianggap sebagai salah satu factor yang mempengaruhi implementasi program pengentasan kemiskinan di bidang permodalan. Salah satu bagian dari sumber-sumber adalah informasi dalam program pengentasan kemiskinan. Untuk itu tingkat pendidikan dari pelaksana diperlukan sebagai penunjang kelancaran bidang permodalan.

Tabel V.35
Tingkat pendidikan pelaksana memadai untuk bidang permodalan

No	Inform. dlm Program	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat memadai	4	5,3
2	Memadai	42	56
3	Tidak memadai	25	33,3
4	Sangat tidak memadai	4	5,3
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.27

Hasil jawaban responden mengenai tingkat pendidikan pelaksana memadai untuk bidang permodalan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden menjawab : sebanyak 56% menyatakan memadai; 5,3% sangat memadai; 33,3% tidak memadai dan 5,3% sangat tidak memadai. Beberapa pelaksana memiliki

pendidikan setingkat sarjana, selain itu mereka juga memiliki pengalaman dalam menangani kegiatan bidang permodalan. Tingkat pendidikan tidak berkaitan langsung dengan profesionalitas dalam manajemen permodalan. Terbukti meski pengetahuan warga penerima bantuan tidak tinggi namun dengan latihan dan mau terus-menerus belajar program dapat dijalankan dengan baik. Yang menjadi kunci dalam menjalankan usaha permodalan adalah kemauan berusaha dan kesungguhan dalam proses belajar.

- b. Selain pendidikan formal, pendidikan non-formalpun dapat dijadikan tambahan dalam meningkatkan kinerja pelaksana program.

Tabel V.36
Pelaksana mengikuti pendidikan non-formal di bidang permodalan

No	Inform. dlm Program	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat banyak	9	12
2	Banyak	48	64
3	Tidak banyak	14	18,7
4	Sangat tidak banyak	4	5,3
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.28

Mengenai pelaksana mengikuti pendidikan non-formal di bidang permodalan mendapat jawaban sebagai berikut : 64% menyatakan banyak; 12% menyatakan sangat banyak; 18,7% tidak banyak dan 5,3% menyatakan sangat tidak banyak. Pendidikan non-formal seperti ilmu ketrampilan dimiliki juga oleh beberapa pelaksana, sehingga masyarakat mendapat tambahan pengetahuan dari pelaksana. Kursus-kursus yang pernah dijalani para warga penerima bantuan modal sebelum mendapat paket-paket bantuan terbukti amat membantu. Bagi warga penerima bantuan yang sebelumnya mengelola koperasi atau arisan mempermudah dalam mengelola keuangan. Karena sebenarnya tidak ada beda jauh antara manajemen keuangan permodalan dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga.

- c. Dengan pendidikan yang dimiliki, diharapkan pelaksana mampu memahami bidang yang ditanganinya, yaitu bidang permodalan.

Tabel V.37
Pelaksana paham dengan bidang permodalan

No	Inform. dlm Program	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat paham	7	9,3
2	Paham	38	50,7
3	Tidak paham	26	34,7
4	Sangat tidak paham	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.29

Hasil jawaban mengenai pelaksana memahami bidang permodalan menunjukkan 50,7% responden menyatakan paham; 9,3% sangat paham; 34,7% tidak paham dan 5,3% sangat tidak paham. Sebagai bukti : pelaksana mampu membantu pemecahan masalah tentang permodalan, seperti jaringan kerja untuk menyalurkan hasil usaha. Warga penerima bantuan permodalan mengatakan makin sering dan terlatih dalam beraneka ragam kegiatan permodalan membuat peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Semakin sering berhadapan dengan masalah-masalah yang berbeda-beda menyebabkan terbiasa memecahkan masalah dan mempunyai strategi pemecahan masalah yang sama.

- d. Pelaksana yang menguasai materi sosialisasi program pengentasan kemiskinan bidang permodalan dengan baik, akan mampu menyalurkan informasi tersebut kepada masyarakat.

Tabel V.38
Pelaksana menguasai materi sosialisasi bidang permodalan

No.	Fasilitas	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat paham	7	9,3
2	Paham	42	56
3	Tidak paham	23	30,7
4	Sangat tidak paham	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.30

Dalam hal pelaksana menguasai materi sosialisasi bidang permodalan, mendapat tanggapan dari responden sebanyak : 56% menyatakan paham; 9,3% sangat paham; 30,7% tidak paham dan 4% sangat tidak paham. Setiap minggu sekali ada informasi baru hasil dari evaluasi, hal ini menunjukkan bahwa pelaksana menguasai materi bidang permodalan. Bentuk sosialisasi dengan permainan ternyata lebih mudah membantu masyarakat penerima bantuan modal bekerja. Dengan pelatihan yang menarik lebih mudah nyantol di benak mereka ketimbang metode ceramah yang membosankan.

Kecakapan/ketrampilan

- e. Kecakapan/ketrampilan menjadi bagian dari keahlian pelaksana program. Apabila pelaksana program cakap/trampil, kemungkinan halangan dalam melaksanakan program tersebut kecil.

Tabel dibawah ini menunjukkan penilaian responden terhadap ketrampilan pelaksana dalam memberi contoh di bidang permodalan.

Tabel V.39
Pelaksana trampil dalam memberi contoh di bidang permodalan

No	Kecakapan/ketrampilan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat terampil	8	10,7
2	Terampil	40	53,3
3	Tidak terampil	23	30,7
4	Sangat tidak terampil	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.31

Pertanyaan mengenai pelaksana yang trampil dalam memberi contoh di bidang permodalan mendapat tanggapan sebagai 53,3 menyatakan tidak terampil dan 5,3% menyatakan sangat tidak terampil. Dalam kegiatan bantuan permodalan peran contoh dari

pendamping sangat penting. Karena pendamping yang bisa memberi contoh dengan benar memungkinkan warga penerima bantuan mencontoh cara kerja yang benar.

- f. Tabel dibawah ini menunjukkan kecakapan pelaksana dalam menjalankan bidang permodalan.

Tabel V.40
Pelaksana cakap dalam menjalankan bidang permodalan

No	Kecakapan/ketrampilan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat cakap	8	10,7
2	Cakap	41	54,7
3	Tidak cakap	22	29,3
4	Sangat tidak cakap	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.32

Hasil jawaban responden mengenai pelaksana cakap dalam menjalankan bidang permodalan menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana sebagian besar responden menyatakan sebanyak 54,7% pelaksana cakap dalam menjalankan permodalan; 10,7% sangat cakap; 29,3% tidak cakap dan 5,3% sangat tidak cakap. Hal ini ditunjukkan pada ketrampilan dalam memahami permasalahan masyarakat. Warga penerima bantuan permodalan memerlukan perlakuan khusus. Warga adalah unik dan memerlukan perlakuan khusus pula. Setiap perlakuan yang berbeda dan sesuai dengan kondisi warga akan membentuk sentuhan khas baginya.

- g. Ketelitian pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang permodalan juga berpengaruh bagi keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

Tabel V.41
Ketelitian pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang permodalan

No.	Kecakapan/ketrampilan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat teliti	6	8
2	Teliti	43	57,3
3	Tidak teliti	22	29,3
4	Sangat tidak teliti	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.33

Jawaban atas pertanyaan no. 33 memperlihatkan bahwa 57,3% responden menyatakan bahwa pelaksana teliti dalam melaksanakan kegiatan di bidang permodalan; 8% sangat teliti; 29,3% tidak teliti dan 5,3% sangat tidak teliti. Sebagai buktinya : pelaksana selalu mematuhi peraturan dan secara tertib menjalankannya. Dengan tertib warga penerima bantuan tidak mau disalahkan oleh pihak lain.

Wawasan yang dimiliki

- h. Dalam menyeleksi penerima program, diharapkan pelaksana program memiliki wawasan yang luas sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Tabel V.42
Pelaksana memiliki wawasan yang luas dalam seleksi

No	Wawasan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat luas	8	10,7
2	Luas	44	58,7
3	Tidak luas	20	26,7
4	Sangat tidak luas	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.34

Hasil jawaban responden mengenai pelaksana memiliki wawasan yang luas dalam seleksi menunjukkan arah yang positif. Hal ini tampak pada tabel dimana 58,7% responden menyatakan pelaksana memiliki wawasan yang luas; 10,7% sangat luas; 26,7% tidak luas dan 4% sangat tidak luas. Penyeleksian dilakukan dalam beberapa tahap sebelum modal

digulirkan. Ini dilakukan untuk ketepatan dalam memberi modal usaha. Semakin luas wawasan yang dipunyai makin banyak kesempatan mempertimbangkan beragam alternatif yang diperlukan.

- i. Setelah mengukur wawasan pelaksana dalam menyeleksi penerima program. Tindak lanjut berikutnya adalah mengukur wawasan pelaksana tentang ketepatan dalam menentukan penerima bantuan. Hasil dari responden menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel V.43
Pelaksana memiliki wawasan tentang ketepatan penerima bantuan

No	Wawasan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat akurat	5	6,7
2	Akurat	40	53,3
3	Tidak akurat	25	33,3
4	Sangat tidak akurat	5	6,7
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.35

Hasil jawaban responden di atas menunjukkan bahwa 53,3% responden menyatakan pelaksana memiliki wawasan tentang ketepatan penerima bantuan secara akurat; 6,7% menyatakan sangat akurat; 33,3% tidak akurat dan 6,7% sangat tidak akurat. Dengan melakukan beberapa tahap seleksi, pelaksana memiliki informasi lebih akurat tentang calon penerima bantuan. Dijelaskan oleh warga binaan, harus didukung dengan kemampuan menyeleksi calon penerima bantuan dengan akurat. Jika tidak sangat mungkin warga binaan menyembunyikan informasi mengenai kondisi senyatanya sehingga salah sasaran.

- j. Pengukuran mengenai wawasan tentang deviasi penggunaan bantuan yang dimiliki oleh pelaksana dijawab oleh responden sebagai berikut :

Tabel V.44
Pelaksana memiliki wawasan tentang deviasi penggunaan bantuan

No.	Wawasan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat lengkap	10	13,3
2	Lengkap	47	62,7
3	Tidak lengkap	14	18,7
4	Sangat tidak lengkap	4	5,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.36

Dalam hal pelaksana memiliki wawasan tentang deviasi penggunaan bantuan, 62,7% responden menyatakan lengkap; 13,3% sangat lengkap; 18,7% tidak lengkap dan 5,3% sangat tidak lengkap. Penyimpangan bantuan tidaklah kelihatan dengan mudah. Dan biasanya terjadi karena kebiasaan dari warga penerima bantuan yang kurang teliti dan hati-hati. Semakin tidak terdeteksi dalam penyimpangan yang terjadi lama-kelamaan akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

- k. Banyak hal yang mungkin terjadi di dalam masyarakat ketika mereka menerima bantuan permodalan. Pelaksana harus cepat tanggap menghadapi perubahan-perubahan tersebut dengan mencari alternatif jawaban dari setiap halangan yang terjadi yang dapat menyebabkan kemacetan dalam permodalan.

Tabel V.45
Pelaksana memiliki alternatif pemecahan masalah permodalan

No	Wawasan	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat lengkap	6	8
2	Lengkap	38	50,7
3	Tidak lengkap	26	34,7
4	Sangat tidak lengkap	5	6,7
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.37

Hasil jawaban responden mengenai pelaksana memiliki alternatif pemecahan masalah permodalan menunjukkan sebanyak 50,7% menyatakan lengkap; 8% sangat lengkap;

34,7% tidak lengkap dan 6,7% sangat tidak lengkap. Makin cepat masalah diatasi maka kemungkinan masalah menjadi besar dan meluas makin kecil. Dalam hal ini, warga penerima bantuan mengusulkan ada tempat mengadakan masalah-masalah yang dihadapi agar dapat ditangani dengan cepat.

Fasilitas

- i. Fasilitas menjadi alat penunjang keberhasilan suatu program. Untuk itu layak menjadi bagian dari penelitian ini. Salah satu fasilitas yang dimaksudkan disini adalah sarana yang tersedia apakah dirasa telah memadai atau belum memadai.

Tabel V.46
Sarana yang tersedia memadai

No	Fasilitas	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat memadai	7	9,3
2	Memadai	42	56
3	Tidak memadai	23	30,7
4	Sangat tidak memadai	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.38

Mengenai ketersediaan sarana, responden menyatakan : sebanyak 56% responden menyatakan memadai; 9,3% menyatakan sangat memadai; 30,7% menyatakan tidak memadai dan sisanya yaitu sebanyak 4% menyatakan sangat tidak memadai. Adanya tempat pertemuan dan alat peraga yang lengkap menjadi alat informasi yang memadai untuk kelancaran program pengentasan kemiskinan.

m. Dengan adanya sarana, selama program berjalan apakah telah dipergunakan secara optimal atau belum, juga menjadi bagian dari penelitian ini. Dan hasil yang diberikan responden adalah sebagai berikut :

Tabel V.47
Sarana yang tersedia dipergunakan secara optimal

No.	fasilitas	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat optimal	8	10,7
2	Optimal	43	57,3
3	Tidak optimal	21	28
4	Sangat tidak optimal	3	4
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.39

Keoptimalan penggunaan sarana mendapat tanggapan sebagai berikut : sebanyak 57,3% responden menyatakan optimal; 10,7% menyatakan sangat optimal; 28% menyatakan tidak optimal dan sisanya yaitu sebanyak 4% menyatakan sangat tidak optimal. Ini dibuktikan dengan digunakannya balai pertemuan setiap minggu sekali untuk pertemuan rutin.

n. Tidak hanya sarana pokok saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu program, tetapi sarana pendukungpun juga mempengaruhi keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

Tabel V.48
Kemudahan dalam mendapat sarana pendukung

No.	fasilitas	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat mudah	6	8
2	Mudah	41	54,7
3	Tidak mudah	23	30,7
4	Sangat tidak mudah	5	6,7
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.40

Mengenai kemudahan mendapatkan sarana pendukung mendapat jawaban : 54,7% responden menyatakan mudah; 8% menyatakan sangat mudah; 30,7% menyatakan tidak

mudah dan 6,7% menyatakan sangat tidak mudah. Sarana pendukung seperti alat tulis, alat dokumentasi (kamera) untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan digunakan dengan maksimal pula.

Demikian telah disajikan tabel-tabel yang menggambarkan item-item yang mewakili indikator variabel sumber-sumber program. Selanjutnya untuk mengklasifikasikan nilai-nilai dari variabel tersebut maka digunakan rumus :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

- I : Interval kelas
- R : Skor tertinggi – skor terendah
- K : jumlah kelas

Maka diperoleh :

$$I = \frac{52 - 19}{4} = 8,25$$

Dengan demikian diperoleh klasifikasi skor variabel sumber-sumber program pengentasan kemiskinan sebagai berikut :

- 52 – 43,75 : tinggi
- 43,74 - 35,5 : cukup tinggi
- 35,49 – 27,25 : kurang tinggi
- 27,25 - 19 : tidak tinggi

Selanjutnya, klasifikasi nilai-nilai diatas menjadi dasar penggolongan dari jawaban responden yang menghasilkan jawaban sebagai berikut :

Tabel V.49
Kategori penilaian variabel sumber-sumber

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Tinggi	5	6,6
2	Cukup tinggi	52	69,4
3	Kurang tinggi	17	22,7
4	Tidak tinggi	1	1,3
	Jumlah	75	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan bagian II, no.28-40

BAB VI

PENGUJIAN HIPOTESA

Pada bagian depan telah disajikan data-data dalam bentuk tabel tunggal atau tabel frekuensi untuk masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya akan disajikan data-data dalam bentuk tabel silang yang menghubungkan antar variabel penelitian. Analisis tabel silang ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan secara kualitatif sebelum melangkah lebih lanjut pada bagian pengujian hipotesis antara kuantitatif dengan menggunakan rumus statistik.

Dalam penelitian ini penulis mengajukan variabel bebas yaitu yang pertama komunikasi (X1), variabel bebas kedua yaitu sikap (X2) dan variabel bebas ketiga adalah sumber-sumber (X3), sedangkan variabel terikatnya adalah implementasi program pengentasan kemiskinan (Y). setiap variabel bebas tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis sebagai berikut :

1. Ada pengaruh positif antara komunikasi dengan implementasi program pengentasan kemiskinan
2. Ada pengaruh positif antara variabel sikap dengan implementasi program pengentasan kemiskinan
3. Ada pengaruh positif antara variabel sumber-sumber dengan implementasi program pengentasan kemiskinan
4. Ada pengaruh positif antara variabel komunikasi, sikap dan sumber-sumber dengan implementasi program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini akan disajikan beberapa tabel silang dan perhitungan statistik untuk pengujian hipotesis yang telah diajukan. Tabel silang ini dibuat berdasarkan kategori variabel komunikasi dengan kategori variabel implementasi program pengentasan kemiskinan, kategori variabel sikap dengan kategori variabel implementasi program pengentasan kemiskinan, dan kategori variabel sumber-sumber dengan kategori variabel implementasi program pengentasan kemiskinan.

A. Pengaruh Komunikasi (X₁) Terhadap Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Y)

Untuk melihat ketepatan komunikasi yang diberikan pada masyarakat Sendangguwo yang menerima bantuan program pengentasan kemiskinan, maka perlu adanya komunikasi yang efektif sehingga tidak salah sasaran. Salah satu bukti komunikasi yang efektif adalah keberhasilan pekerja sosial dalam memberi informasi yang jelas sehingga menarik kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung dalam program pengentasan kemiskinan tersebut. Sebagai alat pengukur digunakan tabel silang yang menghubungkan antara komunikasi dengan implementasi program pengentasan kemiskinan.

**Tabel VI.1
Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan**

		X ₁				Total
		4 (T)	3 (CT)	2(KT)	1(TT)	
NO Y	4 (T)		3			3
	%		6,25%			4.0%
	3 (CT)	1	38	17	2	58
	%	35%	79,25%	77,27%	100%	77.3%
	2 (KT)	2	6	5		13
	%	75%	12,5%	22,73%		17,3%
	1 (TT)		1			1
	%		2%			1.3%
Total		3	48	22	2	75
		100%	100%	100%	100%	100%

Dianalisis dari tabel silang tabel silang

Keterangan :

- T : Tinggi
 CT : Cukup Tinggi
 KT : Kurang Tinggi
 TT : Tidak Tinggi

Dari tabel diatas secara garis besar terlihat bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat Sendangguwo dalam program pengentasan kemiskinan cukup positif. Terbukti : 58 orang atau sebesar 77.3% menyatakan bahwa mereka cukup sadar dan paham untuk mengikuti kegiatan program pengentasan kemiskinan. Hal ini mereka lakukan karena mereka menyadari program tersebut meringankan beban mereka. Berarti ada hubungan antara komunikasi dengan implementasi program pengentasan kemiskinan.

B. Pengaruh Sikap (X₂) Terhadap Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Y)

Sikap menjadi bagian dari kelancaran program pengentasan kemiskinan. Untuk itu dibawah ini ditunjukkan pula hubungan antara sikap terhadap implementasi program pengentasan kemiskinan.

Tabel VI.2
Pengaruh Sikap Terhadap Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan

		X ₂				Total
		4 (T)	3 (CT)	2(KT)	1(TT)	
NO Y	4 (T)		3			3
	%		4,6%			4.0%
	3 (CT)	3	49	5	1	58
	%	75%	75,3%	100%	100%	77.3%
	2 (KT)	1	12			13
	%	25%	18,46%			17.3%
	1 (TT)		1			1
	%		1,64%			1.3%
Total		4	65	5	1	75
		100%	100%	100%	100%	100%

Dianalisis dari tabel silang

Keterangan :

- T : Tinggi
 CT : Cukup Tinggi
 KT : Kurang Tinggi
 TT : Tidak Tinggi

Terlihat dalam tabel diatas terjadi penguraian jawaban. Walaupun begitu, kita dapat melihat bahwa secara garis besar jawaban responden menjurus ke arah yang positif. Berarti ada hubungan antara sikap masyarakat dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Kita dapat melihat sikap mereka bahwa sebanyak 58 orang atau sebesar 77,3% menyatakan bahwa sikap mereka cukup tinggi dalam mengikuti implementasi program pengentasan kemiskinan

C. Pengaruh Sumber-sumber (X3) Terhadap Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Y)

Tabel dibawah ini juga menunjukkan pengukuran hubungan antara sumber-sumber (X3) terhadap implementasi program pengentasan kemiskinan (Y).

Tabel VI.3

Pengaruh Sumber-sumber Terhadap Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan

		X3				Total
		4 (T)	3 (CT)	2 (KT)	1 (TT)	
NO Y	4 (T)	1	1	1		3
	%	20%	1,93%	5,9%		4.0%
	3 (CT)	3	48	7		58
	%	60%	92,3%	41,2%		77.3%
	2 (KT)	1	3	8	1	13
	%	20%	5,76%	47%	100%	17.3%
	1 (TT)			1		1
	%			5,9%		1.3%
Total		5	52	17	1	75
		100%	100%	100%	100%	100%

Dianalisis dari tabel silang

Keterangan :

- T : Tinggi
- CT : Cukup Tinggi
- KT : Kurang Tinggi
- TT : Tidak Tinggi

Tabulasi silang diatas menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara antara Sumber-sumber dengan program pengentasan kemiskinan. Kita dapat melihat bahwa sebanyak 58 orang atau sebesar 77.3% menyatakan bahwa sumber-sumber merupakan variabel yang mempengaruhi implementasi program pengentasan kemiskinan. Salah satu yang berpengaruh tersebut adalah wawasan pelaksana program dalam memberi solusi bagi mereka.

Pengujian Hipotesa

Pengujian hipotesa merupakan langkah selanjutnya dalam suatu penelitian untuk membuktikan teori atau pernyataan yang diajukan. Dalam penelitian ini, hipotesa penelitian diuji untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel :

1. Komunikasi dengan Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Y)
2. Sikap (X2) dengan Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Y)
3. Sumber-sumber (X3) dengan Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Y)
4. Komunikasi (X1); Sikap (X2) dan Sumber-sumber (X3) dengan Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Y)

Dalam pengujian hipotesa digunakan rumus statistik untuk mengukur dan menguji variabel-variabel sebagai langkah awal dalam pengujian hipotesa, dan berikut ini penulis sajikan perhitungan dari tabel induk sebagai berikut :

Mengetahui

$$SX_1Y = 863$$

$$TX_1 = 285$$

$$TX1 = 957,33$$

$$SX_2Y = 878$$

$$TX_2 = 488$$

$$TX2 = 1.534,83$$

$$SX_3Y = 1.677$$

$$TX_3 = 196$$

$$TX2 = 306,67$$

$$Ty = 389$$

$$TY = 978,583$$

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel komunikasi (X1) dan variabel implementasi (Y) dan variabel sikap (X2) dan variabel implementasi (Y) serta variabel sumber-sumber (X3) dan variabel implementasi (Y) dipergunakan teknik koefisien rank kendall.

A. Pengaruh variabel komunikasi terhadap variabel implementasi

$$TX_1Y = \frac{SX_1Y}{\sqrt{1/2N(N-1) - TX_1} \cdot \sqrt{1/2N(N-1) - Ty}}$$

Dimana :

$$SX_1Y = 863$$

$$TX_1 = 285$$

$$Ty = 389$$

$$N = 75$$

Maka :

$$\begin{aligned} TX_1 Y &= \frac{863}{\sqrt{1/2 \cdot 75 (75-1) - 285} \cdot \sqrt{1/2 \cdot 75 (75-1) - 389}} \\ &= \frac{863}{\sqrt{(2.775 - 285)} \cdot \sqrt{2.775 - 389}} \\ &= \frac{863}{\sqrt{2490} \times \sqrt{2.386}} \\ &= \frac{863}{49,89 \times 48,84} \\ &= \frac{863}{2.436,62} \\ &= 0,35 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikan dari hasil diatas maka digunakan rumus

sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Z &= \frac{TX_1 Y}{\frac{2(2N+5)}{\sqrt{9N(N-1)}}} \\ &= \frac{0,35}{\frac{2(2.75)+5}{\sqrt{9 \cdot 75(75-1)}}} \\ &= \frac{0,35}{\sqrt{305/49.950}} \\ &= \frac{0,35}{\sqrt{0,0061}} \\ &= \frac{0,35}{0,078} \\ &= 4,48 \end{aligned}$$

Hasil tersebut diatas kemudian dikonsultasikan dengan harga Z tabel pada tingkat signifikansi 5% dan 1%. Pada taraf 1% diperoleh Z tabel sebesar 2,58 sedangkan pada taraf 5% diperoleh Z tabel sebesar 1,96. Jadi dapat dilihat bahwa Z hitung > Z tabel sehingga hipotesa yang mengatakan ada hubungan bantara kemampuan komunikasi dan implementasi program pengentasan kemiskinan diterima secara signifikan.

Kemudian untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel komunikasi (X1) terhadap variabel implementasi program (Y) digunakan rumus koefisien determinan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= \text{TX}_1\text{Y}^2 \times 100\% \\ &= 0,35^2 \times 100\% \\ &= 12,25\% \end{aligned}$$

Jadi besarnya sumbangan yang diberikan variabel komunikasi terhadap variabel implementasi program adalah sebesar 12,25%, sedangkan sumbangan yang diberikan variabel lainnya sebesar 87,75% dimana variabel tersebut diantaranya adalah seperti tingkat pendidikan dan bahasa pengantar.

B. Pengaruh variabel sikap terhadap variabel implementasi

$$\text{TX}_2\text{Y} = \frac{\text{SX}_2\text{Y}}{\sqrt{1/2N(N-1) - \text{TX}_2} \cdot \sqrt{1/2N(N-1) - \text{Ty}}}$$

Dimana :

$$\text{SX}_2\text{Y} = 878$$

$$\text{TX}_2 = 488$$

$$\text{Ty} = 389$$

$$N = 75$$

Maka :

$$\begin{aligned} TX_2Y &= \frac{878}{\sqrt{1/2 \cdot 75 (75-1) - 488} \cdot \sqrt{1/2 \cdot 75 (75-1) - 389}} \\ &= \frac{878}{\sqrt{(2.775 - 488)} \cdot \sqrt{2.775 - 59}} \\ &= \frac{878}{\sqrt{2.287} \times \sqrt{2.716}} \\ &= \frac{878}{47,82 \times 52,11} \\ &= \frac{878}{2.491,9} \\ &= 0,35 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikansi dari hasil diatas maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Z &= \frac{TX_2Y}{\frac{2(2N+5)}{\sqrt{9N(N-1)}}} \\ &= \frac{0,35}{\frac{2(2 \cdot 75) + 5}{\sqrt{9 \cdot 75 (75-1)}}} \\ &= \frac{0,35}{\sqrt{305/49.950}} \\ &= \frac{0,35}{\sqrt{0,0061}} \\ &= 4,48 \end{aligned}$$

Hasil tersebut diatas kemudian dikonsultasikan dengan harga Z tabel pada tingkat signifikansi 5% dan 1%. Pada taraf 1% diperoleh Z tabel sebesar 2,58 sedangkan pada taraf 5%

diperoleh Z tabel sebesar 1,96. Jadi dapat dilihat bahwa Z hitung > Z tabel sehingga hipotesa yang mengatakan ada hubungan antara sikap dan variabel implementasi program diterima secara signifikan.

Kemudian untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel sikap (X2) dengan variabel implementasi program (Y) digunakan rumus koefisien determinan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KD &= TX_2Y^2 \times 100\% \\ &= 0,35^2 \times 100\% \\ &= 12,25\% \end{aligned}$$

Jadi besarnya sumbangan yang diberikan variabel sikap terhadap variabel implementasi program adalah sebesar 12,25%, sedangkan sumbangan yang diberikan variabel lainnya sebesar 87,75% dimana variabel tersebut diantaranya adalah seperti motivasi dan pengalaman.

C. Pengaruh variable sumber-sumber terhadap variabel implementasi

$$TX_2Y = \frac{SX_3Y}{\sqrt{1/2N(N-1) - TX_3} \cdot \sqrt{1/2N(N-1) - Ty}}$$

Dimana :

$$SX_3Y = 1.677$$

$$TX_3 = 196$$

$$Ty = 389$$

$$N = 75$$

Maka :

$$TX_2Y = \frac{1.677}{\sqrt{1/2 \cdot 75(75-1) - 488} \cdot \sqrt{1/2 \cdot 75(75-1) - 389}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1.677}{\sqrt{(2.775 - 488) \cdot \sqrt{2.775 - 59}} \\
&= \frac{1.677}{\sqrt{2.287} \times \sqrt{2.716}} \\
&= \frac{1.677}{47,82 \times 52,11} \\
&= \frac{1.677}{2.491,9} \\
&= 0,67
\end{aligned}$$

Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikansi dari hasil diatas maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
Z &= \frac{TX_3Y}{\frac{2(2N+5)}{\sqrt{9N(N-1)}}} \\
&= \frac{0,67}{\frac{2(2.75)+5}{\sqrt{9.75(75-1)}}} \\
&= \frac{0,67}{\sqrt{305/49.950}} \\
&= \frac{0,67}{\sqrt{0,0061}} \\
&= \frac{0,67}{0,078} \\
&= 8,58
\end{aligned}$$

Hasil tersebut diatas kemudian dikonsultasikan dengan harga Z tabel pada tingkat signifikansi 5% dan 1%. Pada taraf 1% diperoleh Z tabel sebesar 2,58 sedangkan pada taraf 5% diperoleh Z tabel sebesar 1,96. Jadi dapat dilihat bahwa Z hitung > Z tabel sehingga hipotesa

yang mengatakan ada hubungan antara sumber-sumber dan variabel implementasi program diterima secara signifikan.

Kemudian untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel sumber-sumber (X3) dengan variabel implementasi program (Y) digunakan rumus koefisien determinan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}KD &= TX_2Y^2 \times 100\% \\ &= 0,67^2 \times 100\% \\ &= 44,89\%\end{aligned}$$

Jadi besarnya sumbangan yang diberikan variabel sumber-sumber terhadap variabel implementasi program adalah sebesar 44,89%, sedangkan sumbangan yang diberikan variabel lainnya sebesar 55,11% dimana variabel tersebut diantaranya adalah seperti disiplin dan kinerja pegawai.

D. Pengaruh Variabel komunikasi; Sikap dan Sumber-Sumber terhadap Variabel Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada kaitan antara komunikasi dan sikap terhadap implementasi program dilakukan dengan menggunakan rumus Koefisien Konkordasi Kendall sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{1/12.k^2 \cdot (N^3 - N) - k \Sigma T}$$

Dimana :

$$S = 196.777$$

$$\Sigma T = 3.777,41$$

maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut :

$$W = 196.777$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1/12.4^2 \cdot (75^3 - 75) - 3 \cdot (3.777,41)}{1/12.16 (421.875 - 75) - 11.332,23} \\
= & \frac{196.777}{1/12.(6.750.000) - 471,51} \\
= & \frac{196.777}{562.028,49} \\
= & 0,35
\end{aligned}$$

Kemudian untuk uji signifikansi W, dapat digunakan dengan nilai X^2 melalui rumus

Chi Kuadrat sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
X^2 &= 4.(N - 1).W \\
&= 3.(74) . 0,35 \\
&= 222 \times 0,35 \\
&= 77,7
\end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan terhadap kritik chi square (kritik tabel) dengan db = N-1. Pada tabel harga kritik diketahui bahwa taraf signifikansi menunjukkan angka 40. Berdasarkan pada taraf signifikan tersebut terlihat bahwa nilai $X^2 = 77,7$ lebih besar dari db, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara komunikasi (X1); sikap (X2) dan sumber-sumber (X3) terhadap implementasi program (Y) adalah signifikan.

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui melalui rumus Koefisien Determinan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
KD &= W^2 \times 100\% \\
&= 0,35^2 \times 100\% \\
&= 12,25\%
\end{aligned}$$

Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi berubah sebesar 12,25% akibat adanya pengaruh komunikasi; sikap dan sumber-sumber dan sisanya sebesar 84,75% dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur birokrasi.

E. PEMBAHASAN

Dengan demikian hasil analisa yang telah penulis uraikan tersebut diatas, jika dilakukan kesesuaian antara teori dan hasil penghitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi terhadap implementasi

Salah satu unsur yang menjadikan komunikasi efektif terhadap implementasi program adalah kemampuan pekerja sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Komunikasi, dalam hal ini dikaitkan dengan informasi yang jelas, lengkap dan sederhana mendapat respon yang cukup tinggi. Terlihat dari hasil penyilangan antara implementasi program dengan komunikasi menunjukkan nilai sebesar 50,7% (Tabel VI.1)

Secara kumulatif, variabel komunikasi memberi sumbangan sebesar 12,25% diantara variabel lain, seperti tingkat pendidikan dan bahasa pengantar. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat peran komunikasi amat penting. Dalam pelaksanaan di lapangan, komunikasi terutama pada saat sosialisasi program bantuan sangat diperlukan. Jika warga penerima bantuan permodalan mengetahui dengan persis program mana yang hendak dijalankan, serta tahu bagaimana melaksanakan program itu maka warga binaan mudah diarahkan guna mencapai tujuan. Dalam komunikasi tidak lepas dari peran pekerja sosial dan aparat pemerintah tingkat bawah seperti RT/RW, Kelurahan, pekerja sosial, sehingga warga binaan memperoleh informasi dengan jelas.

2. Sikap terhadap implementasi

Pengukuran sikap berhubungan langsung dengan interaksi seseorang terhadap lingkungan. Termasuk dalam program ini, sikap diukur untuk melihat sejauh kemampuan pelaksana program dalam merespon kebutuhan masyarakat dilingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :

Ada hubungan antara kemampuan pelaksana program dengan implementasi program. Sebesar 65,3% (Tabel VI.2) memberi penilaian cukup tinggi terhadap unsur-unsur sikap yang diteliti.

Secara kumulatif, variabel sikap memberi sumbangan sebesar 12,25% diantara variabel lain (motivasi dan pengalaman) untuk kelancaran program pengentasan kemiskinan. Terbentuknya perilaku tertentu yang mendukung pelaksanaan program sangat penting. Dalam penelitian ini terbentuknya perilaku tertentu yang tercermin dalam aspek intelektual, interaksi dan administrasi mencerminkan jika sikap terbentuk karena warga penerima bantuan mendapatkan informasi yang memadai. Terbentuknya sikap karena warga binaan terdorong untuk melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan arahan guna mencapai tujuan.

3. Sumber-sumber terhadap implementasi

Sumber-sumber memiliki peranan yang cukup besar dalam implementasi program pengentasan ini. Terbukti dengan hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebesar 64,0% (Tabel VI.3) mengakui bahwa sumber-sumber memiliki peran yang cukup tinggi bagi responden.

Secara kumulatif, variabel sumber-sumber memberi sumbangan sebesar 44,89% diantara variabel lain (seperti disiplin dan kinerja pegawai) untuk kelancaran program pengentasan

kemiskinan. Pentingnya sumber sangat penting diperhitungkan dalam program pengentasan kemiskinan.

4. Pengaruh komunikasi ; sikap dan sumber-sumber terhadap implementasi program pengentasan kemiskinan.

Untuk sumbangan yang diberikan variabel komunikasi ; sikap dan sumber-sumber terhadap implementasi program adalah sebesar 12,25%, dan sisanya sebesar 84,75% dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur birokrasi.

BAB VII

PENUTUP

Dari analisis data dan pengujian hipotesis, penulis mencoba merumuskan kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai komunikasi, sikap, sumber-sumber terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan

A. Kesimpulan

1. Ada pengaruh antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi program pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan uji hipotesa signifikan yaitu Z hitung $>$ Z tabel atau $4,48 > 2,58$ pada taraf signifikan 1%. Hal ini berarti keberhasilan implementasi program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam berkomunikasi antara pemberi program, masyarakat dampingan dan sosialisasi sebelum program dilaksanakan. Kejelasan informasi dan kemampuan dalam berkomunikasi sangat menentukan pemahaman masyarakat dampingan.
2. Ada pengaruh antara variabel sikap dengan variabel implementasi program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan uji hipotesa dapat disimpulkan signifikan karena harga Z hitung setelah dibandingkan dengan Z tabel pada taraf signifikan 1% diperoleh angka $4,48 > 2,58$. Dengan demikian Z hitung $>$ Z tabel. Hal ini berarti, penanggulangan kemiskinan dikatakan berhasil ketika terjadi perubahan sikap positif yang mendukung program-program yang dilaksanakan. Perubahan perilaku positif seperti kemauan bekerja keras, berusaha, mandiri merupakan salah satu buah dari perubahan kesadaran masyarakat miskin.
3. Ada pengaruh antara variable sumber-sumber dengan variabel implementasi program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan uji hipotesa dapat disimpulkan signifikan karena harga Z

hitung setelah dibandingkan dengan Z tabel pada taraf signifikan 1% diperoleh angka $8,58 > 2,58$. Dengan demikian Z hitung $>$ Z tabel. Sarana-sarana pendukung seperti informasi dan fasilitas yang tersedia mempunyai peranan besar yang menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Kemampuan menyediakan informasi, sarana, dan mempergunakan sarana itu demi tujuan pengentasan kemiskinan sangat menentukan keberhasilan.

4. Ada pengaruh antara variabel komunikasi, sikap dan sumber-sumber dengan variabel implementasi program. Ini terlihat berdasarkan uji hipotesa dengan besar sumbangan 12,25% melalui pengujian dengan Koefisien Determinan.

B. Saran-saran

Untuk meningkatkan pelayanan program penanggulangan kemiskinan ini, dan didasari oleh kesimpulan diatas, maka penulis mencoba mengajukan saran – saran sebagai berikut :

1. Dari hasil kajian dalam penelitian ini dapat diketahui masih adanya keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi program pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, hendaknya organisasi pelaksana perlu meningkatkan sosialisasi kepada warga binaan dengan mengintensifkan pertemuan-pertemuan kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun dalam paguyuban-paguyuban.
2. Juga diketahui kurang optimalnya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh masih kurangnya keterampilan warga binaan. Pelatihan yang selama ini diberikan dirasa belum mencukupi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan yang mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengembalian modal pinjaman bergulir yang diberikan mekanisme teguran agar dana yang diberikan dapat terus bergulir di warga binaan. Aturan yang disepakati bersama sebelum pinjaman modal diberikan harus ditegakkan oleh para pengelola.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pelaksana program perlu ditingkatkan dengan meningkatkan partisipasi. Di dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pelaksana program terjadi kontak antara para peserta program disertai pembinaan dari pelaksana.
5. Keterlambatan dalam pemberian persetujuan program perlu mekanisme yang lebih sederhana sehingga semua dapat terjangkau bantuan dengan merata. Pekerja sosial yang ada di lapangan diberikan keleluasaan memberikan referensi untuk memberi pinjaman yang lebih mudah kepada warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Wahab, Sholichin, Analisis Kebijakan dari Formulir ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
2. Brotowidjojo, Mukayat, Manajemen Kepegawaian, Penerbit Alumni, Bandung, 1991
3. Davis, Keith, Management Strategies, New York : Mc Grow Hill, 1965
4. Dessler, Gary, Human Behaviour : Improving Performance At Work, Riston, Virginia, Prentice Hall Corp
5. Edward III, George C, Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington, DC, 1980
6. Effendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1984
7. Grindle, Marilee, S, Politic And Policy Implementation In The Third World, Pricenton, NJ. Pricenton, University Press, 1980
8. Gerungan, W.A., Psych, Psikologi Sosial, Eresco Bandung, 1998.
9. Indrawijaya, Adam, Perilaku Organisasi, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989.
10. Kuntjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2000
11. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Jilid 1 dan 2, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980.
12. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara Jakarta, 2002
13. Nasution, Pedoman Pengelolaan Data Penanggulangan Kemiskinan, Departemen Sosial Pusat, 1996
14. Nasri, M. Metodologi Penelitian Pembangunan, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1997
15. PDE (Perencanaan dan Evaluasi) Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
16. Pareek, Udai, Perilaku Organisasi, P.T. Pustaka Binama Pressindo, Jakarta, 1991.

17. Roger, Carl, The Human Equation in Employee Productivity, Industrial Organization, Zurich, 1955
18. Singarimbun, M dan Effendi Sofian, Metodologi Penelitian Survei, Penerbit LP3S, Jakarta, 2001
19. Suit, Yusuf dan Almasdi, Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
20. Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1999
21. Sunarto, Dasar-dasar Komunikasi Administrasi, Duta Wacana, Yogyakarta, 1991.
22. Suryawasita, A., Analisis Sosial dan Refleksi Teologis, Kanisius Yogyakarta, 1997
23. Supriyatna, Tjahya, Metodologi Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997
24. Tjokronidjojo, Bintoro, Pengantar Administrasi Pembangunan, Penerbit LP3S, Jakarta, 1982
25. Wahab, A. Solichin, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara Semarang 1998
26. Widjaja, A.W. dan Arsyik Hawab, Komunikasi, Administrasi, Organisasi, Manajemen dalam Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
27. Winardi, Pengantar Ilmu Manajemen Suatu Pendekatan Sistem, Penerbit Nova, Bandung, 1988
28. Zuhri, Manajemen IAIN Walisongo, Jilid: Diktat Mata Kuliah Manajemen IAIN Walisongo, Semarang, 1987.
29. Zen, Amartya, Kemiskinan di Negara Berkembang, Mizan Bandung, 1988
30. Dinas Sosial Kota Semarang, Prosedur Tetap Rujukan JPS-BS, Penerbit Dinas Sosial Kota Semarang, 1999.
31. Departemen Sosial RI, Informasi Umum Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPS-BS), Departemen Sosial RI, 1991).